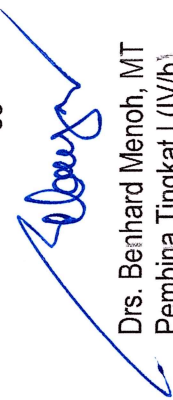


INFORMASI TERTENTU YANG DIKECUALIKAN

PERANGKAT DAERAH: BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			JANGKA WAKTU		
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Ntt	➤ Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ➤ Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Data Tidak Valid Karena Merupakan Data Unaudited Dan Belum Dapat Dipublikasikan	Menjaga Akuntabilitas Data Sehingga Dapat Dipertanggungjawabkan	Sampai Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur

Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip. 19720512 199101 1 001

Paraf Hirarki		
Plt. Sekretaris		
Perencana Ahli Muda		
Pranata Komputer Ahli Pertama		

FORMAT DAFTAR INFORMASI PUBLIK
 BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentangsi Arsip
1	2	3	4	5	6	7
1	Laporan Bulanan	Badan Keuangan Daerah	Sekretariat Badan Keuangan Daerah	Jan - Des	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
2	Laporan Semester			Januari, Juli	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
3	Laporan Triwulan			April, Juli, September, Januari	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
4	Laporan Tahunan			Januari	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
5	Laporan Kerja Instansi Pemerintah			Januari - Feb	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
6	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban			Januari - Feb	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
7	Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah			Januari	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
8	Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah			Setiap 5 Tahun	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
9	Survey Kepuasan Masyarakat			Januari, Juli	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
10	Standar Operasional Prosedur				Soft & Hard	s/d 15 Tahun
11	Statistik Keuangan Daerah Kab/Kota (Struktur APBD)			Januari - Desember	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
12	Data Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota	Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota		Oktober - Desember	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
13	Data Penetapan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kab/Kota			Juli - Oktober	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
14	Data Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota			Mei – Agustus	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
15	Peraturan Daerah tentang APBD	Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah		November - Desember	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
16	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD			September	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
17	Peraturan Gubernur tentang APBD			November - Desember	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
18	Rancangan Peraturan Daerah APBD	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		September	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
19	Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD			Januar s.d Mei	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
20	Laporan Realisasi Anggaran			Januar s.d Mei	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
21	Laporan Perubahan SAL			Januar s.d Mei	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
22	Laporan Operasional			Januar s.d Mei	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
23	Neraca			Januar s.d Mei	Soft & Hard	s/d 15 Tahun

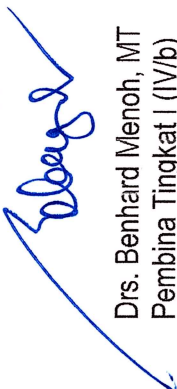
24	Laporan Arus Kas				Januari s.d Mei	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
25	Laporan Perubahan Ekuitas				Januari s.d Mei	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
26	Catatan Atas Laporan Keuangan				Januari s.d Mei	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
27	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah				Januari s.d Juni	Soft & Hard	s/d 15 Tahun
28	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah				Januari s.d Juni	Soft & Hard	s/d 15 Tahun

Keterangan :

1. Ringkasan Isi Informasi : berupa judul informasi public;
2. Perangkat daerah yang menguasai informasi : keterangan perangkat daerah yang menguasai informasi;
3. Penanggungjawab pembuatan/penerbitan informasi : pejabat yang menerbitkan informasi;
4. Waktu dan tempat pembuatan informasi : keterangan waktu dan tempat diterbitkan informasi;
5. Bentuk informasi yang tersedia: keterangan informasi tersedia dalam bentuk hard copy atau soft copy atau keduanya;
6. Retensi arsip : jangka waktu penyimpanan arsip.

Paraf Hirarki	
Plt. Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	
Pranata Komputer Ahli Pertama	

Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Drs. Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip. 19720512 199101 1 001



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jalan Raya El Tari No 52, ☎ (0380) 833145

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTT
TAHUN 2024

No	Isi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab/ Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu, Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi	Masa Berlaku
1	Profil Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi NTT	BPAD Prov. NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Kupang, September 2019	Hardcopy dan Softcopy	Selama berlaku
2	Tugas dan Fungsi Organisasi	BPAD Prov. NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Kupang, September 2019	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku
3	Profil Pimpinan BPAD Prov. NTT Provinsi NTT	BPAD Prov. NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Kupang, September 2019	Hardcopy dan Softcopy	Selama berlaku
4	Struktur Organisasi BPAD Provinsi NTT	BPAD Prov. NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Kupang, September 2023	Hardcopy dan Softcopy	Selama berlaku
5	Perjanjian Kinerja Pejabat secara berjenjang	BPAD Prov. NTT	Sekretariat BPAD Prov. NTT	Kupang, Januari 2024	Hardcopy dan Softcopy	Berkala
6	SOP kegiatan setiap bidang	BPAD Prov. NTT	Sekretariat BPAD Prov. NTT	Kupang, Januari 2019	Hardcopy dan Softcopy	Berkala
7	Informasi media sosial dan Website BPAD Prov. NTT (Facebook, Instagram, Tik-Tok, Youtube)	BPAD Prov. NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Kupang, Agustus 2024	Softcopy pada website	Selama berlaku

8	Laporan Realisasi Belanja	BPAD Prov. NTT	Sub Elagian Keuangan	Kupang, Januari 2019	Hardcopy dan Softcopy	Berkala
9	Laporan Realisasi Pendapatan	BPAD Prov. NTT	Sub Elagian Keuangan	Kupang, Januari 2019	Hardcopy dan Softcopy	Berkala
10	Informasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran	BPAD Prov. NTT	Sekretariat BPAD Prov. NTT	Kupang, Januari 2019	Hardcopy dan Softcopy	Berkala
11	Pengadaan Barang dan Jasa	BPAD Prov. NTT	Sekretariat BPAD Prov. NTT	Kupang, Januari 2019	Hardcopy dan Softcopy	Berkala
12	Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa	BPAD Prov. NTT	Pengguna Anggaran BPAD Prov. NTT	Kupang, Januari 2019	Hardcopy dan Softcopy	Berkala
13	Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BPAD Prov. NTT	Sekretariat BPAD Prov. NTT	Kupang, Januari 2020	Hardcopy dan Softcopy	Berkala
14	Laporan Kinerja PPID Pembantu pada BPAD Prov. NTT	BPAD Prov. NTT	Kepala BPAD Prov. NTT	Kupang, Juli 2024	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
15	Laporan Hasil Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	BPAD Prov. NTT	Sekretariat BPAD Prov. NTT	Kupang, Januari 2019	Hardcopy dan Softcopy	Berkala



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jalan Raya El Tari No 52, ☎ (0380) 833145

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

No	Sumber Informasi	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Ditutup	
1.	BPAD Prov. NTT	Dokumen Kepegawaian dan Pegawai Perangkat Daerah	UU No. 14 Tahun 2008 ttg. Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga Privasi dan melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2	BPAD Prov. NTT	Dokumen penjatuhan hukuman disiplin ASN	UU No. 14 Tahun 2008 ttg. Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga Privasi dan melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3	BPAD Prov. NTT	Dokumen data wajib pajak dan tunggaknya	UU No. 14 Tahun 2008 ttg. Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga Privasi dan melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

No	Sumber Informasi	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Ditutup	
4	BPAD Prov. NTT	Dokumen data kendaraan	UU No. 14 Tahun 2008 ttg. Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga Privasi dan melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5	BPAD Prov. NTT	Laporan Keuangan yang belum di edit	UU No. 14 Tahun 2008 ttg. Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga dan melindungi data agar dapat dipertanggungjawabkan	Menunggu persetujuan pimpinan
6	BPAD Prov. NTT	Dokumen Penawaran kontrak	UU No. 14 Tahun 2008 ttg. Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 dan Kepres No. 54 Tahun 2010	Jika dibuka dikhawatirkan akan terdapat persaingan usaha yang tidak sehat	Persaingan usaha setara dan adil	Tidak terbatas

An. Plt. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Drs. Joseph Florianus Napal, MM

SK. TK.I (IV/b)

NIP. 19590519 199703 1 008



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jl. Polisi Militer Nomor 2 Telepon. 833462, 832975
Pos-el: bappelitbangdaprovntt@gmail.com
Laman: <http://www.bappelitbangda.nttprov.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR: 500.12.18/19/BP4D.1**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, maka perlu membuat klasifikasi daftar informasi publik di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian DALAM NEGERI dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
10. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122/KEP/HK/2022 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024, dengan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik tanpa terkecuali.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 20 Mei 2024

Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Dr. Alfonsus Theodorus, ST., MT

Pembina Utama Muda

NIP 197401191999031004

Lampiran I
Keputusan Kepala Bapperida Provinsi NTT
Nomor : 500.12.18/19/BP4D1
Tentang : Penetapan Daftar Informasi Publik
Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NTT TAHUN 2024

No	Judul Informasi	Ringkasan Informasi	Pejabat/Unit/Satker/ yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	9	10
INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA							
1. INFORMASI TENTANG PROFIL BADAN PUBLIK							
a	Kedudukan/domisili beserta alamat lengkap	Berisi tentang kedudukan atau domisili, alamat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	Kupang, 2024	Setiap data tidak dihapus, untuk Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
b	Visi dan Misi	Berisi tentang visi dan misi mengacu pada Visi Kepala Daerah terpilih	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	Kupang, 2024	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub Kepegawaian dan Umum & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
c	Tugas dan Fungsi	Memuat informasi berkaitan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	Kupang, 2024	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub Kepegawaian dan Umum & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
d	Struktur Organisasi	Memuat informasi struktur organisasi Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	Kupang, 2024	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub Kepegawaian dan Umum & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
e	Profil Singkat Organisasi	Memuat profil singkat organisasi Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	Kupang, 2024	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub Kepegawaian dan Umum & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
f	Profil Pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Memuat Profil Pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	Kupang, 2024	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub Kepegawaian dan Umum & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida

No	Judul Informasi	Ringkasan Informasi	Pejabat/Unit/Satker/ yang Menguasai	Penanggung Jawab Pembuatan atau	Waktu dan Tempat	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Jenis Media yang Memuat
1	2	3	4	5	6	9	10
2. Informasi Laporan Akuntabilitas Kerja							
a	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022	Memuat Informasi tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022 yang memuat : 1. Rencana dan Capaian Kinerja Badan Publik 2. Dukungan SDM 3. Realisasi Anggaran	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	Sekretaris	Kupang, 2022	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub PDE & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
b	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2023	Memuat Informasi tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 yang memuat : 1. Rencana dan Capaian Kinerja Badan Publik 2. Dukungan SDM 3. Realisasi Anggaran	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	Sekretaris	Kupang, 2023	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub PDE & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
c	Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2024	Memuat tentang Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2024	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	Sekretaris	Kupang, 2024	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub PDE & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
3. Ringkasan Laporan Keuangan							
a	SK Penanggung Jawab Pelaksana Program dan Kegiatan Tahun 2024	Surat Keputusan Penanggung Jawab Pelaksana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2024	Sub Bagian Keuangan	Sekretaris	Kupang, 2024	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub Bagian Keuangan & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
b	Neraca Tahun 2023	Memuat tentang Neraca Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2023	Sub Bagian Keuangan	Sekretaris	Kupang, 2024	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub Bagian Keuangan & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
c	CALK Tahun 2023	Memuat tentang Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2023	Sub Bagian Keuangan	Sekretaris	Kupang, 2024	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub Bagian Keuangan & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
d	Laporan Arus Kas Tahun 2023	Memuat tentang Arus Kas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2023	Sub Bagian Keuangan	Sekretaris	Kupang, 2024	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub Bagian Keuangan & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida

e	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023	Memuat tentang Realisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2023	Sub Bagian Keuangan	Sekretaris	Kupang, 2024	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub Bagian Keuangan & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
f	Daftar Aset dan Inventaris 2023	Memuat tentang Aset yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	Kupang, 2024	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub Bagian Keuangan & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
g	Informasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024	Memuat tentang Rencana Kerja Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2024	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	Sekretaris	Kupang, 2024	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub PDE & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
h	Informasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024	Memuat tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2024	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	Sekretaris	Kupang, 2024	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub PDE & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida

4. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik

a	Laporan Tahunan PPID Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2023	Memuat informasi mengenai laporan PPID tahun 2023	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	Kupang, 2024	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di PPID & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
b	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Tahun 2022	Memuat informasi tentang Laporan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	Sekretaris	Kupang, 2023	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub PDE & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
c	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Tahun 2023	Memuat informasi tentang Laporan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2023	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	Sekretaris	Kupang, 2024	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub PDE & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida

5. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa							
a	Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2024	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	Kupang, 2024	Setiap data tidak dihapus, untuk Softcopy tersedia setiap saat di Sub Kepegawaian dan Umum & Hardcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur							
a	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT	Memuat Informasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2018-2023	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kupang, 2019	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Bidang PPEPD & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur							
a	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTT	Memuat Informasi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Provinsi NTT Tahun 2021	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kupang, 2020	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Bidang PPEPD & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
b	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTT	Memuat Informasi tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Provinsi NTT Tahun 2021	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kupang, 2021	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Bidang PPEPD & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
c	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTT	Memuat Informasi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Provinsi NTT Tahun 2022	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kupang, 2021	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Bidang PPEPD & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
d	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTT	Memuat Informasi tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Provinsi NTT Tahun 2022	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kupang, 2022	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Bidang PPEPD & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
e	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTT	Memuat Informasi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Provinsi NTT Tahun 2023	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kupang, 2022	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Bidang PPEPD & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
f	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTT	Memuat Informasi tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Provinsi NTT Tahun 2023	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kupang, 2023	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Bidang PPEPD & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida

g	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTT	Memuat Informasi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTT Tahun 2024	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kupang, 2023	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Bidang PPEPD & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
h	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTT	Memuat Informasi tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTT Tahun 2024	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kupang, 2024	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Bidang PPEPD & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
i	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTT	Memuat Informasi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTT Tahun 2025	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kupang, 2022	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Bidang PPEPD & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida

8. Rencana Strategis (RENSTRA) Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur

a	Rencana Strategis Bappelitbangda Provinsi NTT	Memuat Informasi tentang Rencana Strategis Bapperida Provinsi NTT Tahun 2018-2023	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	Sekretaris	Kupang, 2018	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub PDE & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
b	Rencana Strategis Bappelitbangda Provinsi NTT	Memuat Informasi tentang Rencana Strategis Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2018-2023	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	Sekretaris	Kupang, 2021	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub PDE & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
c	Rencana Strategis Bappelitbangda Provinsi NTT	Memuat Informasi tentang Rencana Strategis Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2024-2026	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	Sekretaris	Kupang, 2024	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub PDE & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
d	Rencana Strategis Bapperida Provinsi NTT	Memuat Informasi tentang Rencana Strategis Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024-2026	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	Sekretaris	Kupang, 2024	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub PDE & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida

8. Rencana kerja (RENJA) Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur

a	Rencana kerja Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2021	Memuat Informasi tentang Rencana kerja Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2021	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	Sekretaris	Kupang, 2020	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub PDE & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
b	Rencana kerja Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2022	Memuat Informasi tentang Rencana kerja Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2022	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	Sekretaris	Kupang, 2021	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub PDE & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida

c	Rencana kerja Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2023	Memuat Informasi tentang Rencana kerja Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2023	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	Sekretaris	Kupang, 2022	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub PDE & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
c	Rencana kerja Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024	Memuat Informasi tentang Rencana kerja Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	Sekretaris	Kupang, 2023	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub PDE & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
d	Rencana kerja Bapperida Provinsi NTT Tahun 2025	Memuat Informasi tentang Rencana kerja Bapperida Provinsi NTT Tahun 2025	Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	Sekretaris	Kupang, 2024	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub PDE & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida

No	Judul Informasi	Ringkasan Informasi	Pejabat/Unit/Satker/ yang Menguasai	Penanggung Jawab Pembuatan atau	Waktu dan Tempat	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Jenis Media yang Memuat
1	2	3	4	5	6	9	10
INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA							
1	Informasi tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat	Memuat Informasi tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	Kupang, 2023	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub Kepegawaian dan Umum & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
2	Informasi tentang Laporan Data dan Informasi Kemiskinan	Memuat Informasi tentang Laporan Data Kemiskinan	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kabid PPM	Kupang, 2023	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Bidang PPM & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
3	Informasi tentang Data dan Informasi Stunting	Memuat Informasi tentang Data dan Informasi Stunting	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kabid PPM	Kupang, 2023	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Bidang PPM & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
4	Informasi tentang Data dan Informasi Pengarusutamaan Gender	Memuat Informasi tentang Data dan Informasi Pengarusutamaan Gender	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kabid PPM	Kupang, 2023	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Bidang PPM & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
5	Informasi tentang Penyandang Disabilitas	Memuat informasi penyandang disabilitas berdasarkan ragam, dan organisasi penyandang disabilitas	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kabid PPM	Kupang, 2023	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Bidang PPM & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
6	Peraturan/Keputusan dari OPD	Memuat Peraturan Yang mengikat, SE penyusunan renstra dan renja setiap opd	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Sekretaris	Kupang, 2023	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Bidang PPM & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida

No	Judul Informasi	Ringkasan Informasi	Pejabat/Unit/Satker/ yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	9	10
INFORMASI YANG DIUMUMKAN SETIAP SAAT							
1. Informasi tentang Daftar Informasi Publik Badan							
a	Daftar Informasi Publik Bapperida Provinsi NTT Tahun 2023	Memuat Informasi-informasi publik yang tersedia secara berkala, serta-merta, setiap saat dan dikecualikan Tahun 2023	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	Kupang, 2023	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub Kepegawaian dan Umum & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
b	Daftar Informasi Publik Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024	Memuat Informasi-informasi publik yang tersedia secara berkala, serta-merta, setiap saat dan dikecualikan Tahun 2024	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	Kupang, 2024	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub Kepegawaian dan Umum & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
c	Daftar peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan Bapperida Provinsi NTT	Peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan Bapperida Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	Kupang, 2024	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub Kepegawaian dan Umum & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
2. Informasi Lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan							
a	Dokumen Pendukung Informasi Wajib Berkala	Memuat Dokumen Naskah Pendukung Informasi-Informasi Wajib Berkala yang meliputi LHKPN, Laporan Keuangan, Program dan Kegiatan dan lain-lain yang menjadi bagian dari informasi wajib berkala	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	Kupang, 2024	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub Kepegawaian dan Umum & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
3. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan							
a	Informasi mengenai Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan	Memuat antara lain: 1. Pedoman Pengelolaan Organisasi 2. Pedoman Pengelolaan Administrasi 3. Pedoman Pengelolaan Kepegawaian 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	Kupang, 2023	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub Kepegawaian dan Umum & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida

b	Dokumen Laporan Keuangan Bapperida	Memuat antara lain : 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca Keuangan 3. Laporan Arus Kas dan Catatan Laporan Keuangan 4. Penjabaran Realisasi Anggaran	Sub Bagian Keuangan	Sekretaris	Kupang, 2024	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub Kepegawaian dan Umum & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
4. Informasi tentang Pedoman Pelayanan Publik							
a	Informasi tentang Prosedur Kerja Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Yang dimaksud lengkap tersedianya dokumen yang menyebutkan jenis layanan Bapperida berikut SOP Pegawai Bapperida	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	Kupang, 2023	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Sub Kepegawaian dan Umum & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida
5. Informasi tentang Laporan Pelayanan Informasi Badan Publik							
a	Informasi tentang daftar penelitian yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Daftar penelitian yang dilakukan Bapperida	Bidang Riset dan Inovasi	Sekretaris	Kupang, 2024	Setiap data tidak dihapus, untuk Hardcopy tersedia setiap saat di Bidang Riset dan Inovasi & Softcopy tersedia di Website Bapperida	Website Bapperida

Kupang, 20 Mei 2024
 Dr. Kepala Bapperida
 Provinsi Nusa Tenggara Timur

[Signature]

Dr. Alfonsus Theodorus, ST., MT.
 NIP. 197401191999031004



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jl. Polisi Militer Nomor 2 Telepon. 833462, 832975
Pos-el: bappelitbangdaprovntt@gmail.com
Laman: <http://www.bappelitbangda.nttprov.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR: 500.12.18/19/BP4D.1**

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

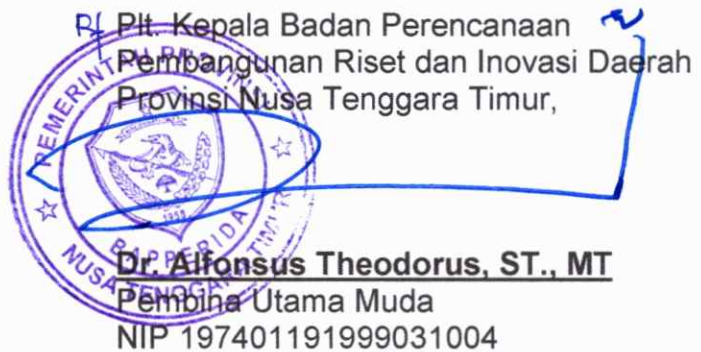
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122/KEP/HK/2022 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
- KESATU** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan informasi yang Dikecualikan
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.18/19/BP4D1 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Mei 2024

Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Dr. Alfonsus Theodorus, ST., MT
Pembina Utama Muda
NIP 197401191999031004

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : 500.12.18/19/BP4D1

Pada hari ini, Senin tanggal 20 bulan Mei tahun 2024 bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2		3	4	5
1	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	- Mengungkapkan data pribadi seorang ASN - Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di Pengadilan	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
2	Data usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	- Mengganggu dan menghambat proses penyusunan, proses kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	- Menjaga keamanan dalam proses penyusunan, pengambilan kebijakan - Menjaga kerahasiaan data pribadi ASN	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
3	Hasil penyampaian uji kompetensi Bappelitbangda	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	- Mengungkapkan data pribadi Hasil Uji Kompetensi ASN yang bersifat rahasia	- Menjaga kerahasiaan data pribadi ASN	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
4	Arsip dinamis yang memuat sifatnya rahasia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf l:	- Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan pribadi - Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	- Menjaga kerahasiaan dokumen - Mencegah penyalahgunaan dokumen pihak tertentu	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan

5	Laporan Keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Belum terjaminnya kebenaran informasi dan mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan negara	- Laporan keuangan yang belum diaudit tidak terekspos - Mencegah penyalahgunaan dokumen pihak tertentu	1 tahun
---	-------------------------------------	---	---	---	---------

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Maxianes Waruf	Sekretaris	Sekretariat	[Signature]
2	Rafita O.S. Hutagaol	Kasubag Kepegum	Sekretariat	[Signature]



Kupang, 20 Mei 2024
 Pjt. Kepala Bapperida
 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dr. Alfonsus Theodorus, ST., MT.
 NIP. 197401191999031004



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari No 52, ☎ (0380) 833114 Email : biroadpim@gmail.com

Laman : biroadpim.nttprov.go.id

DAFTAR INFOMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024
NOMOR: 500.12.12/2/AP2

No	Sumber Informasi	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Ditutup	
1.	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Dokumentasi berupa foto/video Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang kurang beretika	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga privasi dan melindungi data yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Dokumentasi dan hasil audiensi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang sifatnya terbatas dan rahasia	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga privasi dan melindungi data yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Acara harian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga dan melindungi data yang bersifat rahasia	Sampai kegiatan telah terlaksana

No	Sumber Informasi	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Ditutup	
4	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Rundown Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga dan melindungi data yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Siaran Pers, foto/video yang belum di setujui/di- <i>accord</i> oleh Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga dan melindungi data yang belum di setujui/di- <i>accord</i> oleh Pimpinan	Setelah di setujui/di- <i>accord</i> oleh Pimpinan
6	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Data Pribadi Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga privasi dan melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
7	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Data kepegawaian ASN dan Tenaga Kontrak	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga privasi dan melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
8	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Draft Laporan, Materi Pimpinan, Peraturan, Keputusan Kepala Biro dan Instruksi yang belum di setujui/di- <i>accord</i> oleh Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga dan melindungi data yang belum di setujui/di- <i>accord</i> oleh Pimpinan	Setelah di setujui/di- <i>accord</i> oleh Pimpinan

No	Sumber Informasi	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Ditutup	
			Informasi Publik pasal 17	tidak berwenang	rahasia	
10	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Laporan keuangan yang belum diaudit	UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga dan melindungi data yang belum diaudit	Setelah diaudit

Ditetapkan : di Kupang

Pada tanggal : 01 Agustus 2024

Kepala Biro Administrasi Pimpinan
Setda

Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Prisila Q. Parera, SE

Pembina Tk. I

NIP. 197603032001122002

Paraf Hierearki	
Plt. Kepala Bagian Materi dan Pimpinan	
Analisis Publikasi	<i>[Signature]</i>



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari No 52, ☎ (0380) 833114 Email : biroadpim@gmail.com

Laman : biroadpim.nttprov.go.id

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024
NOMOR: 500.12.12/3/AP2

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	Profil Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Sub Bagian Tata Usaha Biro	Kupang, September 2022	Hardcopy dan Softcopy	Selama berlaku
2	Profil Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Sub Bagian Tata Usaha Biro	Kupang, April 2023	Hardcopy dan Softcopy	Selama berlaku
3	Struktur Organisasi Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Sub Bagian Tata Usaha Biro	Kupang, 1 Agustus 2024	Hardcopy dan Softcopy	Selama berlaku
4	Maklumat Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Sub Bagian Tata Usaha Biro	Kupang, September 2022	Softcopy	Selama berlaku
5	Informasi media sosial Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT (Facebook, Instagram, Tik-Tok,	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan	Kupang, 1 Agustus 2024	Softcopy	Selama berlaku

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
	Youtube <i>Chanel</i> dan gmail)					
6	Surat Tugas Tim Kerja PPID Pelaksana pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT Tahun 2024	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Sub Bagian Tata Usaha Biro	Kupang, Juli 2024	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
7	Daftar Informasi yang dikecualikan pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, 1 Agustus 2024	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
8	Daftar Informasi Publik Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, 1 Agustus 2024	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
9	Tata cara sengketa informasi pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, Mei 2023	Hardcopy dan Softcopy	Selama berlaku
10	Laporan Kinerja PPID Pembantu pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, Juli 2024	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
11	SOP Tata cara informasi yang dikecualikan	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, September 2022	Hardcopy dan Softcopy	Selama berlaku

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
12	SOP Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, Mei 2023	Hardcopy dan Softcopy	Selama berlaku
13	Jadwal Pelayanan Informasi Publik	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Kupang, 1 Agustus 2024	Hardcopy dan Softcopy	Selama berlaku

Ditetapkan : di Kupang
Pada tanggal : 01 Agustus 2024

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Prisila Q. Parera, SE
Pembina Tk. I
NIP. 197603032001122002

Paraf Hierearki	
Plt. Kepala Bagian Materi dan Pimpinan	
Analisis Publikasi	<i>f</i>



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari No 52, ☎ (0380) 833114 Email : biroekonomidanap@gmail.com
KUPANG

27 September 2024

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur

di -
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 000.8.3.4/ 898 /EK1.1

No.	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Daftar Informasi Publik Tahun 2024	1 (satu)	Dikirim untuk diproses selanjutnya.
2.	Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2024	jepitan	

Plt. Kepala Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Drs. Alexander B. Koroh, MPM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197004271990031005

TAHUN 2024

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat daerah yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan / penerbbit informasi	Klasifikasi Informasi			Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Rentensi Arsip
					Berkaita	Selanjut Saat	Serta Merka			
INFORMASI PUBLIK YANG DISIJDIAKAN DAN DITUMBUKAN SECARA BERKALA										
a Informasi Badan Publik										
1	Profil Biro	Memuat informasi Profil, Visi, Misi, Tupoksi Biro	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Serda Prov NTT		✓		Biro PAP, Tahun 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
2	Alamat Biro	Memuat daftar alamat dan kantor Biro	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Serda Prov NTT		✓		Biro PAP, Tahun 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
3	Tugas dan Fungsi Biro	Berisi sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Serda Prov NTT		✓		Biro PAP, Tahun 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
4	Struktur Organisasi	Susunan organisasi Biro	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Serda Prov NTT		✓		Biro PAP, Tahun 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
5	Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak	Kondisi jumlah pegawai dan tenaga kontrak di lingkup Biro	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Serda Prov NTT		✓		Biro PAP, Tahun 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
6	Rekap Kepegangatan (DUG) Pegawai	(1) Data-data Kepegawaian dan Daftar Urutan Kepegangatan (2) Informasi Struktur PNS (3) Data Pejabat Struktural	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Serda Prov NTT		✓		Biro PAP, Tahun 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
b	Informasi Ringkasan Program/Kegiatan									
1	Nama Program dan Kegiatan	Ringkasan informasi tentang program/kegiatan yang sedang dijalankan	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Serda Prov NTT		✓		Biro PAP, Tahun 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
2	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Tahun 2024	Anggaran Kegiatan Biro Tahun 2024	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Serda Prov NTT		✓		Biro PAP, Tahun 2024	Hardcopy	Selama berlaku
3	Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	Informasi yg memuat Program Kerja tahun 2024 yg bersumber baik dari APBD dan APBN	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Serda Prov NTT		✓		Biro PAP, Tahun 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
4	Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024	(1) Rencana Anggaran dan Pendapatan (2) Rincian Belanja Tidak langsung SKPD (3) Rincian Belanja Langsung SKPD (4) Rincian Belanja Langsung Program	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Serda Prov NTT		✓		Biro PAP, Tahun 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
5	Rencana Umum Pengadaan (RUP) Biro PAP Tahun 2024	Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2024	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Serda Prov NTT		✓		Biro PAP, Tahun 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
Ringkasan Informasi Kinerja										

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat daerah yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan / penعبit informasi	Klasifikasi Informasi			Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Rentensi Asip
					Berkala	Setiap Saat	Serta Merta			
1	Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) Biro PAP Tahun 2023	Informasi terkait capaian kinerja yang ditargetkan dalam Rencana Strategis Biro	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro PAP, Tahun 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
d Ringkasan Laporan Keuangan										
1	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2023	Informasi mengenai pencapaian program kegiatan baik secara fisik di lapangan dan neraca keuangan masing-masing program atau kegiatan tahun 2023	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro PAP, Tahun 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
2	Inventaris dan Aset Biro Tahun 2024	Laporan Inventaris dan Aset Biro	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro PAP, Tahun 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
e Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik										
1	Jumlah Permintaan Informasi Publik di Badan Publik	Informasi terkait data statistik dan permintaan data yg tersedia dan tidak tersedia di Badan publik	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro PAP, Tahun 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
2	Laporan PPIID Tahun 2023	Laporan evaluasi pelaksanaan PPIID Biro tahun 2023	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro PAP, Tahun 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
f Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi										
1	Standar Prosedur Operasional (SOP) Memperoleh Informasi	Informasi tentang tata cara memperoleh informasi di Badan Publik	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT			✓	Biro PAP, Tahun 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
2	Standar Prosedur Operasional (SOP) Pengajuan Keberatan	Informasi tentang tata cara mengajukan keberatan informasi di Badan Publik	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT			✓	Biro PAP, Tahun 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
g Informasi Tentang Prosedur Peringatan Dini										
1	Jalur Evakuasi	Informasi terkait bagian jalur evakuasi di Gedung Sasando Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur	Sub Bagian Tata Usaha	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT			✓	Biro PAP, Tahun 2024	Softcopy	Selama berlaku
Informasi Publik YANG DISEDIAKAN SETIAP SAAT										
a Informasi tentang peraturan, Surat Keputusan Kepala Biro dan kerjasama dengan pihak ketiga										
1	SK Gubernur Nomor: 75/KEP/HK/2024	Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	Subbag Analis Ekonomi Mikro dan Makro	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2024	Softcopy dan hardcopy	5 Tahun
2	SK Gubernur Nomor: 263/KEP/HK/2024	Surat Keputusan Gubernur tentang Tugas Penerimaan Digitalisasi Pertanian Dalam Mendukung Kelangkaan Pangan dan Penanganan Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag Analis Ekonomi Mikro dan Makro	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2024	Softcopy dan hardcopy	5 Tahun
3	SK Gubernur Nomor: 377/KEP/HK/2021	Surat Keputusan Gubernur tentang Pengurus Asosiasi Sentra Madu Mutus Periode 2021-2023	Subbag Sumber Daya Alam	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	5 Tahun
4	SK Gubernur Nomor: 123/KEP/HK/2021	Surat Keputusan Gubernur tentang Kolompok Kerja Pengelolaan Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021	Subbag Sumber Daya Alam	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	5 Tahun

No	Jenis Informasi	Ringkasan isi informasi	Perngkat daerah yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan/ penerbbit informasi	Klasifikasi Informasi			Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Reaksi informasi Arsip
					Berkala	Setiap Saat	Serta Merta			
5	SK Gubernur Nomor : 219/KEP/HK/2022	Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Pembentukan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan Jambu Mele di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag Sumber Daya Alam	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2022	Softcopy dan hardcopy	5 Tahun
6	SK Gubernur Nomor : 59/KEP/HK/2022	Surat Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022	Subbag Sumber Daya Alam	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2022	Softcopy dan hardcopy	5 Tahun
7	SK Gubernur Nomor : 80/KEP/HK/2023	Surat Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023	Subbag Sumber Daya Alam	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2023	Softcopy dan hardcopy	5 Tahun
8	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2020	Peraturan Gubernur Tentang Sentra Madu Mutis	Subbag Sumber Daya Alam	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		✓		Biro Hukum, 2020	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
9	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 117 Tahun 2022	Peraturan Gubernur Tentang Sentra Pengembangan Jambu Mele	Subbag Sumber Daya Alam	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		✓		Biro Hukum, 2022	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
10	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2021	Peraturan Gubernur Tentang Sentra Pengembangan Bambu	Subbag Sumber Daya Alam	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		✓		Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
11	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2019	Peraturan Daerah Tentang Pendirian PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroal)	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		✓		Biro Hukum, 2019	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
12	SK Gubernur Nomor : 3/KEP/HK/2019	Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pejabat Pada Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok-Kupang Periode Tahun 2019-2023	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2019	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
13	SK Gubernur Nomor : 416/KEP/HK/2019	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang pengangkatan Direksi perseroan terbatas Kawasan Industri Bolok Masa Bakti 2019-2024	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2019	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
14	SK Gubernur Nomor : 392/KEP/HK/2019	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Panitia Pelaksana Seleksi Calon Komisaris Dan Direksi Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2019	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
15	SK Gubernur Nomor : 354/KEP/HK/2019	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Penelusuran Dan Identifikasi Titik Koordinat Lahan Kawasan Industri Bolok Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2019	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
16	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2020	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyerahan Modal Daerah Pada PT. Kawasan Industri Bolok	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		✓		Biro Hukum, 2020	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
17	SK Gubernur Nomor : 153/KEP/HK/2020	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tentang Deliniasi Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Tenau-Bolok Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2020	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
18	SK Gubernur Nomor : 134/KEP/HK/2020	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tentang Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Tenau-Bolok Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2020	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Peraungkat daerah yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan/ pencipta informasi	Klasifikasi Informasi			Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Rentensi Atsip
					Berkala	Setiap Saat	Serta Merta			
19	SK Gubernur Nomor: 54/KEP/HK/2020	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Dan Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Serda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2020	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
20	SK Gubernur Nomor: 61/KEP/HK/2020	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 61/KEP/HK/2020 tentang Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Tenu-Bolok Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Serda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2020	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
21	SK Gubernur Nomor: 194/KEP/HK/2021	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Penelusuran dan Identifikasi Titik Koordinat Lahan Kawasan Industri Bolok Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Serda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
22	SK Gubernur Nomor: 112/KEP/HK/2022	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Penelusuran Batas Dan Penyelesaian Masalah Tanah Kawasan Industri Bolok Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Serda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2022	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
23	SK Gubernur Nomor: 289/KEP/HK/2024	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Dengan Hormat Saudara Johannes Agusinus Mboek Dari Jabatan Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah NTT Masa Bakti 2023-2027 dan Pengangkatan Saudara Dra. Flouri Rita Wuisan, MM Sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah NTT Masa Bakti 2024-2028	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Serda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2024	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
24	SK Gubernur Nomor: 290/KEP/HK/2024	Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Saudara Dr. Prita Oscar Panggidae, M.Si, MEP Sebagai Komisaris Independen Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah NTT Masa Bakti 2024-2028	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Serda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2024	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
25	SK Gubernur Nomor : 23/KEP/HK/2019	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tentang Tim Independen Uji Kelayakan Dan Kepastian Calon Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Fibobamor Dan Anak Perusahaan Perseroan Terbatas Fibobamor	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Serda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2019	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
26	SK Gubernur Nomor : 34/KEP/HK/2019	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tentang Tim Independen Uji Kelayakan Dan Kepastian Calon Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Fibobamor Dan Anak Perusahaan Perseroan Terbatas Fibobamor	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Serda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2019	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
27	SK Gubernur Nomor: 291A/KEP/HK/2019	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Fibobamor Sebagai Mitra Kerja Sana Pemanfaatan Gedung Eks Hotel Sasando Timor Internasional	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Serda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2019	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat daerah yang menguasai Informasi	Pemangku jawab pembuatan/ penערit Informasi	Klasifikasi Informasi			Waktu dan tempat pembuatan Informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Rentensi Arsip
					Bertaka	Setiap Saat	Serta Merka			
28	SK Gubernur Nomor: 150/KEP/HK/2020	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Gedung Eks Hotel Pigo Serta Fasilitas Pendukung Lainnya Di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2020	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
29	SK Gubernur Nomor : 293/KEP/HK/2020	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Pelaksana Pengembangan Dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Komodo Dan Sekitarnya Dan Labuan Bajo Dan Sekitarnya	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2020	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
30	SK Gubernur Nomor: 227/KEP/HK/2021	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Lokasi Pariwisata Estate di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
31	SK Gubernur Nomor : 249/KEP/HK/2021	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Pemilik Beras jatah bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
32	SK Gubernur Nomor : 425/KEP/HK/2021	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Wakil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Melakikan Kerja Sama Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Secara Berkelanjutan Di Taman Nasional Komodo	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
33	SK Gubernur Nomor: 138/KEP/HK/2022	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 227/KEP/HK/2021 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Lokasi Pariwisata Estate di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2022	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
34	SK Gubernur Nomor : 430/KEP/HK/2022	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Wakil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Melakikan Kerja Sama Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Secara Berkelanjutan di Taman Nasional Komodo	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2022	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
35	SK Gubernur Nomor : 151/KEP/HK/2023	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 249/KEP/HK/2023 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Pemilik Beras Jatah Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2023	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun

No	Jenis Informasi	Ringkasan isi informasi	Perangkat daerah yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan / penعبit informasi	Klasifikasi Informasi			Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Rentensi Arsip
					Berkala	Setiap Saat	Serta Merta			
36	SK Gubernur Nomor : 306A/KEP/HK/2023	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 150/KEP/HK/2020 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Plobaror Sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Gedung Eks Hotel Plago Serta Fasilitas Pendukung Lainnya di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2023	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
37	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2021	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (PERSERODA)	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		✓		Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
38	SK Gubernur Nomor : 256/KEP/HK/2021	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Penyusun Rancangan peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
39	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		✓		Biro Hukum, 1999	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
40	SK Gubernur Nomor 54/KEP/HK/2020	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Dan Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2020	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
41	SK Gubernur Nomor : 256/KEP/HK/2021	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tim Penyusun Rancangan peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2021	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
42	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2022	Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		✓		Biro Hukum, 2022	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat daerah yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan / penebit informasi	Klasifikasi Informasi			Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Rentansi Arsip
					Berkala	Setiap Saat	Serta Merta			
43	SK Gubernur Nomor : 22/KEP/HK/2023	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jwa Naimara Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Subbag BLUD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Hukum, 2023	Softcopy dan hardcopy	10 Tahun
44	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2023	Peraturan Gubernur Tentang Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah	Subbag Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		✓		Biro Hukum, 2023	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
b Seluruh Informasi Lengkap Yang Wajib Disediakan dan Dimumkan Secara Berkala Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 11										
1	Selayang Pandang Biro Perencanaan dan AP	Informasi mengenai gambaran singkat Perencanaan Nusa Tenggara Timur dalam mendukung Pembangunan Bidang Perencanaan di NTT tahun 2023	Bagian Kebijakan Perencanaan dan SDA	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT		✓		Biro Perencanaan dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
2	Laporan Triwulan Kinerja TPID	Informasi mengenai gambaran perkembangan inflasi Kabupaten	Subbag Analisis Ekonomi Mikro dan Makro	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Perencanaan dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
3	Laporan Kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID	Informasi mengenai upaya konkrit pengendalian inflasi menjelang hari raya	Subbag Analisis Ekonomi Mikro dan Makro	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Perencanaan dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
4	Data Penyaluran KUR dan UMI	Informasi mengenai penyaluran KUR UMI berdasarkan sektor, skema dan wilayah	Subbag Analisis Ekonomi Mikro dan Makro	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Perencanaan dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
5	Data Kuota BBM Bersubsidi	Informasi terkait rincian kuota volume BBM bagi Kab/Kota se Provinsi NTT	Subbag Analisis Ekonomi Mikro dan Makro	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Perencanaan dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
6	Data Sentra Pengembangan HHBK	Informasi mengenai produksi HHBK di Provinsi NTT	Subbag SDA	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Perencanaan dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
7	Data Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Informasi mengenai potensi dan pemanfaatan SDA antara lain: hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, batu bara dan logam di Provinsi NTT	Subbag SDA	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Perencanaan dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
8	Data Potensi dan Pemanfaatan EBT	Informasi terkait potensi dan pemanfaatan EBT di Provinsi NTT	Subbag SDA	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Perencanaan dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
9	Data Profil BUMD dan BLUD Provinsi NTT	Informasi terkait BUMD dan BLUD dibawah binaan pemerintah Provinsi NTT	Bagian BUMD & BLUD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Perencanaan dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
10	Data Pengelolaan BUMD dan BLUD Provinsi NTT	Informasi terkait pengelolaan terhadap kinerja BUMD dan BLUD	Bagian BUMD & BLUD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Perencanaan dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
11	Laporan Tahunan Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	Informasi tentang aspek kelengkapan, aspek pemodelan dan keuangan, aspek usaha, bisnis, aspek pelayanan dan jejaring, kemitraan BUMD	Subbag BUUD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Perencanaan dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
12	Laporan Tahunan Koordinasi, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BLUD	Informasi tentang aspek kelengkapan, aspek pemodelan dan keuangan, aspek usaha, bisnis, aspek pelayanan dan jejaring, kemitraan BLUD	Subbag BLUD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Perencanaan dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
13	Data Penerapan Batas Atas Batas Bawah Pengelolaan Air Minum	Informasi terkait tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum	Subbag BUMD	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Perencanaan dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat daerah yang menguasai Informasi	Penguangku jawab pembuatan/ penerbit Informasi	Klasifikasi Informasi			Waktu dan tempat pembuatan Informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Rentensi Arsip
					Berkala	Setiap Saat	Serta Merta			
14	Laporan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Informasi terkait realisasi APBD dari Kab/Kota yang meliputi data pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta realisasi APBD dari Kab/Kota	Subbag Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Perencanaan dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
15	Laporan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Informasi terkait realisasi APBD dan APBN dari setiap OPD Provinsi yang meliputi data pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah	Subbag Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Perencanaan dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
16	Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Informasi terkait data realisasi belanja dan pendapatan yang bersumber dari APBD	Subbag Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Perencanaan dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
c Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan										
1	Data Jumlah pegawai per jabatan per golongan (DUK)	Informasi terkait pegawai pejabat dan pergolangan Biro PAP berdasarkan daftar urutan kepangkatan	Subbag Tata Usaha	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Perencanaan dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
2	Rekapitulasi pembayaran tunjangan prestasi kerja sesuai kinerja pegawai	Informasi terkait pembayaran TPP berdasarkan kinerja pegawai	Subbag Tata Usaha	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Perencanaan dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
3	Profil pejabat dan pegawai Badan Publik	Informasi terkait profil pejabat dan pegawai Badan publik	Subbag Tata Usaha	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Perencanaan dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
d Data perbendaharaan atau inventaris										
1	Laporan Inventaris dan Asset: Biro PAP tahun 2024	Laporan Inventaris dan Asset Biro	Subbag Tata Usaha	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Perencanaan dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
e Rencana strategis dan rencana kerja										
1	Rencana Strategis (Renstra) Biro PAP Tahun 2024	Dokumen perencanaan perangkat daerah	Subbag Tata Usaha	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro Perencanaan dan AP, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku
2	Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Biro PAP Tahun 2023	Informasi terkait capaian kinerja yang diartikan dalam Rencana Strategis Biro	Subbag Tata Usaha	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Prov NTT	✓			Biro PAP, Tahun 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku

Pt. Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan
 Sekretaris Daerah Provinsi NTT,
 Drs. Alexander H. Koroh, MPM.
 NUSNP 19200427 199003 1 005

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROV NTT
TAHUN 2024

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat jika Dibuka	Manfaat
1	Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang bersisian : a. Dokumen keuangan : - SPJ berikut lampirannya, - Dokumen anggaran - Surat pencairan anggaran. b. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2)	Selama masih berlaku	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;
2	Laporan Keuangan dan dokumen pendukung yang belum diaudit oleh BPK dan Belum ditetapkan dalam Qanun Pertanggungjawaban	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf j; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 302 ayat (1) dan (2)	Sampai mendapat persetujuan dan telah diundangkan dalam lembaran daerah	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;
3	Daftar User dan Password Aplikasi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30-37; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 (b); 4. Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan	1. Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi Seseorang; 2. Tindakan Kriminal Pengrusakan dan Pencurian Data	1. Melindungi data pribadi; 2. Melindungi dan mengamankan perangkat data
4	Surat-surat/memo/memorandum/ nota dinas/disposisi yang sifatnya rahasia	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf l.	Sampai dengan proses selesai	Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	1. Menghindari kesalahangunaan terhadap informasi, melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
5	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijanjikan hukuman disiplin	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi; 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
6	Data hasil evaluasi kinerja ASN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi; 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
7	Data rencana penempatan ASN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	1. Proses penyusunan kebijakan tidak terganggu

No	Informasi yang dicekualikan	Dasar Hukum	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat jika Dibuoka	Manfaat
8	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan struktural	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Selama masih berlaku dan dipertukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	1. Proses penyusunan kebijakan/kesuksesan kebijakan tidak terganggu
9	Data Hasil Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
10	SK pengangkatan, pengangkatan, pemindahan pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf l.	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK(pelantikan)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
11	Keputusan Keputusan Penajutuhan Penajutuhan Hukuman Disiplin PNS	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang diketahui hukuman disiplin	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Dapat mengungkap mengungkap rahasia pribadi seorang PNS 3. Dapat menghambat menghambat proses penyusunan kebijakan	1. Membantu kelancaran proses penegakan hukum 2. Melindungi Melindungi rahasia pribadi seorang PNS 3. Mengamankan proses penyusunan kebijakan
12	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat Rahasia
13	Daftar Nilai SKP ASN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf l.	Selama masih berlaku	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
14	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
15	Kertas kerja pemeriksaan, pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
16	Laporan Realisasi Anggaran	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
17	Catatan Atas Laporan Keuangan	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan negara	Dapat melindungi proses pemeriksaan laporan keuangan negara
18	Data Dewan komisaris dan Direksi BUMD	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Selama yang bersangkutan masih menjadi Dewan komisaris dan Direksi BUMD	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	1. Menjaga privasi; 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
19	Laporan Keuangan BUMD	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Selama masih berlaku dan dipertukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1. . Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;

No	Informasi yang dicekualikan	Dasar Hukum	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat jika Dibuca	Manfaat
20	Laporan Hasil RUPS BUMD	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses pengambilan kebijakan pemerintah	Melindungi proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah
21	Laporan Penyerataan Modal BUMD	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses pengambilan kebijakan pemerintah	Melindungi proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah
22	Laporan Kinerja BUMD	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Selama masih berlaku	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1. . Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;
23	Tingkat Kesehatan BUMD	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i.	Selama masih berlaku	Dapat menghambat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan



 Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
 Sekretaris Daerah Provinsi NTT,
Drs. Alexander B. Koroh, MPM.
 Sekretaris Daerah Provinsi NTT
 NUSA TENGGARA
 19700427 199003 1 005



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari Nomor 52
Laman : www.biro-organisasi.nttprov.go.id

Kupang, 25 September 2024

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di -
Kupang

SURAT PENGANTAR
Nomor : 800/208/BO.1.1

No.	Naskah Dinas/Barang yang akan dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	1 (satu) Jepitan	Disampaikan dengan hormat untuk diproses lebih lanjut. Terima kasih

Plt. Kepala Biro Organisasi
Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Djoese S. M. Nai Buti, S.Pt, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197103291999031002

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NTT TAHUN 2024

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Tempat dan Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip	Link	Disabilitas
1	Data Analisis Jabatan (Anjab)	Biro Organisasi	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kupang, 2024	<i>Soft copy</i> dan <i>hard copy</i>	Selama berlaku	ppidutama.nttprov.go.id/document	-
2	Data Evaluasi Jabatan (Ev.Jab)	Biro Organisasi	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kupang, 2024	<i>Soft copy</i> dan <i>hard copy</i>	Selama berlaku	ppidutama.nttprov.go.id/document	-
3	Data Kelembagaan	Biro Organisasi	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kupang, 2024	<i>Soft copy</i> dan <i>hard copy</i>	Selama berlaku	ppidutama.nttprov.go.id/document	-
4	Data LKIP Biro	Biro Organisasi	Kepala Bagian Tatalaksana	Kupang, 2024	<i>Soft copy</i> dan <i>hard copy</i>	1 Tahun	ppidutama.nttprov.go.id/document	-
5	Data LKPJ Biro	Biro Organisasi	Kepala Bagian Tatalaksana	Kupang, 2024	<i>Soft copy</i> dan <i>hard copy</i>	1 Tahun	ppidutama.nttprov.go.id/document	-
6	Data Laporan Keuangan Biro	Biro Organisasi	Kepala Bagian Tatalaksana	Kupang, 2024	<i>Soft copy</i> dan <i>hard copy</i>	1 Tahun	ppidutama.nttprov.go.id/document	-
7	Data Standar Pelayanan Publik	Biro Organisasi	Kepala Bagian Tatalaksana	Kupang, 2024	<i>Soft copy</i> dan <i>hard copy</i>	1 Tahun	ppidutama.nttprov.go.id/document	-
8	Data SKM	Biro Organisasi	Kepala Bagian Tatalaksana	Kupang, 2024	<i>Soft copy</i> dan <i>hard copy</i>	1 Tahun	ppidutama.nttprov.go.id/document	-
9	Data SOP	Biro Organisasi	Kepala Bagian Tatalaksana	Kupang, 2024	<i>Soft copy</i> dan <i>hard copy</i>	Selama berlaku	ppidutama.nttprov.go.id/document	-

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Tempat dan Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip	Link	Disabilitas
10	Data Proses Bisnis	Biro Organisasi	Kepala Bagian Tatalaksana	Kupang, 2024	<i>Soft copy</i> dan <i>hard copy</i>	Selama berlaku	ppidutama.nttprov.go.id/document	-
11	Data Tata Naskah Dinas dan Kendaraan Dinas	Biro Organisasi	Kepala Bagian Tatalaksana	Kupang, 2024	<i>Soft copy</i> dan <i>hard copy</i>	Selama berlaku	ppidutama.nttprov.go.id/document	-
12	Data Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Kupang, 2024	<i>Soft copy</i> dan <i>hard copy</i>	1 Tahun	ppidutama.nttprov.go.id/document	-
13	Data Budaya Kerja	Biro Organisasi	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Kupang, 2024	<i>Soft copy</i> dan <i>hard copy</i>	1 Tahun	ppidutama.nttprov.go.id/document	-
14	Data LKIP, RKT dan PK Lingkup Pemprov dan Perangkat Daerah	Biro Organisasi	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Kupang, 2024	<i>Soft copy</i> dan <i>hard copy</i>	1 Tahun	ppidutama.nttprov.go.id/document	-

Kupang, 13 Mei 2024
Plt. Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi NTT



Marcel
Dioese S.M.Nai Buti, S.Pt., M.Si
Pembina Tk. I
197103291999031002

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NTT

NOMOR : 400.10.4/91.a/BO1.1

Pada hari ini Senin, tanggal 13 bulan Mei tahun 2024 bertempat di Biro Organisasi Setda Provinsi NTT telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada table di bawah ini :

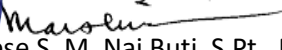
No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	SK hukuman disiplin	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Data pribadi pegawai yang bersifat rahasia jadi terungkap	Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan	Selama menjadi pegawai dan apabila mendapat persetujuan dari yag bersangkutan
2	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Belum terjaminnya kebenaran informasi	Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekpose	Sampai selesai proses audit

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Djoesse S. M. Nai Buti, S.Pt., M.Si	Plt. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Kupang, 13 Mei 2024
Plt. Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi NTT

 
Djoesse S. M. Nai Buti, S.Pt., M.Si
Pembina Tk. I
197103291999031002



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari No. 52, Oebobo Kupang, Telepon/Faksimile:
(0380) 942697 Pos-el:
Laman: nttprov.go.id

Kupang, 24 September 2024

Nomor : 000.8.3.4 / 828.4/PEMKES1.1
Lampiran : 3 (satu) lembar
Hal : Pengiriman Daftar Informasi Publik Biro
Pemerintahan Tahun 2024

Yth. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di –
Kupang

Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka penyusunan Keputusan Gubernur tentang Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2024, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan untuk tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk maklum, atas perhatian disampaikan terima kasih.

Kepala Biro Pemerintahan
Sekretariat Daerah Provinsi NTT



Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701229 199003 1 005

Paraf berjenjang	
Kabag Kerja Sama	
Kasubag Tata Usaha	
Pranata Komputer	

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BIRO PEMERINTAHAN
TAHUN 2024**

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat daerah yang menguasai Informasi	Penanggung jawab pembuatan/ penerbit informasi	Klasifikasi Informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Rentensi Arsip
1	Data Kepala Daerah Kabupaten/ Kota se - Provinsi NTT	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
2	Data Anggota DPRD Kabupaten/ Kota se - Provinsi NTT	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
3	Data kegiatan pelantikan kepala daerah dan penjabat kepala daerah	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
4	Data PAW (Pergantian Antar Waktu) Anggota DPRD Kabupaten/ Kota se - Provinsi NTT	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
5	Persyaratan Beasiswa Pendidikan	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
6	Persyaratan Bantuan Penelitian Mahasiswa	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
7	Data Penerima Beasiswa Pendidikan	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
8	Data Penerima Bantuan Penelitian	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
9	Persyaratan Bantuan Sosial Sarana Prasarana Ibadah	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
10	Persyaratan Bantuan Hibah Lembaga Keagamaan	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
11	Fasilitasi pembinaan lembaga keagamaan	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
12	Fasilitasi hari besar keagamaan	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
13	Persyaratan hibah bansos pemberdayaan ekonomi masyarakat	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
14	Fasilitasi hari besar nasional dan daerah	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kesejahteraan Rakyat	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
15	Informasi pemekaran/ pembentukan kelurahan dan kecamatan	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
16	Informasi penegasan batas daerah	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
17	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten/ Kota	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
18	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi NTT	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
19	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (LKPJ) Kabupaten/ Kota	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
20	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (LKPJ) Provinsi NTT	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun

21	Ringkasan LPPD Kabupaten Kota	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
22	Ringkasan LPPD Provinsi NTT	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
23	Informasi koordinasi penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) lingkup Provinsi NTT	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
24	Data Kerja sama Pemerintah daerah dengan swasta	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kerjasama	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
25	Data Kerja sama antar Pemerintah Daerah	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kerjasama	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
26	Data inventaris kerja sama daerah	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kerjasama	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
27	Data kepegawaian biro	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kerjasama	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
28	Data Profil Badan Biro	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kerjasama	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
29	Data Kinerja Biro	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Kerjasama	TERSEDIA SETIAP SAAT	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun

Kupang, 24 September 2024
Kepala Biro Pemerintahan
Sekretariat Daerah Provinsi NTT,



Drs. Foris Alexander Rihi, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197012291999031005

Paraf berjenjang	
Kepala Bagian Kerja Sama	
Kasubag Tata Usaha Biro	
Pranata Komputer Ahli Pertama	

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN
BIRO PEMERINTAHAN
TAHUN 2024**

No	Ringkasan isi informasi	Perangkat daerah yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan/ penerbit informasi	Klasifikasi Informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Rentensi Arslip
1	SK Penjabat Bupati dan Walikota	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Kementerian Dalam Negeri	DIKECUALIKAN	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
2	SK Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pergantian Antar Waktu (PAW) Kabupaten/ Kota	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Kementerian Dalam Negeri	DIKECUALIKAN	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun



Kupang, 24 September 2024
Kepala Biro Pemerintahan
Sekretariat Daerah Provinsi NTT,

Drs. Doris Alexander Rihi, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197012291999031005

Paraf berjenjang	
Kepala Bagian Kerja Sama	
Kasubag Tata Usaha Biro	
Pranata Komputer Ahli Pertama	

LAMPIRAN DAFTAR PUBLIKASI INFORMASI
BIRO UMUM SETDA PROVINSI NTT TAHUN 2024

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan /Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Retensi Arsip	Link
1	2	3	4	5	6	7	8
INDIKATOR KUALITAS INFORMASI							
INFORMASI WAJIB BERKALA		Informasi					
1	Terkait Fungsi Utama OPD Provinsi						
a							
Informasi tentang Profil OPD Provinsi							
1	Mengumumkan Informasi tentang tugas, fungsi dan kewenangan dari OPD Provinsi berdasarkan ketetapan dan peraturan yang berlaku melalui website Mengumumkan LHKPN Pejabat yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam website (bukan dalam bentuk link KPK) yang terdiri dari :	Biro Umum	Kasubag Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli	2024 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Pimpinan OPD Provinsi yang terdiri dari Kadis/ Kaban/ Kepala dan Sekdis/ Sekban		Kasubag Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli	2024 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
3	Pejabat Eselon III dan pejabat lain yang disamakan di lingkuan OPD Provinsi		Kasubag Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli	2024 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
b	Informasi tentang program dan/ atau kegiatan OPD Provinsi yang bersifat strategis sesuai tugas dan fungsi OPD Provinsi						
1	Mengumumkan program atau kegiatan OPD Tahun 2024 melalui website sesuai dengan tugas dan fungsi yang sekurang - besarnya anggaran memuat nama program/ kegiatan, besaran anggaran		Kabag Administrasi Keuangan dan Aset	2024 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Mengumumkan program atau kegiatan OPD yang sedang dilaksanakan Tahun 2024 melalui website sesuai dengan tugas dan fungsi yang sekurang - kurangnya memuat nama program/ kegiatan, sumber anggaran, besaran anggaran		Kabag Administrasi Keuangan dan Aset	2024 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
3	Mengumumkan program atau kegiatan OPD Tahun 2023 melalui website sesuai dengan tugas dan fungsi yang sekurang - kurangnya memuat nama program/ kegiatan, sumber anggaran, besaran anggaran		Kabag Administrasi Keuangan dan Aset	2023 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/

1	2	3	4	5	6	7	8
c Informasi Keuangan							
Mengumumkan dalam website OPD Provinsi Informasi Laporan Keuangan Tahun 2023 yang telah diaudit yang terdiri dari:							
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Kabag Administrasi	2023 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.ntprov.go.id/	
2	Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	Kabag Administrasi	2023 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.ntprov.go.id/	
3	Daftar Aset Badan Publik	Kabag Administrasi	2023 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.ntprov.go.id/	
4	Neraca	Kabag Administrasi	2023 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.ntprov.go.id/	
5	RKA - KL	Kabag Administrasi	2024 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.ntprov.go.id/	
6	Mengumumkan dalam website OPD Provinsi Informasi Realisasi atau Penyerapan Anggaran Tahun 2024	Kabag Administrasi	2024 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.ntprov.go.id/	
d Pengadaan Barang dan Jasa							
Mengumumkan informasi rencana umum pengadaan program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi OPD Provinsi							
II INFORMASI DIKECUALIKAN							
Informasi Dikecualikan sesuai fungsi utama OPD Provinsi							
1	OPD Provinsi telah mengusulkan daftar informasi dikecualikan dan menunjuk petugas dalam pembantu PPID untuk melaksanakan Uji Konsekuensi	Kabag Tata Usaha Keuangan dan Aset	2024 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.ntprov.go.id/	
2	OPD Provinsi menyediakan dan mengumumkan Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi sesuai standar Perki 1 Tahun 2021	Kabag Tata Usaha Keuangan dan Aset	2024 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.ntprov.go.id/	

III		DAFTAR INFORMASI PUBLIK		Informasi		Terkait DIP Sesuai Fungsi Utama OPD Provinsi	
1	OPD Provinsi Menyediakan dan mengumumkan informasi yang dikuasai Tahun 2024 Dalam Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai Standar Perki 1 Tahun 2021		Kabag Tata Usaha Keuangan dan Aset	2024 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutana.nttprov.go.id/
2	OPD Provinsi menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikuasai 2024 melalui SK sesuai standar Perki I Tahun 2021		Kabag Tata Usaha Keuangan dan Aset	2024 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutana.nttprov.go.id/
INDIKATOR SARANA PRASARANA PELAYANAN REFORMASI							
I	ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK						
Elektronik.							
a PPID yang terintegrasi dengan website utama OPD yang menyediakan informasi :							
1	Informasi Wajib Berkala	Biro Umum	Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutana.nttprov.go.id/
2	Informasi Tersedia Setiap Saat		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutana.nttprov.go.id/
3	Informasi Serta Merta		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutana.nttprov.go.id/
4	Informasi Dikecualikan		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutana.nttprov.go.id/
5	Daftar Informasi Publik		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutana.nttprov.go.id/
6	Permohonan Informasi Online		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutana.nttprov.go.id/
7	Pengajuan keberatan online		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutana.nttprov.go.id/
8	Menyediakan audio visual yang menayangkan layanan informasi publik/ papan informasi elektronik/lainnya		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutana.nttprov.go.id/

1	2	3	4	5	6	7	8
Non Elektronik							
II Meja Layanan Informasi							
1	Ruang Khusus Layanan Informasi/ PPID disertai Meja Layanan		Kabag Tata Usaha	2021 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Formulir Permohonan Informasi		Kabag Tata Usaha	2021 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
3	Formulis Keberatan		Kabag Tata Usaha	2021 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
4	Jadwal pelayanan informasi publik		Kabag Tata Usaha	2021 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
II PELAYANAN INFORMASI							
	Prosedure/ Mekanisme Pelayanan Informasi						
a Menyediakan dan mengumumkan Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik :							
1	Standar Operasional/Tata cara (SOP) memperoleh Informasi Publik disertai informasi waktu dan syarat permohonan		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
b Mengediakan dan mengumumkan Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik							
1	Standar Operasional/ Tata cara (SOP) pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat OPD Provinsi;		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Standar Operasional/ Tata Cara (SOP) pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/

1	2	3	4	5	6	7	8
c Penanganan/Mekanisme Komplain							
1	Menyediakan dan mengumumkan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan	Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/	
2	Menyediakan dan mengumumkan standar penanganan pengajuan keberatan di internal OPD Provinsi	Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/	
3	Mengumumkan tatacara untuk melaksanakan keputusan mediasi dalam sengketa informasi	Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/	
4	Mengumumkan tatacara untuk melaksanakan keputusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap	Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/	
d Layanan Difabel							
1	Aksebilitas bagi penyandang Disabilitas	Biro Umum	Kabag Tata Usaha	2023 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/
e Ketepatan Pelayanan Substansi Permohonan Informasi							
1	Menyediakan buku atau daftar registrasi permohonan informasi publik yang sekurang - kurangnya memuat nama pemohon, alamat pemohon, informasi yang diminta, dan alasan penolakan bilamana permohonan informasi di tolak.	Kabag Tata Usaha	2021 / Kupang	BK	Permanen	http://ppidutama.nttprov.go.id/	
INDIKATOR JENIS INFORMASI							
I INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT Menyediakan Dokumen - Dokumen Informasi Tersedia Setiap Saat							
a	Menyediakan dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan dan telah serah terima pekerjaan Tahun 2024	Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset	2022 / Kupang	TSS	Tahunan	http://ppidutama.nttprov.go.id/	
b	Menyediakan dokumen surat-surat dan dokumen perjanjian dengan pihak ketiga						
1	Menyediakan dokumen surat menyurat pimpinan atau Pejabat OPD Provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya 2022 - 2024	Kabag Tata Usaha	2022 / Kupang	TSS	Tahunan	http://ppidutama.nttprov.go.id/	
2	Menyediakan dokumen Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum 2022 - 2023	Kabag Tata Usaha	2022 / Kupang	TSS	Tahunan	http://ppidutama.nttprov.go.id/	

1	2	3	4	5	6	7	8
II INFORMASI TERBUKA LAINNYA							
dan Mengumumkan Informasi Wajib Berkala		Menyediakan					
1	Data mengenai waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik		Kabag Tata Usaha	2022 / Kupang	TSS	Tahunan	http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Mengumumkan Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evaluasi keadaan darurat di setiap kantor OPD Provinsi		Kabag Tata Usaha	2022 / Kupang	TSS	Tahunan	http://ppidutama.nttprov.go.id/
INDIKATOR KOMITMEN ORGANISASI							
I PROFIL PPID OPD PROVINSI NTT							
1	Menyediakan dan mengumumkan informasi profil PPID yang meliputi Struktur, Visi, Misi dan SK Penetapan		Kabag Tata Usaha	2021 / Kupang	TSS	Tahunan	http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Menyediakan dan mengumumkan tugas dan fungsi PPID		Kabag Tata Usaha	2021 / Kupang	TSS	Tahunan	http://ppidutama.nttprov.go.id/
	Menyediakan dan mengumumkan standar pelayanan informasi publik yang terdiri dari :						
3	SOP Permohonan Informasi		Kabag Tata Usaha	2022 / Kupang	TSS	Tahunan	http://ppidutama.nttprov.go.id/
4	SOP Pengelolaan Keberatan pelayanan informasi		Kabag Tata Usaha	2022 / Kupang	TSS	Tahunan	http://ppidutama.nttprov.go.id/
5	SOP Penetapan dan pemuktahiran daftar Informasi Publik		Kabag Tata Usaha	2022 / Kupang	TSS	Tahunan	http://ppidutama.nttprov.go.id/
6	SOP Pendokumentasian informasi publik		Kabag Tata Usaha	2022 / Kupang	TSS	Tahunan	http://ppidutama.nttprov.go.id/
7	Memiliki Maktumat Pelayanan Informasi Publik		Kabag Tata Usaha	2022 / Kupang	TSS	Tahunan	http://ppidutama.nttprov.go.id/
II TUGAS DAN KEWENANGAN ATASAN PPID OPD PROVINSI NTT Peran Pimpinan							
1	Menetapkan kebijakan pelayanan informasi publik		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Berkala	http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Berkala	http://ppidutama.nttprov.go.id/
3	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Berkala	http://ppidutama.nttprov.go.id/

1	2	3	4	5	6	7	8
III PELAKSANA TUGAS PPID OPD PROVINSI NTT Institusionalisasi PPID							
1	Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Berkala	http://ppidutarna.nttprov.go.id/
2	Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Berkala	http://ppidutarna.nttprov.go.id/
IV KEPATUHAN MENJALANKAN KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI							
1	Maklumat Pelayanan yang berbasis pada PERKI 1 Tahun 2021 pasal 47		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Berkala	http://ppidutarna.nttprov.go.id/
2	Menyampaikan laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023		Kabag Tata Usaha	2024 / Kupang	TSS	Berkala	http://ppidutarna.nttprov.go.id/

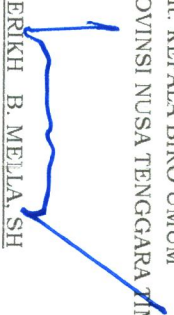
Keterangan:

BK : Berkala

TSS : Tersedia Setiap Saat

SM : Setta Merta

Pt. KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


ERIKH B. MELIA, SH

Pembina

NIP. 19730210 200112 1 006



KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 800/94/BKD1.3

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mewajibkan Badan Publik untuk menetapkan dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikelola oleh Badan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

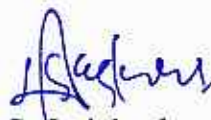
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 800/180/BKD.1.3/2021 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
 Pada Tanggal : 22 Maret 2024
 Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Selaku Atasan PPID Pembantu,



Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197107071997032008

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kasubbag. Kep. dan Umum	
Analisis Layanan Umum	

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

NO	RINGKASAN INFORMASI PUBLIK	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PJ PEMBUATAN	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	LINK	DISABILITAS
					CETAK	DIGITAL			
1	2	3		4	5	6	7		8
A.	BERKALA								
1	Profil Badan Publik	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
A.	Bagan Struktur Organisasi	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
B.	Visi dan Misi	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
C.	Tugas dan Fungsi	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
D.	Alamat Kantor	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang		√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
E.	Profil Pimpinan Perangkat Daerah	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang		√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
2	LAKIP	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Sekretaris	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
3	Laporan Pelayanan Informasi Publik	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Sekretaris	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
4	Laporan Keuangan (sudah diaudit)	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
5	Statistik PNS berdasarkan Jenis Kelamin, Jenjang Pendidikan, Pangkat/Gol. Ruang di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan dan SIMPEG	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
6	Formasi Calon Aparatur Sipil Negara Tahunan	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan dan SIMPEG	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	

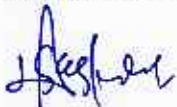
NO	RINGKASAN INFORMASI PUBLIK	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PJ PEMBUATAN	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	LINK	DISABILITAS
					CETAK	DIGITAL			
1	2	3		4	5	6	7		8
7	Formasi Calon Praja IPDN	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan dan SIMPEG	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
8	Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT)	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
B.	SETIAP SAAT								
1	RENSTRA	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Sekretaris	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
2	RENJA	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Sekretaris	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
3	Standar Operasional Prosedur	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
4	Regulasi yang Berhubungan dengan Tupoksi	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
5	Memorandum of Understanding	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
6	Pemberian Tugas Belajar bagi ASN	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan dan SIMPEG	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
7	Pemberian Izin Belajar bagi ASN	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan dan SIMPEG	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
8	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi bagi Tenaga Medis (dokter) yang akan melanjutkan studi	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan dan SIMPEG	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
9	Fasilitasi Pengurusan Pasport Dinas bagi Seluruh PNS di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan dan SIMPEG	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
10	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan dan SIMPEG	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	

NO	RINGKASAN INFORMASI PUBLIK	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PJ PEMBUATAN	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	LINK	DISABILITAS
					CETAK	DIGITAL			
1	2	3		4	5	6	7		8
11	Pemberian Surat Keterangan Tidak Sedang Mengikuti Tugas Belajar bagi PNS yang sedang dalam proses mutasi antar instansi	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan dan SIMPEG	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
12	Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kab/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
13	Pelaksanaan Uji Kompetensi Manajerial bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
14	Proses Penilaian Angka Kredit bagi PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang akan naik jabatan	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
15	Data RIII PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
16	Proses Administrasi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tertentu	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
17	Proses Penilaian Kinerja pada aplikasi SI-KINERJA bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
18	Proses Administrasi Kenaikan Pangkat	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Mutasi dan Pensiun Pegawai	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
19	Proses Administrasi Pensiun	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Mutasi dan Pensiun Pegawai	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
20	Proses Administrasi SK Mutasi	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Mutasi dan Pensiun Pegawai	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
21	Proses Administrasi SK Penempatan ASN	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Mutasi dan Pensiun Pegawai	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
22	Penyampaian Layanan Konsultasi Bantuan Hukum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Disiplin dan KORPRI	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	

NO	RINGKASAN INFORMASI PUBLIK	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PJ PEMBUATAN	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	LINK	DISABILITAS
					CETAK	DIGITAL			
1	2	3		4	5	6	7		8
23	Fasilitasi proses Pengurusan Kartu Isteri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU)	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Bidang Disiplin dan KORPRI	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang	√	√	Selama berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	
C.	SERTA MERTA								
1	Informasi <i>maintenance</i> aplikasi pendukung program kegiatan kepegawaian	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Sekretaris	Tahun 2024, Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kec. Oebobo Kel. Oebobo Kota Kupang		√	Selama Berlaku	https://bkd.nttprov.go.id/web/	

Kupang, 22 Maret 2024

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selaku Atasan PPID Pembantu,


Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197107071997032008

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kepala Subbag. Kep. dan Umum	
Analisis Layanan Umum	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jln. Feto Foenay, Kolhua Kupang Telp. (0380) 826247
Pos El : provnttbpsdmd@gmail.com, Laman : bpsdmd.nttprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR:Kep.500.12.11.1/147/BPSDMD.01.2

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang	:	a.	bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mewajibkan Badan Publik untuk menetapkan dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikelola oleh Badan Publik;
		b.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
		2.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
		3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		4.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51490);
		6.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
		7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
		8.	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
		9.	Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor:KEP.500.12.12/97/BPSDMD 04. tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN:

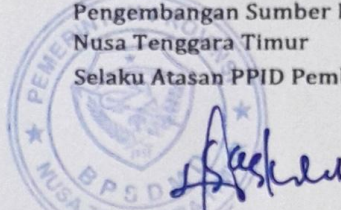
Menetapkan	:	
KESATU	:	Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
KEDUA	:	Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 4 April 2024 Kepala Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Selaku Atasan PPID Pembantu



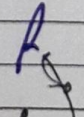
Henderina S. Laiskodat, SP.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197107071997032008

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kasubbag. Kep. dan Umum	
Analisis Layanan Umum	

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

1	2	3	4	5	CETAK	DIGITAL	8	9
A	BERKALA				6	7	8	9
1.	Profil Publik	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/berkala
A.	Bagan Struktur Organisasi	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/berkala
B.	Tugas Fungsi	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/berkala
C.	Alamat Kantor	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/berkala

				Tenggara Timur. 85142.					
D.	Profil Pimpinan Perangkat Daerah	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/berkala	
2.	LKIP	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Sekretaris	Tahun 2024, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/berkala	
3.	Realisasi Keuangan Bulanan	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Sub Bagian Keuangan	Tahun 2024, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/berkala	
4	Statistik PNS Berdasarkan Jenis Kelamin, Jenjang Pendidikan, Pangkat/Gol. Ruang Lingkungan BPSDMD Provinsi NTT.	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/berkala	
5.	Laporan	Kepala	Kepala Sub	Tahun 2024,	√	√	Selama	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/berkala	

	Barang Pengguna Tahunan (LPBT)	BPSDMD Provinsi NTT	Bagian Kepegawaian dan Umum	Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	✓	✓	Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/berkala
6.	Daftar Pejabat Struktural dan Fungsional Lingkup BPSDMD Provinsi NTT	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	✓	✓	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/berkala
7	RKA BPSDMD Provinsi NTT	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Sekretaris	Tahun 2024, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	✓	✓	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/berkala
8.	Memorandum of Understanding	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	✓	✓	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/berkala
9.	Dokumen Perjanjian Kerja Sama	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Sertifikasi dan Kelembagaan	Tahun 2024, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142	✓	✓	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/berkala

B.	SETIAP SAAT	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Sekretaris	Tahun 2024, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	✓	✓	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat
1.	RENSTRA							
2.	RENJA	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Sekretaris	Tahun 2024, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	✓	✓	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat
3.	Standar Operasional Prosedur	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	✓	✓	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat
4.	Regulasi yang Berhubungan dengan Tupoksi	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	✓	✓	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat
5.	Pemberian Sertifikat Pelatihan Bidang Kompetensi	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Bidang Kompetensi Manajerial, Pemerintahan	Tahun 2024, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	✓	✓	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat

	Manajerial, Pemerintahan dan Sosial.	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	dan Sosial	Tenggara Timur. 85142.				
6.	Pemberian Sertifikat Pelatihan Bagi Tenaga Teknis dan Fungsional.	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Bidang Kompetensi Teknis dan Fungsional.	Tahun 2024, Jln. Kenari, Kolhwa Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat
7.	Data Pejabat Struktural dan Fungsional Lingkup BPSDMD Provinsi NTT	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jln. Kenari, Kolhwa Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat
8.	Data DUK	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Tahun 2024, Jln. Kenari, Kolhwa Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat
9.	Kalender Pelatihan PKA, PKP	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Bidang Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial	Tahun 2024, Jln. Kenari, Kolhwa Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat
10.	Proses Pengajuan Kepesertaan	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Bidang Kompetensi	Tahun 2024, Jln. Kenari, Kolhwa Kec.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat

	Latsar, PKA, PKP, dan PPPK	NTT	Manajerial, Pemerintahan dan Sosial	Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.					
11.	Sertifikat Pelatihan Latsar	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Bidang Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial	Tahun 2024, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat	
12.	Sertifikat Pelatihan Bagi Peserta Pelatihan PBJP Level 1 dan Okupasi	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Bidang Sertifikasi dan Kelembagaan	Tahun 2024, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat	
13.	Proses Pengajuan Peserta Sertifikasi PBJP Level 1	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Bidang Sertifikasi dan Kelembagaan	Tahun 2024, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat	
14.	Proses Pengajuan Peserta Sertifikasi Okupasi Tipe B	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Kepala Bidang Sertifikasi dan Kelembagaan	Tahun 2024, Jln. Kenari, Kolhua Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat	
15.	Proses Administrasi	Kepala BPSDMD	Kepala Sub Bagian	Tahun 2024, Jln. Kenari, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/setiap-saat	

Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Analis Bangkom.	Provinsi NTT	Kepegawaian dan Umum	Kolhwa Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.				
C. SERTA MERTA							
1. Evakuasi Kebencanaan (K3)	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Sertifikasi dan Kelembagaan	Tahun 2024, Jln. Kenari, Kolhwa Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85142.	√	√	Selama Berlaku	https://bpsdmd.nttprov.go.id/halaman/detail/serta-merta

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 4 April 2024

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197107071997032008

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kasubbag. Kep. dan Umum	
Analis Layanan Umum	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN
JLN. PALAPA NO. 22 - OEBOBO - KOTA KUPANG - NTT
Website : dinkesdukcapil.nttprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : Dinkes.Sekr.1250/870/V/2024

TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

Memperhatikan

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor :
Dinkes. Sekr.1232/870/V/2024 Tanggal 29 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN;

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran
Pengujian Konsekuensi Nomor : Dinkes.Sekr.
1232/870/V/2024 Tanggal 29 Mei 2024, ini merupakan
Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor :
Dinkes. Sekr.1232/870/V/2024 Tanggal 29 Mei 2024
yang tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala
Dinas Kesehatan Provinsi NTT Nomor :
Dinkes.Sekr.1250/870/VI/2024 Tanggal 30 Mei 2024
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Penetapan ini.

KETIGA Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan akan ditinjau kembali dikemudian hari
jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Kupang
Pada Tanggal : 30 Mei 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI NTT**



Drg. IIEN ADRIANY, M.KES
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19710818 200003 2 007

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	
Analisis Tata Usaha	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KESEHATAN

JLN. PALAPA NO. 22 - OEBOBO - KOTA KUPANG - NTT

Website : dinkesdukcapil.nttprov.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : Dinkes. Sekr. 1232/870/V/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei tahun 2024, bertempat di Dinas Kesehatan Provinsi NTT, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

INFORMASI <i>(berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)</i>	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK <i>(berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)</i>		JANGKA WAKTU <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
		DIBUKA	DITUTUP	
Data Rekam Medik pasien HIV/AIDS	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 57 Ayat 1	Berpengaruh terhadap kehidupan Sosial yang bersangkutan.	Memberi rasa aman dalam berkehidupan sosial bagi yang bersangkutan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada tabel diatas telah dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Ir. Erlina Salmun, M.Kes	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

 **KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI NTT**



Drg. ILEN ADRIANY, M.KES
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19710818 200003 2 007



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jln. Basuki Rahmat No. 01 Lantai 1
KUPANG – NUSA TENGGARA TIMUR

Kupang, 25 September 2024

Yth. Kepala Dinas Kominukasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di -
Kupang

SURAT PENGANTAR

Nomor: 0008.34/ 06 /KUKM

No	Jenis Barang/Surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2024	1(satu) Jepitan	Disampaikan dengan hormat untuk diproses lebih lanjut. Terima kasih
2.	Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK) Tahun 2024.		

PARAF HIERARKI	
Plt. SEKRETARIS DINAS	
KASUBAG. KEPEGAWAIAN DAN UMUM	
STAF PELAKSANA	f

Plt. Kepala Dinas,

Drs. Ady Endezon Mandala, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 197001231990091002

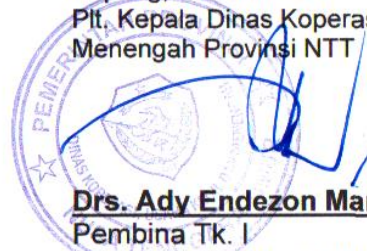
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI NTT
TAHUN 2024

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Berita acara pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN di lingkungan kerja, masyarakat maupun keluarga	Tidak terbatas
2	Laporan keuangan yang belum diaudit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, belum terjaminnya kebenaran informasi	Mencegah penggunaan untuk Kepentingan pihak- pihak tertentu	Setelah diaudit oleh Inspektorat dan BPK RI
3	Data pribadi ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan data pribadi ASN yang dapat merugikan ASN atau Instansi	Tidak terbatas atau dengan Izin ASN bersangkutan
4	Data pribadi peserta pelatihan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan data pribadi	Tidak terbatas
6	Dokumen penawaran kontrak	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j 2. Keppres No. 54 Tahun 2010	Jika dibuka akan muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Persaingan usaha setara dan adil	Tidak terbatas

7	Disposisi Pimpinan yang klasifikasinya bersifat sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
8	Data Rencana CPNS/PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses penyusunan	Dapat membuat kebijakan dengan objektif	Sampai dengan penyerahan SK kepada PNS/CPNS
9	Hasil Keputusan Rapat Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Sampai Keputusan Rapat

Kupang, 01 Juni 2024

Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT



Drs. Ady Endezon Mandala, M.Si

Pembina Tk. I

19700123 199009 1 002

PARAF HIERARKI	
PLT.SEKRETARIS	
KASUBAG KEPUM	
PRAKOM	ym

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI NTT
TAHUN 2024

No	Ringkasan Informasi Publik	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai Informasi	Waktu dan tempat pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Klasifikasi Informasi
				Digital	Cetak		
1.	Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretariat Dinas	Tahun 2024	v	v	Permanen	BK
2.	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretariat Dinas	Tahun 2024	v	v	Permanen	BK
3.	Alamat Kantor	Sekretariat Dinas	Tahun 2024	v	v	Permanen	BK
4.	Klinik Koperasi Digitalisasi	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Tahun 2024	v	v	Permanen	BK
5.	Alamat Akun Media Sosial	Sekretariat Dinas	Tahun 2024	v	v	Permanen	SS
6.	Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2024	Sekretariat Dinas	Tahun 2024	v	v	5 Tahun	SS
7.	Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2024	Sekretariat Dinas	Tahun 2024	v	v	Tahunan	BK
8.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024	Sekretariat Dinas	Tahun 2024	v	v	Tahunan	BK
9.	LKIP 2024	Sekretariat Dinas	Tahun 2024	v	v	Tahunan	BK
10.	Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2024	Sekretariat Dinas	Tahun 2024	v	v	Tahunan	BK
11.	SK PPID Pembantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretariat Dinas	Tahun 2024	v	v	Tahunan	SS

12.	Daftar Barang Milik Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretariat Dinas	Tahun 2024	v	v	Tahunan	SS
13.	SOP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretariat Dinas	Tahun 2024	v	v	Tahunan	SS
14.	Rekapan Jumlah ASN (PNS dan Non-PNS)	Sekretariat Dinas	Tahun 2024	v	v	Tahunan	SS
15.	Dokumen Laporan Kinerja Tahun Berjalan (Bulanan, Triwulan, Semester)-Audited	Sekretariat Dinas	Tahun 2024	v	v	Tahunan	BK
16.	Data Statistik Tahunan	Sekretariat Dinas	Tahun 2024	v	v	Tahunan	BK
17.	Perjanjian Kinerja	Sekretariat Dinas	Tahun 2024	v	v	Tahunan	BK
18.	Data UKM	Bidang Pemberdayaan UKM	Tahun 2023	v	v	Tahunan	BK
19.	Data Koperasi	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Tahun 2024	v	v	Tahunan	BK

Keterangan :

BK : Berkala

SS : Setiap Saat SM : Serta Merta

PARAF HIERARKI	
PLT.SEKRETARIS	
KASUBAG KEPUM	
PRAKOM	ym

Kupang, 01 Juni 2024
 Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT



Drs. Ady Endezon Mandala, M.Si
 Pembina Tk. I
 19700123 199009 1 002

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTT
TAHUN 2024

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	Struktur Organisasi	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbbag Kepegawaian dan Umum	2022-2023-Kupang	Cetak dan Digital	Permanen
2	Tugas Pokok dan Fungsi	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbbag Kepegawaian dan Umum	2022-2023-Kupang	Cetak dan Digital	Permanen
3	Alamat Kantor	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbbag Kepegawaian dan Umum	2022-2023-Kupang	Cetak dan Digital	Permanen
4	Profil Pimpinan PD	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbbag Kepegawaian dan Umum	2022-2023-Kupang	Cetak dan Digital	Permanen
5	Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2022-2023-Kupang	Cetak dan Digital	5 Tahunan
6	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2022-2023-Kupang	Cetak dan Digital	Tahunan
7	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2022-2023-Kupang	Cetak dan Digital	Tahunan
8	Perjanjian Kinerja (PK) 2024	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2022-2023-Kupang	Cetak dan Digital	Tahunan
9	LAKIP 2023	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2022-2023-Kupang	Cetak dan Digital	Tahunan
10	Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2023	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2022-2023-Kupang	Cetak dan Digital	Tahunan
11	Daftar Informasi Publik (DIP)	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2022-2023-Kupang	Cetak dan Digital	Tahunan
12	SK PPID Pembantu	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2022-2023-Kupang	Cetak dan Digital	Permanen
13	Dokumen Rencana Pengadaan Barang / Jasa	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2022-2023-Kupang	Cetak dan Digital	Tahunan
14	Rekapan Daftar PNS dan Non PNS	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Kepegawaian dan Umum	2022-2023-Kupang	Cetak dan Digital	Permanen
15	Regulasi Pelaksanaan Tugas	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	2022-2023-Kupang	Cetak dan Digital	Permanen

16	Dokumen Laporan Tahunan	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	2022-2023-Kupang	Cetak dan Digital	Tahunan
17	Dokumen Laporan Kinerja Semester Tahun Berjalan	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	2022-2023-Kupang	Cetak dan Digital	Bulanan
18	MOU Dinas dengan Pihak Tekait	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	2022-2023-Kupang	Cetak dan Digital	Permanen
19	Laporan Pelayanan Informasi Publik	Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Subbag Program, Data dan Evaluasi	2022-2023-Kupang	Cetak dan Digital	Tahunan

Kupang, 18 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Mahadin Sibarani, ST
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710321 199803 1 006

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS	
KASUBAG PDE	
PELAKSANA	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. W. J. Lamentik ☎ (0380) 833144 Fax(0380) 833144

Pos-el : provnttdisperindag@gmail.com

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klasifikasi
					Cetak	Digital	Online		
1	Profil Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi : a. Alamat kantor b. Sejarah Singkat c. Visi dan Misi d. Tugas dan Fungsi e. Struktur Organisasi	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas Perindag Provinsi NTT 2024		√	√	Selama masih berlaku	Berkala
2	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi hasil pengukuran kinerja yang dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan	Sekretariat – Program, Data dan Evaluasi	Dinas Perindag Provinsi NTT 2019 s/d 2023	√	√	√	10 Tahun	Berkala
3	Rencana Aksi Program dan Kegiatan Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi jadwal pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang dijalankan	Sekretariat – Program, Data dan Evaluasi	Dinas Perindag Provinsi NTT 2024	√	√	√	1 Tahun	Berkala

NO	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klasifikasi
					Cetak	Digital	Online		
4	Laporan Keuangan (Audited) Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi laporan keuangan yang telah diperiksa/audit	Kasubag Keuangan	Dinas Perindag Provinsi NTT 2019 s/d 2023	√	√	√	10 Tahun	Berkala
5	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi ringkasan realisasi anggaran dan belanja Disperindag Prov. NTT	Kasubag Keuangan	Dinas Perindag Provinsi NTT 2019 s/d 2023	√	√	√	10 Tahun	Berkala
6	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diverifikasi oleh KPK	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas Perindag Provinsi NTT 2023	√	√	√	Selama masih berlaku	Berkala
7	Laporan Pelayanan Informasi Publik Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi ringkasan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan	Sekretariat PPID Pelaksana Disperindag Prov. NTT	Dinas Perindag Provinsi NTT 2022 - 2023	√	√	√	1 Tahun	Berkala
8	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi ringkasan hasil pengukuran kepuasan masyarakat pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Disperindag Prov. NTT	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas Perindag Provinsi NTT 2022 - 2023	√	√	√	1 Tahun	Berkala
9	Rekapan Sebaran Program dan Kegiatan Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi ringkasan sebaran program dan kegiatan yang telah dilakukan	Sekretariat – Program, Data dan Evaluasi	Dinas Perindag Provinsi NTT 2021 s/d 2024		√	√	10 Tahun	Berkala

NO	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klasifikasi
					Cetak	Digital	Online		
10	Rencana Strategis (Renstra) Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi : a. Rencana Program dan Kegiatan b. Arah Kebijakan c. Indikator Kinerja d. Ringkasan Pendanaan e. Ringkasan Rencana Kerja	Sekretariat – Program, Data dan Evaluasi	Dinas Perindag Provinsi NTT 2018 – 2023, 2024 - 2026	√	√	√	10 Tahun	Berkala
11	Rencana Kerja (Renja) Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi Kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan periode satu tahun yang dilaksanakan dengan memperhatikan sasaran dan target dalam pencapaian yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis	Sekretariat – Program, Data dan Evaluasi	Dinas Perindag Provinsi NTT 2019 s/d 2024	√	√	√	10 Tahun	Berkala
12	Pohon Kinerja (Cascading) Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.	Sekretariat – Program, Data dan Evaluasi	Dinas Perindag Provinsi NTT 2021 s/d 2024	√	√	√	1 Tahun	Berkala

NO	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klasifikasi
					Cetak	Digital	Online		
13	Laporan Realisasi Anggaran Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi realisasi penyerapan anggaran program kegiatan yang dilaksanakan per triwulan	Sekretariat - Program, Data dan Evaluasi	Dinas Perindag Provinsi NTT 2023 - 2024	√	√	√	1 Tahun	Berkala
14	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja pada program kegiatan yang dilaksanakan	Sekretariat - Program, Data dan Evaluasi	Dinas Perindag Provinsi NTT 2023 - 2024	√	√	√	1 Tahun	Berkala
15	Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi realisasi terhadap capaian perjanjian kinerja	Sekretariat - Program, Data dan Evaluasi	Dinas Perindag Provinsi NTT 2023	√	√	√	1 Tahun	Berkala
16	Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi realisasi terhadap capaian perjanjian kinerja	Sekretariat - Program, Data dan Evaluasi	Dinas Perindag Provinsi NTT 2024	√	√	√	1 Tahun	Berkala
17	Dokumen Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi rekapan perjanjian dengan pihak ketiga mengenai pengadaan barang dan jasa	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Dinas Perindag Provinsi NTT 2022 - 2024	√	√	√	Selama masih berlaku	Berkala
18	Perjanjian Kinerja Pegawai Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi perjanjian kinerja pegawai berdasarkan rencana hasil kerja tahunan	Sekretariat - Program, Data dan Evaluasi	Dinas Perindag Provinsi NTT 2022 - 2024	√	√		1 Tahun	Berkala

NO	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klasifikasi
					Cetak	Digital	Online		
19	Data Harga Barang Kebutuhan Pokok di Pasar Tradisional	Informasi berisi laporan dan analisis Harga Barang Kebutuhan Pokok per hari dan per bulan	Kabid Pengembangan Perdagangan	Dinas Perindag Provinsi NTT 2019 s/d 2024	√	√		1 Tahun	Berkala
20	Data Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Informasi berisi laporan dan analisis Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting per bulan	Kabid Pengembangan Perdagangan	Dinas Perindag Provinsi NTT 2019 s/d 2023	√	√		Selama masih berlaku	Berkala
21	Data Ekspor (sesuai penerbitan SKA)	Informasi berisi rekapan jumlah eksportir, komoditas yang diekspor, jumlah SKA yang diterbitkan, volume ekspor dan nilai ekspor	Kabid Pengembangan Perdagangan	Dinas Perindag Provinsi NTT 2019 s/d 2024	√	√		1 Tahun	Berkala
22	Laporan Data Rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI)	Informasi berisi data jumlah rekomendasi IUI yang telah diterbitkan	Kabid Pembangunan Sumber Daya Industri	Dinas Perindag Provinsi NTT 2019 s/d 2024	√	√		1 Tahun	Berkala
23	Data Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Provinsi NTT	Informasi berisi data jumlah pelaku IKM yang ada di Provinsi NTT	Kabid Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Dinas Perindag Provinsi NTT 2020 s/d 2024	√	√	√	Selama masih berlaku	Berkala
24	Daftar Kalibrasi Peralatan pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Informasi berisi rekapan jumlah peralatan yang telah dilakukan kalibrasi pada UPTD PSMB	Kasi Pengembangan Jasa Pengujian dan Kalibrasi UPTD PSMB	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang 2020 s/d 2024	√	√		Selama masih berlaku	Berkala

NO	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klasifikasi
					Cetak	Digital	Online		
25	Data Pengambilan Sampel pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Informasi berisi rekapan jumlah dan hasil pengambilan sampel yang telah dilakukan oleh UPTD PSMB	Kasi Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi UPTD PSMB	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang 2020 s/d 2022	√	√		Selama masih berlaku	Berkala
26	Prosedur Evakuasi Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi prosedur dan jalur evakuasi apabila terjadi keadaan darurat	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas Perindag Provinsi NTT 2023	√	√	√	Selama masih berlaku	Serta Merta
27	Tata Cara Permohonan Informasi Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi mekanisme cara memperoleh informasi publik	Sekretariat PPID Pelaksana Disperindag Prov. NTT	Dinas Perindag Provinsi NTT 2023 - 2024		√	√	Selama masih berlaku	Setiap Saat
28	Tata Cara Pengajuan Keberatan Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi mekanisme cara mengajukan keberatan atas informasi publik	Sekretariat PPID Pelaksana Disperindag Prov. NTT	Dinas Perindag Provinsi NTT 2023 - 2024		√	√	Selama masih berlaku	Setiap Saat
29	Jadwal Pelayanan Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi jadwal pelayanan informasi pada Disperindag Prov. NTT	Sekretariat PPID Pelaksana Disperindag Prov. NTT	Dinas Perindag Provinsi NTT 2023 - 2024		√	√	Selama masih berlaku	Setiap Saat
30	Standar Pelayanan Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi pedoman dan mekanisme penyelenggaraan pelayanan yang ada pada Disperindag Prov. NTT	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas Perindag Provinsi NTT 2019	√	√	√	Selama masih berlaku	Setiap Saat

NO	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klasifikasi
					Cetak	Digital	Online		
31	Peta Proses Bisnis Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang untuk menghasilkan kinerja	Sekretaris	Dinas Perindag Provinsi NTT 2021	√	√	√	Selama masih berlaku	Setiap Saat
32	Standar Operasional Prosedur (SOP) Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi secara teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja	Sekretaris	Dinas Perindag Provinsi NTT 2021	√	√	√	Selama masih berlaku	Setiap Saat
33	Maklumat Pelayanan Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi Maklumat Pelayanan Disperindag Prov. NTT	Sekretaris	Dinas Perindag Provinsi NTT 2020	√	√	√	Selama masih berlaku	Setiap Saat
34	Data Statistik Pegawai Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi daftar jumlah pegawai	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas Perindag Provinsi NTT 2019 s/d 2024	√	√	√	Selama masih berlaku	Setiap Saat
35	Daftar Inventaris Barang Milik Negara Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi daftar perbendaharaan atau inventaris Barang Milik Negara	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas Perindag Provinsi NTT 2019 s/d 2024	√	√	√	Selama masih berlaku	Setiap Saat

NO	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klasifikasi
					Cetak	Digital	Online		
36	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019	Informasi berisi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pemurnian dan tata kelola minuman tradisional beralkohol khas NTT	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Dinas Perindag Provinsi NTT 2019	√	√	√	Selama masih berlaku	Setiap Saat
37	Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BU.556/31/Perindag/2021	Informasi berisi Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Optimalisasi pemanfaatan dan pemasaran produk lokal yang berasal dari Industri Kecil dan Menengah di Provinsi NTT	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Dinas Perindag Provinsi NTT 2021	√	√	√	Selama masih berlaku	Setiap Saat
38	Laporan Hasil Kegiatan Disperindag Prov. NTT	Informasi berisi laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan Disperindag Prov. NTT	Semua Penanggungjawab Kegiatan	Dinas Perindag Provinsi NTT 2019 s/d 2024	√	√		1 Tahun	Setiap Saat
39	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2023	Informasi berisi Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTT Tahun 2023-2043	Kabid Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Dinas Perindag Provinsi NTT 2023	√	√		Selama masih berlaku	Setiap Saat
40	Instruksi dan Metode Kerja UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Informasi berisi Instruksi dan metode Kerja dalam melakukan pengujian dan sertifikasi mutu barang	Kepala UPTD PSMB Dinas Perindag Provinsi NTT	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang 2021	√			Selama masih berlaku	Setiap Saat

NO	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klasifikasi
					Cetak	Digital	Online		
41	Prosedur Mutu UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Informasi berisi prosedur dalam melakukan pengujian dan sertifikasi mutu barang	Kepala UPTD PSMB Dinas Perindag Provinsi NTT	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang 2021	√			Selama masih berlaku	Setiap Saat

Kupang, 17 September 2024

Plt. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Dr. Gabriel Palanoni, M.Si
Pembina (K. d. IV/b)
NIP. 196803241989031006

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	<i>nk</i>
Pranata Komputer Ahli Pertama	<i>[Signature]</i>



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. W. J. Lamentik ☎ (0380) 833144 Fax(0380) 833144

Pos-el : provnttdisperindag@gmail.com

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen/berkas/arsip kepegawaian	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	Tidak terbatas
2	Data Hukum disiplin Pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Menjaga privasi dan melindungi penyalagunaan data yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang
3	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 huruf j UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Belum terjaminnya kebenaran informasi	Mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Sampai dengan selesainya proses audit

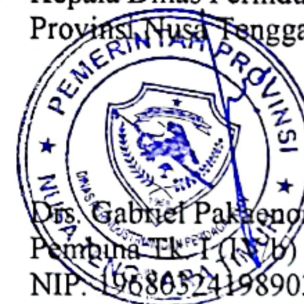
No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
4	Kode akses (<i>username</i> dan <i>password</i>) aplikasi yang digunakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	• Pasal 17 huruf j UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5	Informasi hasil rapat pemerintahan (laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkrip suara, keputusan rapat tertutup)	• Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
6	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/ perseorangan	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan HKI dan persaingan usaha menjadi tidak sehat	Menjaga iklim usaha yang kondusif	Tidak terbatas
7	Daftar pembeli yang sudah dimiliki oleh pengusaha (eksportir tertentu)	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Persaingan usaha menjadi tidak sehat dan dapat mengungkapkan data pribadi	Memberi perlindungan HKI dan menjaga iklim usaha yang kondusif serta dapat melindungi data pribadi	Tidak terbatas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
8	Surat pengajuan hak merek, cipta, paten, desain yang sedang diproses oleh Kemenkumham	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan HKI dan persaingan usaha menjadi tidak sehat	Memberi perlindungan HKI dan menjaga iklim usaha yang kondusif	Sampai dengan terbitnya hak merek, cipta, paten, desain
9	Dokumen perdagangan luar negeri (SKA)	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan HKI, Persaingan usaha menjadi tidak sehat dan dapat mengungkapkan data pribadi	Memberi perlindungan HKI dan menjaga iklim usaha yang kondusif serta dapat melindungi data pribadi	Tidak terbatas
10	Rekomendasi teknis litbang yang apabila diberikan dapat mengganggu persaingan usaha	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan HKI, Persaingan usaha menjadi tidak sehat dan dapat mengungkapkan data pribadi	Memberi perlindungan HKI dan menjaga iklim usaha yang kondusif serta dapat melindungi data pribadi	Tidak terbatas
11	Dokumen legalitas pelaku usaha/perusahaan industri	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan HKI dan persaingan usaha menjadi tidak sehat	Menjaga iklim usaha yang kondusif	Tidak terbatas
12	Laporan/Data hasil pelayanan Kalibrasi	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan HKI dan persaingan usaha menjadi tidak sehat	Menjaga iklim usaha yang kondusif dan melindungi data pribadi	Apabila mendapat persetujuan pihak yang bersangkutan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
13	Dokumen terkait penganggaran dan kebijakan mengenai perubahan dan realokasi anggaran	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan penyusunan kebijakan dan disalahgunakan pihak lain	Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan	Selama masih dalam pelaksanaan
14	Informasi data pemohon/pelapor yang berkaitan dengan indikasi ketidakpuasan konsumen	Pasal 17 huruf a dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak ada perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan dapat mengungkapkan data pribadi	Melindungi hak-hak konsumen dan melindungi data pribadi	Tidak terbatas

Kupang, 17 September 2024

Plt. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Drs. Gabriel Pakanoni, M.Si
Pembina TK I (15/6)
NIP. 96865241989031006

PARAF HIERARKI

Sekretaris	<i>Nk</i>
Pranata Komputer Ahli Pertama	<i>P</i>



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E Lt. 3, Website: dispورا.nttprov.go.id
Kupang 85142

28 September 2024

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi NTT
di
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 400.6.3.4/01/PO1/IX/2024

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	1 (satu) Berkas	Dikirim Dengan Hormat untuk Dipergunakan Semestinya

a.n. Plt. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sekretaris,

Diterima Tanggal :
Penerima,

(.....)
Nomor HP :



Karel Muskanan, S.Sos., M.Si
Penata Tk. I
NIP. 198002142006041017

Paraf Hierarki	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Ahli Pertama – Pranata Komputer	

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No.	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Klasifikasi Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	SOP Surat Masuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Serta Merta		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
2	Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) Pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Serta Merta		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
3	Maklumat Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Serta Merta		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
4	Laporan LPPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian PDE	Berkala		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
5	Laporan LKPI Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian PDE	Berkala		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
6	Ringkasan DPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian PDE	Berkala		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
7	Laporan Tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian PDE	Berkala		Hardcopy & Softcopy	2 Tahun
8	Laporan LKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian PDE	Berkala		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
9	Laporan Keuangan yang telah di audit Dinas	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian Keuangan	Berkala		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
						Hardcopy & Softcopy	5 Tahun

	Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Berkala		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
10	Laporan Pra-Popnas dan PON	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Berkala		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
11	Laporan Pra-Popnas dan Popnas	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Berkala		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
12	Daftar Wirausaha Muda Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Bidang Pengembangan Pemuda	Setiap Saat		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
13	Daftar Kwardcab Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Bidang Pemberdayaan Pemuda	Setiap Saat		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
14	Daftar Atlet dan Pelatih PPLP, PPLPD dan PPLD	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Bidang Kebudayaan Olahraga	Setiap Saat		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
15	SK PPID Pembantu Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian PDE	Setiap Saat		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
16	SK SIPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian PDE	Setiap Saat		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
17	Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Setiap Saat		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
18	Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian PDE	Berkala		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
19	Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian PDE	Berkala		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun

20	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Setiap Saat		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
21	Daftar Inventaris Barang Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Setiap Saat		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
22	Daftar Sarana Prasarana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Setiap Saat		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
23	Laporan SIPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian PDE	Berkala		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
24	SK Pengelola Asrama PPLP, PPLD, PPLPD	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Setiap Saat		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
25	Laporan Pengelola Asrama PPLP, PPLD, PPLPD	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian PDE	Setiap Saat		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
26	Laporan PAD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian PDE	Setiap Saat		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun
27	Laporan Realisasi Program/Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Sub Bagian PDE	Berkala		Hardcopy & Softcopy	5 Tahun

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Pribadi ASN yang Bersifat Rahasia	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia dan rawan disalahgunakan	Melindungi data pribadi ASN	-
2.	Data Hukuman Disiplin ASN	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat privasi	Melindungi privasi ASN	Apabila mendapat persetujuan dibuka dari pihak berwenang
3.	Laporan Keuangan Dinas yang Belum Diaudit	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Belum Validnya Informasi	Mencegah penyebaran informasi yang salah (hoax) yang berujung pada penyalahgunaan data	Sampai adanya laporan keuangan dengan status Audited

a.n. Plt. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Sekretaris
Penata Tk. I
NIP. 198002142006041017

Paraf Hierarki	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	1
Ahli Pertama – Pranata Komputer	9

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7
1.	Profil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2023	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku
2.	Profil Pimpinan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2021	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku
3.	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2022	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku
4.	Informasi Media Sosial Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT (FB, Twitter, Instagram dan Youtube)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2022	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku
5.	Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Kepala Dinas	2023	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku
6.	Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 (LKIP, LKPJ dan LPPD)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Kepala Dinas	2024	Hard Copy dan Soft Copy	1 Tahun
7.	Kaleidoskop Dinas LHK Provinsi NTT Tahun 2023	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sekretariat	2024	Hard Copy dan Soft Copy	1 Tahun
8.	Laporan Layanan Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	PPID Pembantu Dinas LHK Provinsi NTT	2024	Hard Copy dan Soft Copy	1 Tahun

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7
9.	Produk Hukum Layanan Informasi Publik (SK. PPID Pembantu Dinas LHK Provinsi NTT)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2023	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku
10.	SOP Pelayanan Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	PPID Pembantu Dinas LHK Provinsi NTT	2024	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku
11.	Dokumen Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (RUP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas LHK dan UPTD Lingkup Dinas LHK Provinsi NTT	2024	Hard Copy dan Soft Copy	1 Tahun
12.	Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Bidang Pengendalian dan Perlindungan	2023	Hard Copy dan Soft Copy	1 Tahun
13.	Data Perkembangan Penyelesaian Kasus Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Bidang Pengendalian dan Perlindungan	2023	Hard Copy dan Soft Copy	1 Tahun
14.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi NTT Tahun 2023 – 2043	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Bidang Penataan dan Pemanfaatan	2023	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku
15.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTT Tahun 2025 – 2045	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Bidang Penataan dan Pemanfaatan	2023	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku
16.	Rekapitulasi Data Rekomendasi Persetujuan Lingkungan yang menjadi kewenangan Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Bidang Penataan dan Pemanfaatan	2023	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku
17.	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Bidang Penataan dan Pemanfaatan	2023	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7
18.	Dokumen Rencana Kerja Indonesia's Folu Net Sink 2030 Provinsi Nusa Tenggara Timur	UPTD Kementerian LHK dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	UPTD Kementerian LHK dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	2023	Soft Copy	Selama Berlaku
19.	Data Sebaran Ijin Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial	2023	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku
20.	Data Penerima Kalpataru Tingkat Nasional dari Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial	Rentang waktu 1980-2024 (informasi dari KLHK)	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku
21.	Database Kelompok Tani Hutan (KTH) pada UPTD KPH Wilayah Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal lingkup Provinsi NTT yang telah diregistrasi dalam Aplikasi SIMLUH	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial	2024	Hard Copy dan Soft Copy	Jumlah Database KTH akan berubah sesuai dengan pengajuan permohonan registrasi

Kupang, September 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, R





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Naikolan Telp./Fax. (0380) 821827
Website : www.dpnmptspprovntt.id, Email: pnmptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

Kupang, 27 September 2024

Yth. Ketua Komisi Informasi Publik
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di –

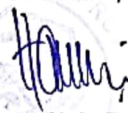
Kupang

SURAT PENGANTAR

Nomor: 570/ 522/DPMPTSP 1.1/9/2024

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Dengan ini disampaikan SAQ Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 Badan Publik Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi NTT.	1 (satu) Exemplar	Dikirim dengan hormat kepada Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih.

a.n. Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pj. Sekretaris,


Herry. H.A. Pandie, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19710830 200112 1 004

Tembusan:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi NTT di Kupang (sebagai laporan);
3. Arsip.

PARAF HIERARKI	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Perencana Ahli Muda	



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Gedung Diskominfo Prov. Nusa Tenggara Timur Jln. Palapa, Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kode Pos 85111 Telp: 081339778884/081337466666. Email: kipntt@gmail.com

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**

Nama Badan Publik : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Badan Publik : Jln. Basuki Rahmat Nomor 1 - Lantai 1 Gedung B Kelurahan Naikolan Kota Kupang
Nama Responden : Herry Anselmus Pandie, SE
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT
Website BP : <https://dpmptsp.nttprov.go.id>
Email BP : pmptsp.nttprov@gmail.com
No. Telp/HP : (0380) 821827/HP. 0812 3636 4466

1. Lengkapi pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang sesuai.
2. Berikan tanda (✓) pada salah satu kolom jawaban
3. Berikan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/softfile data dukung.
4. "Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INDIKATOR KUALITAS INFORMASI

(Mutu informasi berdasarkan relevansi, akurasi dan kekinian/up to date yang tersedia di website OPD Provinsi)

NO	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
I	INFORMASI WAJIB BERKALA Informasi Terkait Fungsi Utama OPD Provinsi			
a	Informasi tentang profil OPD Provinsi			
1	Mengumumkan informasi tentang tugas, fungsi dan kewenangan dari OPD Provinsi berdasarkan ketetapan dan peraturan yang berlaku melalui website	√		https://dpmpstsp.nttprov.go.id/category/blog/tugas-dan-fungsi
	Mengumumkan LHKPN Pejabat yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam website (bukan dalam bentuk link KPK) yang terdiri dari:			
2	- Pimpinan OPD Provinsi yang terdiri dari Kadis/Kaban/Kepala dan Sekdis/Sekban	√		https://drive.google.com/file/d/1dy0IcGvHY2T0C7UthYkTyu0WWlJPxi8L/view?usp=drive_link
3	- Pejabat Eselon III dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan OPD Provinsi saudara	√		https://drive.google.com/file/d/1yAMtLy-xH0Qt6ZtGCTNZq67RchpyYUe6/view?usp=drive_link
4	Mengumumkan informasi jumlah dan prosentase yang wajib LHKPN pada OPD Provinsi saudara yang diumumkan dalam website OPD Provinsi (bukan website KPK)	√		https://drive.google.com/drive/folders/17yB2ET2ubQk1xh2dEIs_XgzMfBMulFUK?usp=drive_link
b	Informasi tentang program dan/atau kegiatan OPD Provinsi yang bersifat strategis sesuai tugas dan fungsi OPD Provinsi			
1	Mengumumkan program atau kegiatan OPD Tahun 2024 melalui website sesuai dengan tugas dan fungsi yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, sumber anggaran, besaran anggaran.	√		https://dpmpstsp.nttprov.go.id/2169-2/
2	Mengumumkan program atau kegiatan OPD yang sedang dilaksanakan Tahun 2024 melalui website yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300318470

3	Mengumumkan program atau kegiatan OPD yang telah dilaksanakan Tahun 2023 melalui website yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300299443
4	Mengumumkan informasi tentang peraturan, dan/atau keputusan yang mengikat dan atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan OPD Provinsi?	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/500245192
c Informasi Keuangan				
Mengumumkan dalam website OPD Provinsi informasi Laporan Keuangan Tahun 2023 yang telah diaudit yang terdiri dari :				
1	- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	√		https://drive.google.com/file/d/1BfTmlKX6b5eoRtSJdt-VA7TCeIHDbUVB/view?usp=drive_link
2	- Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	√		https://drive.google.com/file/d/1QwEaVJjaxQ4QC_PHqKuNv8e1vvk4dJ1s/view?usp=drive_link
3	- Daftar Aset Badan Publik	√		https://drive.google.com/file/d/1H8LMbt6P-Ja1qmp4Zc4Soj2KK2QS4p4W/view?usp=drive_link
4	- Neraca	√		https://drive.google.com/file/d/1o6aMkBz518NdfhVXXjBTPLYDmGn0d3yQ/view?usp=drive_link
Mengumumkan dalam website OPD Provinsi terkait informasi keuangan Tahun 2024 dalam bentuk :				
5	- DIPA	√		https://dpmpstsp.nttprov.go.id/wp-content/uploads/2024/09/Petikan-DIPA.pdf
6	- RKA-KL	√		https://dpmpstsp.nttprov.go.id/wp-content/uploads/2024/09/RINCIAN-KERTAS-KERJA-SATKER-249002.pdf
7	Mengumumkan dalam website OPD Provinsi informasi realisasi atau penyerapan anggaran Tahun 2024	√		https://dpmpstsp.nttprov.go.id/wp-content/uploads/2024/09/RINCIAN-KERTAS-KERJA-SATKER-249002.pdf

				content/uploads/2024/09/Realisasi-Belanja-Satker-Per-Jenis-Belanja-4.pdf
d	Pengadaan Barang dan Jasa			
1	Mengumumkan informasi rencana umum pengadaan program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi OPD Provinsi		√	
	Sebutkan pengumuman paket-paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2024 berkaitan program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi OPD Provinsi yang telah selesai serah terima			
2	Paket 1		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
3	Paket 2			
4	Paket 3			
5	Paket 4			
	Sebutkan pengumuman paket-paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2024 berkaitan program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi OPD Provinsi sebagaimana tercantum dalam LPSE yang masih berjalan dan belum serah terima			
5	Paket 1		√	
6	Paket 2			
7	Paket 3			
8	Paket 4			
II	INFORMASI DIKECUALIKAN Informaasi Dikecualikan sesuai fungsi utama OPD Provinsi			
1	OPD Provinsi telah mengusulkan daftar informasi dikecualikan dan menunjuk petugas dalam membantu PPID untuk melaksanakan Uji Konsekuensi	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300353945
2	OPD Provinsi menyediakan dan mengumumkan Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi sesuai standar Perki 1 Tahun 2021	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300353945

III	DAFTAR INFORMASI PUBLIK <i>Informasi Terkait DIP Sesuai Fungsi Utama OPD Provinsi</i>			
1	OPD Provinsi menyediakan dan mengumumkan informasi yang dikuasai Tahun 2024 dalam Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai standar Perki 1 Tahun 2021	√		http://www.ppidutama.nttprov.go.id
2	OPD Provinsi menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikuasai 2024 melalui SK sesuai standar Perki 1 Tahun 2021	√		http://www.ppidutama.nttprov.go.id
3	OPD Provinsi menyediakan Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa	√		http://www.ppidutama.nttprov.go.id

KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INDIKATOR SARANA PRASARANA PELAYANAN INFORMASI
(Penyediaan fasilitas dalam rangka mendukung pelayanan informasi publik)

Petunjuk : Isilah pernyataan (pertanyaan) pada kolom jawaban dengan tanda (X) dan lampirkan (up load) bukti/petunjuk pelaksanaannya!

No	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
I	ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK			
a	Elektronik.			
	Menu PPID yang terintegrasi dengan website utama OPD yang menyediakan informasi:			
1	Informasi Wajib Berkala	√		http://www.ppidutama.nttprov.go.id
2	Informasi Tersedia Setiap Saat	√		http://www.ppidutama.nttprov.go.id
3	Informasi Serta Merta	√		http://www.ppidutama.nttprov.go.id
4	Informasi Dikecualikan	√		http://www.ppidutama.nttprov.go.id
5	Daftar Informasi Publik	√		
6	Permohonan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan)	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/permohonan/done
7	Pengajuan keberatan online (bukan mengunduh formulir pengajuan keberatan)	√		http://www.ppidutama.nttprov.go.id
8	Menyediakan audio visual yang menayangkan layanan informasi publik/papan informasi elektronik/lainnya			

b	Non Elektronik			
	Meja Layanan Informasi			
1	Ruang Khusus Layanan Informasi/PPID disertai Meja Layanan	√		https://drive.google.com/drive/folders/1E1ZBLVBCZSn_6wLNQ0MWjlxDVNxdAmD?usp=sharing
2	Formulir Permohonan Informasi	√		http://www.ppidutama.nttprov.go.id
3	Formulir Keberatan	√		http://www.ppidutama.nttprov.go.id
4	Jadwal pelayanan informasi publik	√		http://www.ppidutama.nttprov.go.id
5	Layanan Pendukung Lainnya	√		
II PELAYANAN INFORMASI				
Prosedure / Mekanisme Pelayanan Informasi				
a	Menyediakan dan mengumumkan Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;			
1	Standar Operasional /Tata cara (SOP) memperoleh Informasi Publik disertai informasi waktu dan syarat permohonan;	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300299440
2	Standar Operasional Prosedur/Tata cara (SOP) pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi	√		https://drive.google.com/drive/folders/146twA67uEID01ODm6h-eSkizobXshv1R?usp=share_link
b	Menyediakan dan mengumumkan Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik;			
1	Standar Operasional /Tata cara (SOP) pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat OPD Provinsi;	√		https://dpmptsp.nttprov.go.id/wp-
2	Standar Operasional /Tata cara (SOP) pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan.	√		https://dpmptsp.nttprov.go.id/wp-content/uploads/2024/05/9.-SOP-PENGELOLAAN-PENGADUAN-MASYARAKAT.pdf
c	Penanganan / Mekanisme Komplain			
1	Menyediakan dan mengumumkan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan	√		http://www.ppidutama.nttprov.go.id
2	Menyediakan dan mengumumkan standar penanganan pengajuan keberatan di internal OPD Provinsi.	√		https://dpmptsp.nttprov.go.id/wp-
3	Mengumumkan tatacara untuk melaksanakan keputusan mediasi dalam sengketa informasi	√		http://www.ppidutama.nttprov

4	Mengumumkan tatacara untuk melaksanakan keputusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap	√		.go.id http://www.ppidutama.nttprov.go.id
d	Layanan Difabel			
1	Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas	√		https://dpmpstsp.nttprov.go.id/wp-
	Pemahaman Substansi			
e	Ketepatan Pelayanan Substansi Permohonan Informasi			
1	Menyediakan buku atau daftar register permohonan informasi publik yang sekurang-kurangnya memuat nama pemohon, alamat pemohon, informasi yang diminta, dan alasan penolakan bilamana permohonan informasi ditolak	√		https://drive.google.com/file/d/1GQN0QxIJWxwR2Rk2E5JvsV3OTJoR7RGk/view?usp=drive link
2	Menyediakan dokumen jawaban PPID atas penolakan permohonan informasi	√		http://www.ppidutama.nttprov.go.id
3	Menyediakan dokumen jawaban PPID terhadap permohonan informasi yang diterima	√		http://www.ppidutama.nttprov.go.id
4	Menyediakan dokumen pemberitahuan kepada pemohon informasi disertai alasan dalam hal PPID membutuhkan waktu perpanjangan pemberian informasi	√		http://www.ppidutama.nttprov.go.id

KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INDIKATOR JENIS INFORMASI

(Informasi Terbuka Berdasarkan Pasal 13 Perki 1 Tahun 2021)

NO	PERTANYAAN	KETERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
I	INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT <i>Menyediakam dokumen Dokumen Informasi Tersedia Setiap Saat</i>			
a	Menyediakan dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan dan telah serah terima pekerjaan Tahun 2024 meliputi:		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK);		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
2	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan

				pihak ketiga
3	Spesifikasi Teknis;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
4	Rancangan Kontrak;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
5	Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
6	Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
7	Daftar Kuantitas dan Harga;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
8	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
9	Gambar Rancangan Pekerjaan;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
10	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
11	Dokumen Penawaran Administratif;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
12	Surat Penawaran Penyedia;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
13	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
14	Berita Acara Pemberian Penjelasan;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga

15	Berita Acara Pengumuman Negosiasi;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
16	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
17	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
18	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
19	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
20	Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
21	Surat Perintah Mulai Kerja;		√,	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
22	Surat Jaminan Pelaksanaan;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
23	Surat Jaminan Uang Muka;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
24	Surat Jaminan Pemeliharaan;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
25	Surat Tagihan;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
26	Surat Pesanan E-purchasing;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
27	Surat Perintah Membayar;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga

28	Surat Perintah Pencairan Dana;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
29	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
30	Laporan Penyelesaian Pekerjaan;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
31	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
32	Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
33	Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
Catatan : PPID hanya mencantumkan informasi/dokumen yang relevan sesuai dengan jenis pengadaan barang dan jasa. Misalnya, sebuah pengadaan barang dan jasa tidak dilaksanakan secara e-purchasing maka PPID menjawab TIDAK DIPERSYARATKAN pada "Kolom Bukti Pelaksanaan"				
b	<i>Menyediakan dokumen Surat-surat dan dokumen perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;</i>			
1	Surat Perjanjian Kemitraan Tahun 2022 - 2024		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
2	Surat Perjanjian Swakelola Tahun 2022 - 2024		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
3	Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola Tahun 2022-2024		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
4	Daftar Dokumen Kontrak Tahun 2022 - 2024		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
5	Menyediakan dokumen Surat menyurat pimpinan atau pejabat OPD Provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya 2022-2024;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga

6	Menyediakan dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2022-2024;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
7	Menyediakan dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 2022-2024;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
8	Menyediakan dokumen Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum 2022-2023;		√	Tidak ada pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak ketiga
II	INFORMASI TERBUKA LAINNYA <i>Menyediakan dan Mengumumkan Informasi Wajib Berkala</i>			
	Mengumumkan Ringkasan laporan akses Informasi Publik dan menyediakan dokumen Tahun 2023;			
1	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/permohonan/done
2	Data mengenai Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	√		https://dpmpstsp.nttprov.go.id/wp-
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak;	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/permohonan/done
4	Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.	√		https://dpmpstsp.nttprov.go.id/wp-
5	Mengumumkan Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor OPD Provinsi	√		Ada jalur evakuasi yang ditempelkan di lingkungan kantor.

KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INDIKATOR KOMITMEN ORGANISASI

(Dukungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Keterbukaan Informasi yang meliputi anggaran, sumber daya manusia, regulasi dan tugas pokok fungsi)

PERTANYAAN		TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
NO				
I	PROFIL PPID OPD PROVINSI NTT			
1	Menyediakan dan mengumumkan informasi profil PPID yang meliputi Stuktur, Visi, Misi, dan SK Penetapan	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/fro-nt/dokumen/detail/300320487
2	Menyediakan dan mengumumkan tugas dan fungsi PPID	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/fro-nt/dokumen/detail/300320487
	Menyediakan dan mengumumkan standar pelayanan informasi publik yang terdiri dari:			

3	SOP Permohonan Informasi	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/fro nt/dokumen/detail/300299440
4	SOP Pengelolaan keberatan pelayanan informasi	√		https://dpmptsp.nttprov.go.id/wp-
5	SOP Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik			
6	SOP Pendokumentasian informasi publik			
7	Memiliki Maklumat Pelayanan Informasi Publik	√		https://dpmptsp.nttprov.go.id/wp-content/uploads/2024/05/MPP-JPEG-819x1024.jpg
II	TUGAS DAN KEWENANGAN ATASAN PPID OPD PROVINSI NTT <i>Peran Pimpinan</i>			
1	Menetapkan kebijakan pelayanan informasi publik	√		Menjadi salah satu indicator penilaian dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas.
2	Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.	√		Ada SK Pengelola PPID Pembantu DPMPTSP Provinsi NTT
3	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana	√		Dilakukan rapat evaluasi kinerja capaian kinerja Dinas setiap triwulan, sudah muat di website PPID dan google drive
III	PELAKSANA TUGAS PPID OPD PROVINSI NTT <i>Institusionalisasi PPID</i>			
1	Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik	√		Ada SK Pengelola PPID Pembantu DPMPTSP Provinsi NTT, sudah muat di website PPID
2	Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi	√		Ada SK Pengelola PPID Pembantu DPMPTSP Provinsi NTT, Ada laporan pelaksanaan PPID, sudah muat di website PPID
3	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi	√		Dilakukan rapat evaluasi kinerja capaian kinerja Dinas setiap triwulan yang sudah muat di website PPID , dan google drive

IV	ANGGARAN PPID OPD PROVINSI NTT			√
1	Menyediakan anggaran rutin kegiatan keterbukaan informasi			Tidak ada anggaran khusus
2	Menyediakan anggaran bagi peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID			Tidak ada anggaran khusus
3	Menyediakan anggaran lain bagi kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi			Tidak ada anggaran khusus
V	KEPATUHAN MENJALANKAN KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI			
1	Maklumat Pelayanan yang berbasis pada PERKI 1 Tahun 2021 pasal 47	√		https://dpmptsp.nttprov.go.id/wp-content/uploads/2024/05/MPP-JPEG-819x1024.jpg
2	Menyampaikan laporan Layanan Informasi Publik tahun 2022	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/500249624

KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INDIKATOR DIGITALISASI

(Proses Penggunaan teknologi informasi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksestabilitas, dan kualitas layanan)

No	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
I	PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN IMPLEMENTASI SATU DATA			
	Pengembangan Layanan Publik			
1	OPD memiliki kanal website atau aplikasi yang berkaitan dengan bantuan sosial			https://dpmptsp.nttprov.go.id
2	Mengumumkan Informasi berkaitan penggunaan atau realisasi anggaran Tahun 2024			
3	Memiliki Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat OPD	√		https://oss.go.id
4	Walidata Pendukung Menyebarkan Data ke Portal Satu Data Indonesia	√		https://oss.go.id
5	Memiliki aplikasi/kanal website yang mendukung atau berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan OPD Provinsi	√		https://dpmptsp.nttprov.go.id
II	KEMUDAHAN AKSES PUBLIK			
1	OPD menyediakan kanal website atau aplikasi - aplikasi layanan publik lainnya yang memiliki user interface/tampilan yang memudahkan publik mengakses	√		http://www.ppidutama.nttprov.go.id
2	OPD memiliki kanal website atau aplikasi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas	√		https://dpmptsp.nttprov.go.id
III	MEDIA SOSIAL			
	Akun media sosial yang aktif mengumumkan informasi publik sebagai berikut:			
	Media Sosial yang dimiliki Badan Publik :			
1	a. Facebook	√		Dpmptsp Ntt
2	b. Instagram	√		dpm.ptspntt
3	c. Twitter		√	link akun
4	d. Tiktok		√	link akun
5	e. Youtube	√		DPMPPTSP Prov. NTT
6	Mengumumkan Informasi berkaitan ruang lingkup, tugas dan fungsi Badan Publik	√		facebook.com/photo/?fbid=70079615533388&set=a.110334194841267
7	Mengumumkan Informasi berkaitan program dan kegiatan strategis sesuai ruang lingkup, tugas dan fungsi Badan Publik	√		https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02eVoYK7FBjCRJmSJugabJUHQY5TFmi2KySSb3wst1En76rKkAVXx9z2

				ZX1bRou234l&id=100075 940595827
8	Mengumumkan Informasi berkaitan tata cara pengajuan permohonan informasi			link konten
9	Mengumumkan Informasi berkaitan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan			link konten

Gedung Diskominfo Prov. Nusa Tenggara Timur Jln. Palapa, Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kode Pos 85111 Telp: 081339778884/081337466666. Email: kipntx@gmail.com

Kupang, 27 September 2024

Mengetahui dan Menyetujui,
a.n. Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT, 





(Herry Anselmus Pandie, SE)

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

A. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No.	Judul info/dok	Ringkasan	Pejabat yang menguasai	PJ pembuatan	Waktu pembuatan	Bentuk dok	Retensi	Link	Disabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Informasi tentang Profil Badan Publik								
1.1	Nama Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	PPID Pembantu	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan		Soft Copy (Online)	Selama Berlaku	https://inspektorat.nttprov.go.id/	
1.2	Kedudukan/domisili beserta alamat lengkap	Inspektorat Daerah Provinsi NTT terletak di Jalan Palapa Nomor 06, Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT.	PPID Pembantu	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	2020	Soft Copy (Online)	Selama Berlaku	https://inspektorat.nttprov.go.id/	
1.3	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi NTT terdiri atas : 1. Inspektur Daerah; 2. Sekretaris Inspektorat; 3. Sekretariat, terdiri atas :Sub Bag Adm.Umum & Keuangan; 4. Irban, terdiri atas : Irban I, Irban II, Irban III, Irban IV, dan Irban V; 5. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas: Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional	PPID Pembantu	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	2020	Soft Copy (Online)	Selama Berlaku	https://inspektorat.nttprov.go.id/	

No.	Judul info/dok	Ringkasan	Pejabat yang menguasai	PJ pembuatan	Waktu pembuatan	Bentuk dok	Retensi	Link	Disabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), dan Jabatan Fungsional lainnya sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur							
1.4	Profil Singkat Pejabat Struktural	1. Inspektur : - Nama: Stefanus F. Halla, ST, MM - NIP: 19730105200012 1 004 - Pangkat/Gol: Pembina Utama Muda/ (IV/c) 2. Sekretaris - Nama: Feronika Naatonis, ST. M.Eng. - NIP: 19720214200012 2 002 - Pangkat/Gol: Pembina Tk. I / (IV/b) 3. Irban I - Nama: Amelia Peni Tella, SE, M.M - NIP: 19671102198812 2 003	PPID Pembantu	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	2022	Hard Copy	Selama Berlaku	https://inspektorat.nttprov.go.id/	

No.	Judul info/dok	Ringkasan	Pejabat yang menguasai	PJ pembuatan	Waktu pembuatan	Bentuk dok	Retensi	Link	Disabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		- Pangkat/Gol: PEMBINA Tk. I / (IV/b) 4. Irban II : - 5. Irban III: - 6. Irban IV - Nama: Enny C. Ndapamerang, S.Sos, MM - NIP: 19680128 199412 2 002 - Pangkat/Gol: Pembina Tk. I / (IV/b) 7. Irban V: - Nama: Jonas O. Manesi, ST, MT - NIP: 19731023 200012 1 001 - Pangkat/Gol: Pembina Tk. I / (IV/b) 8. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan - Nama: Lukas Liku Sait, SP, M. Sc - NIP: 19721118 200012 1 004 - Pangkat/Gol: Pembina / (IV/a)							
1.5	Sejarah	Berikut diuraikan sejarah terbentuknya Inspektorat	PPID Pembantu	Sub Bagian Administrasi	2020	Soft Copy (Online)	Selama Berlaku	https://inspektorat.nttpr ov.go.id/	

No.	Judul info/dok	Ringkasan	Pejabat yang menguasai	PJ pembuatan	Waktu pembuatan	Bentuk dok	Retensi	Link	Disabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur : - Kantor Pengawas Keuangan Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 1974 sampai dengan tahun 1978 - Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 1979 sampai dengan 1985; - Inspektorat Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 1986 sampai dengan 1989 - Badan Pengawas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 1989 sampai dengan 1998” - Badan Pengawas Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 1998 sampai dengan 2001 - Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2002 sampai dengan 2018 - Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 sampai sekarang.		Umum dan Keuangan					
1.6	Website dan Sosial Media	- Website : https://inspektorat.nttprov.go.id/	Inspektur	Tim Media	2020	Soft Copy (Online)	Selama Berlaku	- https://inspektorat.nttprov.go.id/ (Website)	

No.	Judul info/dok	Ringkasan	Pejabat yang menguasai	PJ pembuatan	Waktu pembuatan	Bentuk dok	Retensi	Link	Disabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		- Instagram : itdaprovnnt - Facebook: itdaprovnnt - Twitter: itdaprovnnt - Youtube: Inspektorat Daerah Provinsi NTT						- https://instagram.com/itdaprovntt?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ== (Instagram) - https://youtube.com/@PPIDPembantuITDAprovntt (Youtube) - https://twitter.com/itdaprovntt?s=20 (Twitter) - https://www.facebook.com/itdaprovntt?mibextid=ZbWKwL (Facebook)	
2.	Ringkasan Informasi tentang Program/Kegiatan yang sedang dilaksanakan								
2.1	Nama Program & Kegiatan	Daftar nama program & kegiatan tertuang dalam DPA Inspektorat Daerah Provinsi NTT	PPID Pembantu	Sub Koordinator Perencanaan	2024	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku	http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/500120550	
2.2	Penanggungjawab & Pelaksana Program	Penanggungjawab & pelaksana program & kegiatan tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT	PPID Pembantu	Sub Koordinator Perencanaan	2024	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku	http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/500098693#	
2.3	Jadwal Pelaksanaan Program/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan tertuang dalam DPA Inspektorat Daerah Provinsi NTT	PPID Pembantu	Sub Koordinator Perencanaan	2024	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku	http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/500120550	

No.	Judul info/dok	Ringkasan	Pejabat yang menguasai	PJ pembuatan	Waktu pembuatan	Bentuk dok	Retensi	Link	Disabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.4	Nilai Anggaran Kegiatan per Program	Nilai Anggaran Kegiatan per Program DPA Inspektorat Daerah Provinsi NTT	PPID Pembantu	Sub Koordinator Perencanaan	2024	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku	http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/500120550	
3.	Ringkasan Kinerja yang telah maupun sedang dilaksanakan								
3.1	Penilaian Kinerja	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) meliputi kinerja, akuntabilitas, efisiensi, kegiatan yang telah dilaksanakan dan penggunaan anggaran sebagaimana tertuang dalam LKIP Inspektorat Daerah Provinsi NTT	PPID Pembantu	Sub Koordinator Analisis Data dan Evaluasi	2024	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku	http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen?category=1&area=pemda&search=lkip&type=3&opr=3967&kabkota=	
3.2	Efisiensi yang dicapai	Efisiensi anggaran yang dicapai Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Provinsi NTT	PPID Pembantu	Sub Koordinator Analisis Data dan Evaluasi	2024	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku	http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen?category=1&area=pemda&search=lkip&type=3&opr=3967&kabkota=	
3.3	Laporan seluruh Program & Kegiatan yang telah dijalankan	Laporan seluruh Program & Kegiatan yang telah dijalankan sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Provinsi NTT	PPID Pembantu	Sub Koordinator Analisis Data dan Evaluasi	2024	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku	http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen?category=1&area=pemda&search=lkip&type=3&opr=3967&kabkota=	
3.4	Laporan Umum & Keuangan	Laporan Umum & Keuangan sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	PPID Pembantu	Sub Koordinator Analisis Data dan Evaluasi	2024	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku	http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen?category=1&area=pemda&search=lkip&type=3&opr=3967&kabkota=	

No.	Judul info/dok	Ringkasan	Pejabat yang menguasai	PJ pembuatan	Waktu pembuatan	Bentuk dok	Retensi	Link	Disabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		(LKIP) Inspektorat Daerah Provinsi NTT							
3.5	Realiasi Penyerapan Program dan Kegiatan	Realiasi Penyerapan Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Provinsi NTT	PPID Pembantu	Sub Koordinator Analisis Data dan Evaluasi	2024	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku	http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen?category=1&area=pemda&search=lkip&type=3&opr=3967&kabkota=	
3.6	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Keuangan tahunan Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagaimana tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	PPID Pembantu	Sub Koordinator Analisis Data dan Evaluasi	2024	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku	http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen?category=1&area=pemda&search=lkpj&type=3&opr=3967&kabkota=	
4.	Laporan keuangan								
4.1	Laporan Keuangan	- Rencana & Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagaimana tercantum dalam dokumen keuangan - Neraca Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagaimana tercantum dalam dokumen keuangan - Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Inspektorat Daerah	PPID Pembantu	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	2024	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku	http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen?category=1&area=pemda&search=laporan+keuangan&type=4&opr=3967&kabkota=	

No.	Judul info/dok	Ringkasan	Pejabat yang menguasai	PJ pembuatan	Waktu pembuatan	Bentuk dok	Retensi	Link	Disabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Provinsi NTT sebagaimana tercantum dalam dokumen keuangan - Daftar Aset dan Investasi Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagaimana tercantum dalam dokumen Asset							
5.	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan								
5.1	Daftar Peraturan dan Keputusan yang telah ditetapkan	Daftar Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan yang telah ditetapkan pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	PPID Pembantu	Inspektur Pembantu II	2019	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku	http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen?category=1&area=pemda&search=keputusan&type=10&opr=3967&kabkota=	
6.	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik								
6.1	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik	Bagan alur, syarat dan waktu permohonan informasi/pengajuan keberatan dan pihak-pihak bertanggung jawab yang dapat dihubungi	PPID Pembantu	Tim PPID	2024	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku	http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300195444	
7.	Mekanisme Pengadaan								
7.1	Rencana Umum Pengadaan Barang & Jasa	Rencana Umum Pengadaan Barang & Jasa Inspektorat Daerah Provinsi NTT	PPID Pembantu	Sub Bagian Administrasi	2024	Soft Copy (Online)	Selama Berlaku	http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/500260037	

No.	Judul info/dok	Ringkasan	Pejabat yang menguasai	PJ pembuatan	Waktu pembuatan	Bentuk dok	Retensi	Link	Disabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Umum dan Keuangan		dan Hard Copy			
8.	SOP								
8.1	SOP	- SOP Pengujian Tentang Konsekuensi - SOP Pengelolaan Permohonan Informasi - SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi - SOP Penetapan dari Pemutakhiran Daftar Informasi yang Dikecualikan - SOP Penetapan dari Pemutakhiran Daftar Informasi Publik - SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan - SOP Pendokumentasian Informasi Publik - SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik - SOP Penetapan dari Pemutakhiran Daftar Informasi Yang Dikecualikan - SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi - SOP Aplikasi Cash Management System (CMS)	PPID Pembantu	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	2019-2024	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku	http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen?category=1&area=pemda&search=SOP&type=5&opr=3967&kabkota=	

No.	Judul info/dok	Ringkasan	Pejabat yang menguasai	PJ pembuatan	Waktu pembuatan	Bentuk dok	Retensi	Link	Disabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		- SOP SPP dan SPM Gaji - SOP Verifikasi dan Pertanggungjawaban (SPJ) - SOP Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran - SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) - SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) - SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) - SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) - SOP Pengarsipan dan Pendistribusian LHP - SOP Surat Tugas - SOP Permohonan Ijin Tidak Masuk Kerja / Terlambat Masuk Kantor - SOP Penatalaksanaan Absensi Sidik Jari - SOP Pengusulan Karis/Karsu - SOP Penanganan Surat Masuk dan Surat Keluar - SOP Pengumpulan, Pengusulan, Penilaian dan Penetapan Angka Kredit							

No.	Judul info/dok	Ringkasan	Pejabat yang menguasai	PJ pembuatan	Waktu pembuatan	Bentuk dok	Retensi	Link	Disabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		- SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat - SOP Penertiban Nota Dinas Mutasi Inspektorat Daerah Provinsi NTT - SOP Penyusunan Laporan Keuangan - SOP Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) - SOP Pengelolaan Arsip (hardcopy dan softcopy) - SOP Pelaksanaan Rapat Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan - SOP Sistem Keamanan Akses Data dan Dokumen Oleh Pihak Eksternal - SOP Akses Data Internal							

B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA

[illegible]

C. INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT

No.	Judul info/dok	Ringkasan	Pejabat yang menguasai	PJ pembuatan	Waktu pembuatan	Bentuk dok	Retensi	Link	Disabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Daftar Informasi Publik	Berisi tentang Informasi - informasi publik yang tersedia secara berkala, serta merta, setiap saat & informasi yang dikecualikan	PPID Pembantu	Tim PPID	2024	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku	http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/500241886	
2.	Informasi tentang Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan	peraturan/kebijakan yang telah ditetapkan.	PPID Pembantu	Inspektur Pembantu II	2019	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku	http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen?category=1&area=pemda&search=keputusan&type=10&opr=3967&kabkota=	
3.	Informasi tentang organisasi, administrasi kepegawaian dan keuangan								
3.1	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi personil & keuangan	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi personil & keuangan Inspektorat	PPID Pembantu	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	2019-2024	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku	http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen?category=1&area=pemda&search=SOP&type=5&opr=3967&kabkota=	
3.2	Profil lengkap pimpinan & pegawai yang meliputi nama, riwayat karier/posisi, riwayat pendidikan, penghargaan yang pernah diterima	Profil lengkap pimpinan & pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi nama, riwayat karier/posisi, riwayat pendidikan, penghargaan yang pernah diterima	PPID Pembantu	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	2020	Soft Copy (Online)	Selama Berlaku	https://inspektorat.nttprov.go.id/	
3.3	Anggaran secara umum / khusus serta laporan keuangannya	Anggaran secara umum/ khusus serta laporan keuangan Inspektorat Daerah	PPID Pembantu	- Sub Koordinator Perencanaan - Sub Bagian Administrasi	2024	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku	- http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/500120550 (DPPA)	

No.	Judul info/dok	Ringkasan	Pejabat yang menguasai	PJ pembuatan	Waktu pembuatan	Bentuk dok	Retensi	Link	Disabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Umum dan Keuangan				- http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen?category=1&area=pemda&search=laporan+keuangan&type=4&opr=3967&kabkota=(Laporan Keuangan)	
3.4	Laporan Keuangan	Berisi Neraca, Daftar Aset dan investasi, Realisasi, CALK	PPID Pembantu	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	2024	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku	http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen?category=1&area=pemda&search=laporan+keuangan&type=4&opr=3967&kabkota=	
3.5	DPA	Informasi DPA	PPID Pembantu	Sub Koordinator Perencanaan	2024	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku	http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/500120550	
3.6	RKA dan DPA	Informasi RKA dan DPA	PPID Pembantu	Sub Koordinator Perencanaan	2024	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku	- http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/500120550 (DPA) - http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen?category=1&area=pemda&search=RKA&type=2&opr=3967&kabkota= (RKA)	

No.	Judul info/dok	Ringkasan	Pejabat yang menguasai	PJ pembuatan	Waktu pembuatan	Bentuk dok	Retensi	Link	Disabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.7	LKPJ	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Keuangan tahunan sebagaimana tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	PPID Pembantu	Sub Koordinator Analisis Data dan Evaluasi	2024	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku	http://ppidutama.ntprov.go.id/front/dokumen?category=1&area=pemda&search=lkpj&type=3&opr=3967&kabkota=	
3.8	LKIP	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahunan Inspektorat sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	PPID Pembantu	Sub Koordinator Analisis Data dan Evaluasi	2024	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku	http://ppidutama.ntprov.go.id/front/dokumen?category=1&area=pemda&search=lkip&type=3&opr=3967&kabkota=	
3.9	Perjanjian Kinerja (PK) 2023	Perjanjian Kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT	PPID Pembantu	Sub Koordinator Analisis Data dan Evaluasi	2024	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku	http://ppidutama.ntprov.go.id/front/dokumen?category=1&area=pemda&search=perjanjian+kinerja&type=3&opr=3967&kabkota=	
3.10	SK PPID Pembantu Inspektorat Daerah Tahun 2023	SK PPID Pembantu Inspektorat Daerah Tahun 2023	PPID Pembantu	Tim PPID	2024	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku	- http://ppidutama.ntprov.go.id/front/dokumen/detail/500241885 - http://ppidutama.ntprov.go.id/front/dokumen/detail/500256316	
3.11	Daftar Barang Milik Daerah Inspektorat Daerah	Buku Inventaris Barang Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2023	PPID Pembantu	Pengurus Barang	2024	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku	http://ppidutama.ntprov.go.id/front/dokumen/detail/500256654	

No.	Judul info/dok	Ringkasan	Pejabat yang menguasai	PJ pembuatan	Waktu pembuatan	Bentuk dok	Retensi	Link	Disabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.12	Daftar PNS dan Non PNS Inspektorat Daerah Tahun 2023	Grafik / Data Statistik Kepegawaian dan Keuangan Itda Provinsi NTT Tahun 2021-2022	PPID Pembantu	Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	2021	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku	http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/500256443	
3.13	Regulasi Pelaksanaan Tugas	- Keputusan Gubernur NTT Nomor 122/KEP/HK/2022 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT - Keputusan Gubernur NTT Nomor 37/KEP/HK/2020 Tentang Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemprov NTT	PPID Pembantu	Tim PPID	2020 dan 2023	Soft Copy (Online) dan Hard Copy	Selama Berlaku	http://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen?category=3&area=pemda&search=keputusan&type=10&opr=3967&kabkota=	



Stefanus F. Halla, S.T., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19730105 200012 1 004

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kelurahan Naikolan, Maulafa, Kota Kupang

Laman: dkpprov.ntt@gmail.com

Kupang, 23 September 2024

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi NTT
di-

Kupang

SURAT PENGANTAR

Nomor : Dis.Pkl.050/B1. 1368 /IX/2024

No	Dokumen yang dikirimkan	Jumlah	Keterangan
1.	Daftar Informasi Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2024	1 (Satu) Jepitan	Terlampir
2.	Daftar Informasi yang di Kecualikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2024		

Pengirim

Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP



Ir. Agustinus Bulu

Pembina Tingkat I

NIP. 196809151995031004

Diterima Tanggal :

Penerima :

Nama Jabatan :

Nomor Telepon :

PARAF KOORDINASI	
Kasubag Kepeg dan Umum	
Ahli Pertama-Pranata Komputer	

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JENIS INFORMASI				RETENSI ARSIP
					BERKALA	SETIAP SAAT	SERTA MERTA	DIKECUALIKAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. INFORMASI TENTANG BADAN PUBLIK									
1	Nama Badan Publik	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Soft Copy		✓			Selama Berlaku
2	Kedudukan / domisili beserta alamat lengkap	Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur		Soft Copy		✓			Selama Berlaku
3	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Sekretariat Dinas	Soft Copy	✓				Selama Berlaku
4	Struktur Organisasi Dinas	Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		Soft Copy	✓				Selama Berlaku
2. INFORMASI TENTANG PERATURAN, KEPUTUSAN DAN / ATAU KEBIJAKAN									
1	SOTK Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 87 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretariat Dinas	Soft Copy	✓				Selama Berlaku
2	SOTK Cabang Dinas dan UPTD	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 87 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Soft Copy	✓				Selama Berlaku
3. INFORMASI TENTANG PROGRAM/KEGIATAN YANG SEDANG DI JALANKAN									
1	5 Program pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT sesuai dengan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Bidang	Soft Copy	✓				Selama Berlaku
		Pengelolaan perikanan tangkap		Soft Copy	✓				Selama Berlaku
		Pengelolaan perikanan budidaya		Soft Copy	✓				Selama Berlaku
		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		Soft Copy	✓				Selama Berlaku
		Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan		Soft Copy	✓				Selama Berlaku
4. PPID									
1	SK PPID	SK PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024		Soft Copy dan Hard copy	✓				Selama Berlaku

2	DIP	Daftar Informasi Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	Sekretariat Dinas	Soft Copy dan Hard copy	✓				Selama Berlaku
3	DIK	Daftar Informasi yang di kecualikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024		Soft Copy dan Hard copy	✓				Selama Berlaku
5. SOP									
1	SOP	Standar Operasional Prosedur pada Sekretariat	Sekretariat Dinas	Soft Copy dan Hard copy			✓		Selama Berlaku
		Standar Operasional Prosedur pada Bidang Tangkap		Soft Copy dan Hard copy			✓		Selama Berlaku
		Standar Operasional Prosedur pada Bidang PRLPB		Soft Copy dan Hard copy			✓		Selama Berlaku
		Standar Operasional Prosedur pada Bidang PSDKP		Soft Copy dan Hard copy			✓		Selama Berlaku
		Standar Operasional Prosedur pada Bidang P3KP		Soft Copy dan Hard copy			✓		Selama Berlaku
6. KINERJA YANG TELAH MAUPUN SEDANG DILAKSANAKAN									
1	LKIP	Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Soft Copy dan Hard copy	✓				Selama Berlaku
2	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan yang telah di audit SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan		Soft Copy dan Hard copy	✓				Selama Berlaku
3	LKPJ	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Soft Copy dan Hard copy	✓				Selama Berlaku
4	LPPD	Indikator Kinerja Outcome Dinas Kelutan dan Perikanan Provinsi NTT		Soft Copy dan Hard copy	✓				Selama Berlaku
		Indikator Kinerja Output Dinas Kelutan dan Perikanan Provinsi NTT		Soft Copy dan Hard copy	✓				Selama Berlaku
5	RENSTRA	Rencana Strategis Dinas Kelutan dan Perikanan Provinsi NTT		Soft Copy dan Hard copy	✓				Selama Berlaku
6	DPA	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		Soft Copy dan Hard copy	✓				Selama Berlaku
7	IKU	Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		Soft Copy dan Hard copy	✓				Selama Berlaku



**DAFTAR INFORMASI YANG DI KECUALIKAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

NO	URAIAN INFORMASI	URAIAN HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT APABILA INFORMASI DI BUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1	Data logbook penangkapan ikan: - Titik Koordinat - Hasil Tangkapan - Data Pemilik Kapal	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal; 17 huruf d	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Selama undang-undang berlaku	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
2	Data by Name by Addres Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal; 17 huruf h dan huruf j	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Sampai ada persetujuan dari orang bersangkutan / pihak berwenang	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi
3	Rencana Operasi Pengawasan/Penangkapan terhadap pelaku <i>Illegal dan Destructive Fishing</i>	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal; 17 huruf i	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Sampai Pelaksanaan Operasi	Dapat menghambat kesuksesan Operasi Pengawasan	Rencana Operasi Pengawasan/Penangkapan dapat dilaksanakan sesuai rencana
4	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal; 17 huruf h	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Selama undang-undang berlaku	Data Pribadi Pegawai dapat di salah gunakan	Melindungi data Pribadi Pegawai
5	Laporan Keuangan Belum di Audit	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 Ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal; 17 huruf j	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Samapai dengan Terbitnya Laporan Keuangan Audited	Dapat menghambat peyusunan dan pengambilan kebijakan	Membantu memcapai keberhasilan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan



DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Ringkasan isi informasi	Perangkat daerah yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan/ penerbit informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Rentensi Arsip	Link
1	Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	Kupang, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama Berlaku	https://bakesbangpolprovntt.info/
2	Profil Singkat Pimpinan / Pejabat Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	Kupang, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama Berlaku	https://bakesbangpolprovntt.info/
3	LHKPN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	Kupang, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama Berlaku	https://bakesbangpolprovntt.info/
4	Program dan Kegiatan yang dijalankan: - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa - Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik - Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	Kupang, 2024	Softcopy dan hardcopy	1 Tahun	https://bakesbangpolprovntt.info/

No	Ringkasan isi informasi	Perangkat daerah yang menguasai informasi	Penanggung jawab pembuatan/ penerbit informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Rentensi Arsip	Link
5	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	Kupang, 2023	Softcopy dan hardcopy	2 Tahun	https://bakesbangpolprovntt.info/
6	Laporan Keuangan yang telah diaudit BPK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	Kupang, 2023	Softcopy dan hardcopy	2 Tahun	https://bakesbangpolprovntt.info/
7	Laporan Akses Informasi Publik (Laporan PPID)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	Kupang, 2024	Softcopy dan hardcopy	1 Tahun	https://bakesbangpolprovntt.info/
8	Produk hukum pemerintahan berhubungan dengan tupoksi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	Kupang, 2024	Softcopy dan hardcopy	1 Tahun	https://bakesbangpolprovntt.info/
10	Rencana Kerja (Renja)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	Kupang, 2024	Softcopy dan hardcopy	1 Tahun	https://bakesbangpolprovntt.info/
11	Rencana Strategis (Renstra)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	Kupang, 2024	Softcopy dan hardcopy	5 Tahun	https://bakesbangpolprovntt.info/
12	Mekanisme Pengadaan Barang & Jasa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	Kupang, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama Berlaku	https://bakesbangpolprovntt.info/
13	Bagan Alur Permohonan Ijin Penelitian pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Ormas	Kupang, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama Berlaku	https://bakesbangpolprovntt.info/
14	Bagan Alur Permohonan Tanda Lapor Ormas pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Ormas	Kupang, 2024	Softcopy dan hardcopy	Selama Berlaku	https://bakesbangpolprovntt.info/
15	Data Laporan Hibah Keuangan Bantuan Partai Politik Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Kupang, 2023	Softcopy dan hardcopy	1 Tahun	https://bakesbangpolprovntt.info/

Kupang, 08 Juli 2024

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Regina Maria Manbait, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 196711091995032001

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Data pribadi pegawai yang bersifat rahasia jadi terungkap	Menjaga Privasi dan Melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan	Selama menjadi pegawai dan apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
2	Data Hukuman Disiplin Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Data pribadi pegawai yang bersifat rahasia jadi terungkap	Menjaga Privasi dan Melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan	Selama menjadi pegawai dan apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
3	Laporan Situasi Daerah	Pasal 17 huruf c UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara atau Daerah	Menjaga Pertahanan dan Keamanan Negara atau Daerah	Selama Berlaku
4	Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik	Pasal 17 huruf c UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara atau Daerah	Menjaga Pertahanan dan Keamanan Negara atau Daerah	Selama Berlaku

Kupang, 08 Juli 2024

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur



Regina Maria Manbait, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 196711091995032001



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Palapa No. 11 Telp. /Fax : (0380) 833122

Website : www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id, www.ppiddprov.go.id

Email : diskominfo@nttprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 500.12.11.1/083/kominfo 1/KEP/2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan keterbukaan informasi publik, dan sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi Publik, maka badan publik wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik yang berisi seluruh informasi publik yang dikuasainya;
- b. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi internal dan pemutakhiran terhadap informasi publik yang dikuasai dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan adanya penetapan terhadap Daftar Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transisi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transisi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5071);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara RI Tahun 2021 No 741)

8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 Seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);
9. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT;
10. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 300.2.22/028/Kominfo.1/KEP/2024 Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kominfo Provinsi NTT Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur ini;
- KEDUA : Rincian dalam Daftar Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi yang wajib diumumkan Secara Serta Merta, dan Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 atau sumber dana lainnya yang tidak menyalahi ketentuan;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Kupang
Pada tanggal : 8 Mei 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Frederik C.P. Koenunu, ST, M.H
Pembina Tingkat I
NIP.19711115 200012 1 003

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur d Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT di Kupang.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : 500.12.11.1/083/kominfo 1/KEP/2024
Tanggal : 8 Mei 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NTT TAHUN 2024

I. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Informasi tentang Profil Dinas Badan Publik							
1.1	Kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi NTT Alamat: Telepon/fax: Hotline: Email :	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Dinas	2024	Salinan cetak dan digital	Cetak dan Multimedia http://www.ppidutama.ntprov.go.id	Selama berlaku

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	Visi dan Misi	Menyajikan Informasi terkait dengan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Perencana Ahli Muda	Sekretaris Dinas	2024	Salinan cetak dan digital	Cetak dan Multimedia http://www.ppidutama.nttprov.go.id	Selama berlaku
1.3.	Tugas dan Fungsi	Memuat Informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Publik Pergub 83 Tahun 2023: a. Tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan Pergup No 83 Tahun 2023 b. Tugas dan fungsi PPID Diskominfo sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT No 300.2.11/028/KOMINFO.1/KEP/2024	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Perencana Ahli Muda	Sekretaris Dinas	2024	Salinan cetak dan digital	Cetak dan Multimedia http://www.ppidutama.nttprov.go.id	Selama berlaku
1.4.	Struktur Organisasi	Menyajikan Informasi yang berkaitan dengan : a. Struktur Organisasi Dinas Kominfo Provinsi NTT sesuai dengan Pergub 83 Tahun 2023 b. Struktur PPID sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT No 300.2.11/028/KOMINFO.1/KEP/2024	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Perencana Ahli Muda	Sekretaris Dinas	2024	Salinan cetak dan digital	Cetak dan Multimedia http://www.ppidutama.nttprov.go.id	Selama berlaku
1.5.	Profil Kepala Dinas	Data yang memuat informasi nama Kepala Dinas, pendidikan terakhir, pengalaman kerja dan penghargaan yang telah diterima.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Dinas	2024	Salinan cetak dan digital	Cetak dan Multimedia http://www.ppidutama.nttprov.go.id	Selama berlaku

1.6.	Profil Singkat Pejabat Struktural	Data yang memuat informasi singkat Kepala Dinas dan pejabat struktural Diskominfo , meliputi nama, pendidikan terakhir, pengalaman kerja dan penghargaan yang telah diterima.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Dinas	2024	Salinan cetak dan digital	Cetak dan Multimedia http://www.ppidutama.ntpr.ov.go.id	Selama berlaku
1.7.	LHKPN Kepala Dinas dan Pejabat Struktural	Memuat informasi LHKPN Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika periode jabatan 2021-2023 sesuai dengan hasil verifikasi laporan terakhir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Kepala Sub Bagian Keuangan	Sekretaris Dinas	Setiap Tahun	Salinan cetak dan digital	Cetak dan Multimedia http://www.ppidutama.ntpr.ov.go.id	Selama berlaku
1.8	Profil Singkat Kepegawaian	Memuat informasi tentang komposisi ASN PNS dan Non- PNS s.d. tahun berjalan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Dinas	Setiap Tahun	Salinan cetak dan digital	Cetak dan Multimedia http://www.ppidutama.ntpr.ov.go.id	Selama berlaku
2.	Ringkasan Program & Kegiatan yang sedang dijalankan							
2.1.	Anggaran Program dan Kegiatan	Nilai anggaran program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT tahun berjalan	Analisis Data dan Informasi	Sekretaris Dinas	Setiap tahun	Salinan cetak dan digital	Cetak dan Multimedia http://www.ppidutama.ntpr.ov.go.id	5 tahun
2.2.	Rencana Kerja	Dokumen Rencana Kerja Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT yang memuat: - Nama Program dan Kegiatan - Penanggung Jawab Program dan Kegiatan - Target dan Capaian Program dan Kegiatan	Perencana Ahli Muda	Sekretaris Dinas	Setiap Tahun	Salinan cetak dan digital	Cetak dan Multimedia http://www.ppidutama.ntpr.ov.go.id	5 tahun

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Paket Pekerjaan dan Jadwal Pelaksanaan						
2.3.	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dan Pejabat Struktural	- Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dengan Gubernur NTT untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan - Dokumen Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dengan Kepala Dinas dan Dokumen Perjanjian Kinerja Pejabat eselon IV dengan Pejabat Eselon III untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. - Dokumen Perjanjian Kinerja Pegawai Dinas Kominfo NTT	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Dinas	Tahun berjalan	Salinan cetak dan digital	Cetak dan Multimedia http://www.ppidutama.ntprov.go.id	5 tahun

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Rencana Strategis	Dokumen Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT untuk mewujudkan visi misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Provinsi NTT.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris Dinas	2023	Salinan cetak dan digital	Cetak dan Multimedia http://www.ppiduntama.nttprov.go.id	5 tahun
2.6	Rencana Kerja	Dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT	Sekretaris Dinas, Kepala Bidang	Kepala Dinas	Setiap tahun	salinan cetak dan digital	Cetak dan Multimedia http://www.ppiduntama.nttprov.go.id	5 tahun
2.7.	Rencana Kinerja Tahunan	Dokumen rencana kerja yang terdiri dari sasaran, indikator, dan target kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT selama kurun waktu satu tahun. Dokumen ini memuat Sasaran strategis, Indikator sasaran dan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.	Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Analis Data dan Informasi	Kepala Dinas	Setiap tahun	salinan cetak dan digital	Cetak dan Multimedia http://www.ppiduntama.nttprov.go.id	5 tahun

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.8.	Rencana Aksi	Dokumen rencana aksi yang merupakan penjabaran dari Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dalam kurun waktu satu tahun. Dokumen ini memuat informasi sasaran strategis OPD, indikator sasaran strategis, indikator program, indikator kegiatan, target dan pentahapan kegiatan, jadwal pelaksanaan dan penanggungjawab kegiatan	- Sekretaris - Perencana Ahli Muda - Analis Data dan Informasi	Sekretaris Dinas	Setiap tahun	Salinan cetak dan digital	Cetak dan Multimedia http://www.ppidutama.nttprov.go.id	5 tahun
2.9	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Memuat informasi mengenai tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja satuan dan penjelasan, untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.	- Sekretaris - Perencana Ahli Muda - Analis Data dan Informasi	Sekretaris Dinas	Setiap tahun	Salinan cetak dan digital	Cetak dan Multimedia http://www.ppidutama.nttprov.go.id	5 tahun
2.10	Agenda Kegiatan Tahunan	Rencana jadwal kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT per bulan	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	Sepanjang Tahun	Salinan cetak dan digital	Cetak dan Multimedia http://www.ppidutama.nttprov.go.id	5 tahun
2.11	Agenda Kerja Dinas	Jadwal kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, memuat informasi tentang hari pelaksanaan kegiatan, jam, tanggal, acara, disposisi dan keterangan.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Dinas	Sepanjang tahun	Salinan cetak dan digital	Cetak dan Multimedia http://www.ppidutama.nttprov.go.id/	5 tahun

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Ringkasan Informasi tentang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur							
3.1	Laporan Penilaian Kinerja	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2023	Analisis Data dan Informasi	Sekretaris Dinas	Setiap tahun	Salinan cetak dan digital	Buku LKjIP dan Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	5 tahun
3.2	Laporan Tahunan	Laporan pelaksanaan kegiatan, yang terdiri dari Laporan Tahunan Dinas, serta Laporan Tahunan PPID Pembantu dari tahun 2023	- Perencana Ahli Muda - Analisis Data dan Informasi - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Dinas	Setiap tahun	Salinan cetak dan digital	Buku LKjIP dan Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	5 tahun
3.3.	Laporan Program & Kegiatan yang sedang dijalankan	Laporan pelaksanaan kegiatan, yang terdiri dari Laporan Tahunan Dinas, serta Laporan Tahunan PPID Pembantu tahun 2023.	- Perencana Ahli Muda - Analisis Data dan Informasi - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Dinas	Setiap tahun	Salinan cetak dan digital	Buku LKjIP dan Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	5 tahun
4.	Ringkasan Laporan Keuangan							
4.1.	Laporan Realisasi Anggaran	Berisi informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah diaudit. Untuk Tahun 2021-2023.	Kasubag Keuangan	Sekretaris Dinas	Setiap tahun setelah diaudit oleh Auditor resmi pemerintah	Salinan cetak dan digital	Buku Laporan Keuangan Audit dan Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	5 Tahun

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.	Neraca	Dokumen keuangan mengenai posisi aktiva, pasiva dan Aset Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah diaudit Tahun 2021-2023.	Kasubag Keuangan	Sekretaris Dinas	Setiap tahun setelah diaudit oleh Auditor resmi pemerintah	Salinan cetak dan digital	Buku Laporan Keuangan Audit dan Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	5 Tahun
4.3	Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai dengan standar akuntansi	Dokumen keuangan mengenai posisi dan seluruh transaksi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT yang telah diaudit tahun 2021-2023.	Kasubag Keuangan	Sekretaris Dinas	Setiap tahun setelah diaudit oleh Auditor resmi pemerintah	Salinan cetak dan digital	Buku Laporan Keuangan Audit dan Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	5 Tahun
4.4.	Laporan Perubahan Ekuitas	Laporan perubahan ekuitas Dinas, yang menunjukkan meningkatnya atau menurunnya modal atau kekayaan Dinas yang telah diaudit.	Kasubag Keuangan	Sekretaris Dinas	Setiap tahun setelah diaudit oleh Auditor resmi pemerintah	Salinan cetak dan digital	Buku Laporan Keuangan Audit dan Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	5 Tahun
4.5.	Daftar Aset & Investasi	Memuat informasi seluruh aset yang tercatat dan dikelola pada Dinas Komunikasi dan Informatika setelah verifikasi oleh BPAD Provinsi NTT	- Kasubag Kepegawaian dan Umum - Pengadministrasian Brang	Sekretaris Dinas	Setiap tahun setelah diaudit oleh Auditor resmi pemerintah	Salinan cetak dan digital	Buku Laporan Keuangan Audit dan Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	5 Tahun
4.6.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Dokumen yang memuat anggaran pendapatan dan belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, mulai	- Perencana ahli Muda - Analisis Data dan Informasi	Sekretaris Dinas	Setiap tahun	Salinan cetak dan digital	Buku DPA dan Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	5 tahun

[illegible]

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1.	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tatacara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi	Memuat informasi mengenai: a. Mekanisme pengajuan permohonan Informasi Publik b. Mekanisme pengajuan Keberatan Informasi Publik c. Mekanisme penyelesaian sengketa Informasi Publik d. Formulir permohonan informasi publik e. Formulir keberatan informasi publik.	Kepala Seksi Pengelolaan Layanan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik	Kabid PIKP Sekretaris Dinas selaku PPID Pembantu	Setiap Tahun	Salinan cetak dan digital	Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	Selama masih berlaku
7	Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik							
7.1.	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima	Memuat informasi jumlah Permohonan Informasi publik melalui laman ppid, email ppid dan permohonan langsung	- Pranata Humas Ahli Muda - Perencana Ahli Muda - Analis Data dan Informasi	Sekretaris	2023	Cetak dan Digital	Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	5 Tahun
7.2.	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan yang ditolak	Jumlah permohonan informasi publik yang telah dipenuhi dan atau ditolak oleh PPID Pembantu	- Pranata Humas Ahli Muda - Analis Data dan Informasi	Sekretaris	2023	Cetak dan Digital	Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	5 Tahun

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang							
8.1.	Informasi tentang hak dan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh ASN	Tata cara pengaduan ASN dan form pengaduan pelanggaran disiplin ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Setiap tahun	Salinan cetak dan digital	Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	5 Tahun
8.2.	Data Penanganan Aduan	Jumlah aduan tentang penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Setiap tahun	Salinan cetak dan digital	Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	5 Tahun
9.	Pengumuman Pengadaan Barang & Jasa							
9.1.	Rencana Umum Pengadaan Barang & Jasa	Menyajikan informasi terkait rencana Umum Pengadaan Barang & Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika	- Pejabat Pembuat Komitmen - Admin RUP	Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran/ Barang	Setiap tahun	Salinan cetak dan digital	Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	5 Tahun

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.2.	Pengumuman Proses Pengadaan	Menyajikan informasi terkait seluruh pengumuman proses pengadaan barang dan jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika, termasuk kelengkapan dokumennya	Pejabat Pembuat Komitmen	Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran/ Barang	Setiap tahun	Salinan cetak dan digital	Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	5 Tahun
10.	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat							
10.1	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat	Menyajikan informasi dalam format digital mengenai prosedur peringatan dini pada keadaan darurat di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	2021	Salinan digital	Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	5 Tahun
11.	Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat							
11.1	Informasi tentang kanal media sosial	Alamat akun media sosial Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai media layanan informasi dan interaksi dengan masyarakat secara digital, antara lain twitter, instagram, facebook fanpage, Youtube	Kepala Bidang PIKP	Kepala Bidang IKP	Terkini	Salinan digital	Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id Facebook Instagram Youtube Twitter	5 Tahun

II. Informasi yang diumumkan secara Serta Merta

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Hoaks, Mis Informasi dan Disinformasi	Informasi yang mengandung hoaks, misinformasi dan atau disinformasi yang beredar di masyarakat melalui berbagai platform media.	- Kepala Bidang PIKP - Tim anti Hoaks	Kabid PIKP	Setiap Tahun	Salinan Digital	Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	

III. Informasi Yang tersedia Setiap Saat

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Daftar Informasi Publik							
1.1.	Daftar Informasi Publik	Informasi-informasi publik yang tersedia secara berkala, serta merta, dan setiap saat tahun 2024	- Sekretaris - Tim PPID	Sekretaris	Setiap Tahun	Salinan / Digital	Cetak Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	
2	Informasi tentang Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan							
2.1.	Informasi tentang Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan	Dokumen pendukung, masukan, risalah rapat proses pembentukan, tahap perumusan dan rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan Dinas Komunikasi Dan Informatika; Bidang PIKP Bidang Layanan E-Government Bidang PIKP Bidang Infrastruktur Bidang Persandian	- Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Seksi Tata Kelola Pengembangan E-Government - Para Kepala Bidang	Sekretaris Para Kepala Bidang	Setiap Tahun	Salinan / Digital	Cetak Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	Sepanjang Masih Berlaku

[illegible]

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan
3.1.	Daftar Informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan	Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, antara lain adalah profil Dinas, program dan kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan, laporan keuangan, laporan akses Informasi Publik, dan lain sebagainya.	- Perencana Ahli Muda - Tim PPID Diskominfo	Sekretaris selaku PPID Pembantu	Setiap Tahun	Salinan / Digital	Cetak dan Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	Selama berlaku
4	Informasi tentang organisasi, administrasi kepegawaian dan keuangan :							
4.1.	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi personil & keuangan	<i>Standart Operating Procedur</i> (SOP) yang menjadi pedoman pengelolaan organisasi, administrasi personil dan keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	2022-2023	Cetak dan Digital	Cetak dan Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	Sepanjang Masih Berlaku
4.2.	Profil Kepegawaian Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi NTT	Profil lengkap pegawai dan data kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT terbaru	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Sekretaris	2024	Cetak dan Digital	Cetak dan Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	Sepanjang Masih Berlaku

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan
4.3.	Daftar LHKASN yang telah diserahkan ke instansi yang berwenang	Daftar LHKASN dari para pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang (Inspektorat)	Kasubag Keuangan	Sekretaris	2022 dan 2023	Cetak dan Digital	Cetak dan Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	Sepanjang Masih Berlaku
4.4.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi NTT	Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran yang mencakup belanja daerah per program dan per kegiatan tahun 2024	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	2024	Cetak dan Digital	Cetak dan Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	5 Tahun
4.5	Laporan Penilaian kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi NTT	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2023	Analisis Data dan Informasi	Sekretaris	2023	Cetak dan Digital	Cetak dan Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	5 Tahun
4.6.	Laporan Tahunan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi NTT	Laporan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari Laporan Tahunan Dinas Kominfo Prov. NTT	Analisis Data dan Informasi	Sekretaris	2023	Cetak dan Digital	Cetak dan Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	5 Tahun

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan
4.7.	Laporan Realisasi Anggaran (<i>audited</i>)	LRA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023	Kasubag Keuangan	Sekretaris	2023	Cetak dan Digital	Cetak dan Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	5 Tahun
4.8.	Neraca (<i>audited</i>)	Dokumen keuangan mengenai posisi aktiva, pasiva dan Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT tahun 2023	Kasubag Keuangan	Sekretaris	2023	Cetak dan Digital	Cetak dan Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	5 Tahun
4.9.	Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (<i>audited</i>)	Dokumen keuangan mengenai posisi dan seluruh transaksi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2023 .	Kasubag Keuangan	Sekretaris	2023	Cetak dan Digital	Cetak dan Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	5 Tahun
4.10	Laporan Perubahan Ekuitas (<i>audited</i>)	Laporan perubahan ekuitas Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan 2023 menunjukan meningkatnya atau	Kasubag Keuangan	Sekretaris	2023	Cetak dan Digital	Cetak dan Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	5 Tahun

[illegible]

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan
5.1.	Daftar Kontrak Pengadaan Barang Jasa	Daftar Kontrak pengadaan barang jasa yang telah diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT tahun 2023 dan 2024	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian PPK TA 2023	Sekretaris	2023 dan 2024	Cetak dan Digital	Cetak dan Multimedia pada http://www.ppiduta.ma.nttprov.go.id	5 Tahun
5.2.	Daftar Perjanjian Kerja Sama	Daftar perjanjian kerja sama yang telah dan sedang dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT tahun 2023	PPK	Sekretaris	2023 dan 2024	Cetak dan Digital	Cetak dan Multimedia pada http://www.ppiduta.ma.nttprov.go.id	5 Tahun
6.	Data perbendaharaan atau inventaris							
6.1.	Data aset dan inventaris barang	Daftar inventarisasi aset yang berada di bawah pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah diverifikasi oleh BPAD Provinsi NTT	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	2023	Cetak dan Digital	Cetak dan Multimedia pada http://www.ppiduta.ma.nttprov.go.id	5 Tahun
7.	Rencana Strategis dan Rencana Kerja							
7.1.	Rencana strategis	Dokumen Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sesuai	Kasubag PDE	Sekretaris	2023	Cetak dan Digital	Cetak dan Multimedia pada http://www.ppiduta.ma.nttprov.go.id	5 Tahun

[illegible]

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan
9.1	Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan	Informasi tentang kegiatan pelayanan informasi yang dilaksanakan, meliputi sarana dan prasarana, SDM, dan pelaksanaan kegiatan	Kasubag PDE selaku sekretaris PPID Pembantu Diskominfo	Sekretaris	2023	Cetak dan Digital	Cetak dan Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	5 Tahun
10. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika								
10.1	Informasi dan kebijakan yang disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Sambutan dan materi paparan yang disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pertemuan terbuka/ seminar/ FGD/Workshop	Sekretaris Dinas, dan para Kepala Bidang	Kepala Dinas	Setiap tahun	Salinan digital	Cetak dan Multimedia pada http://www.ppidutama.nttprov.go.id	5 Tahun

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


Frederik C.P. Koenunu, ST. M.H
Pembina Tingkat I
NIP.19711115 200012 1 003

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	

FORMAT DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Retensi Arsip
					Softcopy	Hardcopy	
1	2	3	4	5	6	7	8
	INFORMASI PROFIL BADAN PUBLIK						
1	Profil Singkat Badan Publik	Dinas PMD	Kepala Dinas	2023, Kupang	√	√	Tahunan
2	Visi Misi	Dinas PMD	Kepala Dinas	2023, Kupang	√	√	Tahunan
3	Tugas dan Fungsi	Dinas PMD	Kepala Dinas	2023, Kupang	√	√	Tahunan
4	Struktur Organisasi	Dinas PMD	Kepala Dinas	2023, Kupang	√	√	Tahunan
	INFORMASI PROGRAM / KEGIATAN BADAN PUBLIK						
5	Rencana Kerja Tahun 2024	Dinas PMD	Kepala Dinas	2024, Kupang	√	√	Tahunan
6	Laporan Kinerja Tahun 2023	Dinas PMD	Kepala Dinas	2023, Kupang	√	√	Tahunan
7	Rencana Strategis Tahun 2023	Dinas PMD	Kepala Dinas	2023, Kupang	√	√	Tahunan
	INFORMASI KEUANGAN						
8	Laporan Keuangan Tahun 2023 (audited)	Dinas PMD	Kepala Dinas	2023, Kupang	√	√	Tahunan
9	Inventaris Barang Milik Negara	Dinas PMD	Kepala Dinas	2024, Kupang	√	√	Tahunan
10	SOP Pengelolaan Keuangan	Dinas PMD	Kepala Dinas	2024, Kupang	√	√	Tahunan
11	Rekapan Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas PMD	Kepala Dinas	2024, Kupang	√	√	Tahunan

1	2	3	4	5	6	7	8
	INFORMASI AKSES INFORMASI PUBLIK						
12	Web/Situs/Portal Khusus PPID	Dinas PMD	Sekretaris	2024, Kupang	√	√	Tahunan
13	Web/Situs/Portal Khusus PPID terhubung dengan Website Resmi (Utama)	Dinas PMD	Sekretaris	2024, Kupang	√	√	Tahunan
14	Tata Cara Permohonan Informasi	Dinas PMD	Sekretaris	2024, Kupang	√	√	Tahunan
15	Formulir Permohonan Informasi	Dinas PMD	Sekretaris	2024, Kupang	√	√	Tahunan
16	Formulir Tanda Terima Permohonan Informasi	Dinas PMD	Sekretaris	2024, Kupang	√	√	Tahunan
17	Surat Tim Kerja PPID Tahun 2024	Dinas PMD	Kepala Dinas	2024, Kupang	√	√	Tahunan
18	Daftar Informasi Publik Tahun 2024	Dinas PMD	Kepala Dinas	2024, Kupang	√	√	Tahunan
19	Informasi Publik yang dikecualikan Tahun 2024	Dinas PMD	Kepala Dinas	2024, Kupang	√	√	Tahunan

Mengetahui,



Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Viktorius Manek, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196910081995031006

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas	
Kasubbag Kepegawaian dan Umum	
Fungsional	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kompleks Kantor Gubernur Pertama, Gedung B Lantai III
Jl. Basuki Rachmat Nomor 1, Kel. Naikolan, Kec. Maulafa
email : provnttdinaspm@gmail.com

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
		Dibuka	Ditutup	
Laporan Keuangan yang belum diaudit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai selesai proses audit



Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Viktorius Manek, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196910081995031006

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Fungsional	



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung D Lantai II

KUPANG

Kode Pos : 85142

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 188.48/123/KTKT 1.3**

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan keterbukaan informasi publik, dan sesuai dengan Pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik maka badan publik wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik yang berisi seluruh informasi publik yang dikuasainya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi internal dan pemutakhiran terhadap informasi publik yang dikuasai dan dikelola oleh Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan adanya penetapan terhadap Daftar Informasi Publik Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transisi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transisi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846
 - c. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5071);

- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 Seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);
- h. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT;
- i. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.

- Memperhatikan:
- a. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44/KEP/HK/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 841/01/KTKT1.3 tentang Pejabat Pelaksana dan Nomenklatur Jabatan Pelaksana pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diubah/diperbaiki sesuai dengan kebutuhan organisasi;

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 17 September 2024

KEPALA DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI NTT



Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No	Ringkasan Informasi Publik	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai Informasi	Waktu dan tempat pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Klasifikasi Informasi
				Digital	Cetak		
1.	Struktur Organisasi Diskopnakertrans	Sekretariat Dinas	Tahun 2022	v	v	Permanen	BK
2.	Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah	Sekretariat Dinas	Tahun 2022	v	v	Permanen	BK
3.	Alamat Kantor	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Permanen	BK
4.	Klinik Koperasi Digitalisasi	Bidang Kelembagaan	Tahun 2023	v	v	Permanen	BK
5.	Alamat Akun Media Sosial	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Permanen	SS
6.	Renstra Diskopnakertrans 2018/2023	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	5 Tahun	SS
7.	Rencana Kerja Diskopnakertrans 2023	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	BK
8.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	BK
9.	LKIP 2022	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	BK
10.	Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2022	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	BK
11.	SK PPID Pembantu Diskopnakertrans	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	SS
12.	Daftar Barang Milik Negara Diskopnakertrans	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	SS
13.	SOP Diskopnakertrans	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	SS
14.	Rekapan Jumlah ASN (PNS dan Non-PNS)	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	SS
15.	Dokumen Laporan Kinerja Tahun Berjalan (Bulanan, Triwulan, Semester)-Audited	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	BK
16.	Data Statistik Tahunan	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	BK
17.	Perjanjian Kinerja	Sekretariat Dinas	Tahun 2023	v	v	Tahunan	BK

Keterangan :

BK : Berkala
SS : Setiap Saat
SM : Serta Merta

KEPALA DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTT



Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM

Informasi yang wajib disediakan dan Umum Secara berkala:

- A. Informasi tentang profil badan publik dan Profil Kepala Dinas.
- B. Ringkasan Informasi tentang program dan/kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan badan publik.
- C. Informasi tentang kinerja dalam lingkungan badan publik berupa narasi realisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan.
- D. Informasi tentang laporan keuangan.
- E. Ringkasan akses Informasi Publik.
- F. Ringkasan tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan /atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik.
- G. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi.
- H. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapat izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan.
- I. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Jenis Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta:

- A. Informasi bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian Antariksa atau benda-benda angkasa.
- B. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit.
- C. Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan kegiatan keantariksaan.

Jenis informasi yang wajib tersedia setiap saat:

- A. Daftar Informasi Publik.
- B. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan.
- C. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang diberikan
- D. Data perbendaharaan atau inventarisasi.
- E. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung D Lantai II

KUPANG

Kode Pos : 85142

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 188.48/124/KTKT 1.3

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DINAS KOPERASI,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan keterbukaan informasi publik, dan sesuai dengan Pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik maka badan publik wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik yang berisi seluruh informasi publik yang dikuasainya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi internal dan pemutakhiran terhadap informasi publik yang dikuasai dan dikelola oleh Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan adanya penetapan terhadap Daftar Informasi Publik Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transisi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transisi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846
 - c. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5071);

- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 Seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);
- h. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT;
- i. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.

- Memperhatikan:
- a. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44/KEP/HK/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 841/01/KTKT1.3 tentang Pejabat Pelaksana dan Nomenklatur Jabatan Pelaksana pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Koperasi, Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diubah/diperbaiki sesuai dengan kebutuhan organisasi;

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 17 September 2024

KEPALA DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI NTT



Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang.

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Berita acara pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN di lingkungan kerja, masyarakat maupun keluarga	Tidak terbatas
2.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, belum terjaminnya kebenaran informasi	Mencegah penggunaan untuk Kepentingan pihak-pihak tertentu	Setelah diaudit oleh Inspektora t dan BPK RI
3	Data pribadi ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan data pribadi ASN yang dapat merugikan ASN atau Instansi	Tidak terbatas atau dengan Izin ASN bersangkutan
4	Data pribadi peserta pelatihan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan data pribadi	Tidak terbatas
5	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j Keppres No. 54 Tahun 2010	Jika dibuka akan menimbulkan penilaian yang tidak obyektif	Proses penilaian dalam PBJ lebih Obyektif	Tidak terbatas
6	Dokumen penawaran kontrak	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j 2. Keppres No. 54 Tahun 2010	Jika dibuka akan muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Persaingan usaha setara dan adil	Tidak terbatas

Keterangan :
BK : Berkala
SS : Setiap Saat
SM : Serta Merta

**KEPALA DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI NTT**



Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebutkan pada tabel diatas telah dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Rosa Da Lima Djogo, SE	Sekretaris Dinas	Sekretariat	
2.	Filipe Lelo Bere, SE, MM	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
3.	Drs. Ady Endezon Mandala, M,Si	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperaso dan UKM	Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM	
4.	Thomas Suban Hoda, ST	Kepala Bidang Ketenagakerjaan	Bidang Ketenagakerjaan	
5.	Ir. I Wayan Suburatha	Kepala Bidang Ketransmigrasian	Bidang Ketransmigrasian	
6.	Charles B. M. Foeh, SE, M.Si	Kepala UPTD Latihan Kerja	UPTD Latihan Kerja	

**KEPALA DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI NTT**



Sylvia R. Peku Djawang, SP, MM



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Kupang -NTT

www.dp3ap2kb.nttprov.go.id

K U P A N G

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
1	Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Prov.NTT	Informasi berisi : - Alamat Kantor - Sejarah singkat - Visi dan Misi - Tugas dan Fungsi - Struktur Organisasi - Profil Pimpinan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2024		V	V	Selama masa berlaku	Berkala
2	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisis hasil pengukuran kinerja yang dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2023	V	V	V	1 Tahun	Berkala

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
		Mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan							
3	Rencana Aksi Program dan Kegiatan DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi jadwal pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang dijalankan	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2019 - 2024	V	V	V	1 Tahun	Berkala
4	Laporan Keuangan (Audited) Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi Laporan Keuangan yang telah diperiksa/audit	Sub Bagian Keuangan	Dinas P3AP2KB Prov.NTT, 2019 s.d. 2023	V	V	V	10 Tahun	Berkala
5	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja DP3AP2KB Prov.NTT (E-Mep)	Informasi berisi ringkasan realisasi anggaran dan belanja DP3AP2KB Prov.NTT	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	DP3AP2KB Prov.NTT, 2019 s.d. 2023	V	V	V	1 Tahun	Berkala

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
6	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diverifikasi oleh KPK	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DP3AP2KB Prov.NTT, 2023	V	V	V	Selama masih berlaku	Berkala
7	Laporan Pelayanan Informasi Publik DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi ringkasan pelayanan informasi public yang telah dilakukan	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2022 - 2023	V	V	V	1 Tahun	Berkala
8	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi ringkasan pengukuran kepuasan masyarakat pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas P3AP2KB Prov.NTT, 2022 s.d. 2023	V	V	V	1 Tahun	Berkala

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klasifikasi
					Cetak	Digital	Online		
9	Rekapan Sebaran program dan Kegiatan DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi ringkasan sebaran program dan kegiatan yang telah dilakukan	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	DP3AP2KB Prov.NTT, 2023		V	V	1 Tahun	Berkala
10	Rencana Strategis (Renstra) DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi : - Isu Strategis - Rencana Program dan Kegiatan - Arah Kebijakan - Indikator Kinerja - Ringkasan Pendanaan - Ringkasan Rencana Kerja	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2018 – 2023, 2024 - 2026	V	V	V	5 Tahun	Berkala
11	Rencana Kerja (Renja) DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan periode satu tahun yang	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2024	V	V	V	1 Tahun	Berkala

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
		dilaksanakan dengan memperhatikan sasaran dan target dalam pencapaian yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis							
12	Pohon Kinerja (Cascading) DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dan level unit pegawai yang lebih tinggi ke level unit pegawai yang lebih rendah	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2023 – 2024	V	V	V	1 Tahun	Berkala

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
		dilaksanakan dengan memperhatikan sasaran dan target dalam pencapaian yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis							
13	Laporan Program Kegiatan DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi realisasi penyerapan anggaran program kegiatan yang dilaksanakan per triwulan, Semester serta evaluasi terhadap kinerja program kegiatan	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2023 – 2024	V	V	V	1 Tahun	Berkala
14	Laporan Tahunan DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi evaluasi realisasi program kegiatan, kinerja dan tantangan selama 1 tahun	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2023	V	V	V	1 Tahun	Berkala

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
15	Dokumen Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi rekapan pengadaan barang dan jasa	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2024	V	V	V	Selama masih berlaku	Berkala
16	Perjanjian Kinerja Pegawai Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi perjanjian kinerja pegawai berdasarkan rencana hasil kerja tahunan	Sekretariat – Program Data dan Evaluasi	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2023 – 2024	V	V	V	1 Tahun	Berkala
17	Prosedur Evakuasi Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi prosedur dan jalur evakuasi apabila terjadi keadaan darurat	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2023	V	V	V	Selama masih berlaku	Serta Merta
18	Tata Cara Permohonan Informasi DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi mekanisme cara memperoleh informasi publik	Sekretariat PPID Pelaksana	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2023	V	V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
19	Tata cara Pengajuan Keberatan DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi mekanisme cara mengajukan keberatan atas informasi publik	Sekretariat PPID Pelaksana	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2022 – 2024		V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat
20	Jadwal Pelayanan Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi Pelayanan informasi pada Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2022 – 2024		V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat
21	Peta Proses Bisnis Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang untuk menghasilkan kinerja	Sekretaris	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2022	V	V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
22	Standar Operasional Prosedur (SOP) DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi secara teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja	Sekretaris	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2021	V	V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat
23	Maklumat Pelayanan DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi Maklumat Pelayanan DP3AP2KB Prov.NTT	Sekretaris	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2022		V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat
24	Data Personaliala Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi daftar jumlah pegawai	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2022 - 2024	V	V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
25	Daftar Inventaris Barang Milik Negara DP3AP2KB Prov.NTT	Informasi berisi daftar perbendaharaan atau inventaris Barang Milik Negara	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2019 - 2024	V	V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat
26	Laporan Data kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani UPTD PPA	Informasi berisi : Jumlah Kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani UPTD PPA	Kepala UPTD PPA	UPTD PPA Prov.NTT 2023 - 2024	V	V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat
27	Rekapan Data Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Prov.NTT	Informasi berisi : yang diinput Simphoni PPA	Bidang Perlindungan Perempuan	Admin Bidang Perlindungan Perempuan	V	V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
28	Peraturan Daerah Provinsi NTT No: 5 Tahun 2022	Informasi berisi Peraturan Daerah Prov. NTT tentang Pengarus Utamaan Gender	Kepala Dinas P3AP2KB Prov. NTT	Dinas P3AP2KB Prov. NTT 2022	V	V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat
29	Peraturan Daerah Prov. NTT No. 49 Tahun 2022	Informasi berisi Peraturan Daerah Prov. NTT tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas UPTD	Kepala Dinas P3AP2KB Prov. NTT	Dinas P3AP2KB Prov. NTT 2022	V	V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat
30	Surat Edaran Gubernur NTT No: 807/01/DP3A5.1/VI 2021	Informasi berisi Surat Edaran Gubernur NTT tentang Percepatan Kepemilikan Akte Kelahiran	Kepala Dinas P3AP2KB Prov. NTT	Dinas P3AP2KB Prov. NTT 2022	V	V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia			Retensi Arsip	Klarifikasi
					Cetak	Digital	Online		
31	Surat Keputusan Gubernur NTT	Informasi berisi Surat Keputusan Gub.NTT tentang Gugus Tugas Pencegahan & Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Prov.NTT	Kepala Dinas P3AP2KB Prov.NTT	Dinas P3AP2KB Prov.NTT 2022	V	V	V	Selama masih berlaku	Setiap saat

Kupang, 23 September 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Ruth D. Laiskodat, S.Si,Apt,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196908311997032001

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	
Analisis Data dan Informasi	

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Jenis Informasi	Kategori Informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggungjawab pembuatan/penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
		Berkala	Serta Merta	Setiap Saat					
1.	Data Sekolah Prov. Nusa Tenggara Timur - Dapodikdasmen	√			Berisikan data Jumlah sekolah dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB negeri maupun swasta di Provinsi NTT (update 25/09/2024)	Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	25/09/2024 Pukul : 16.09 Wita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Hard Copy, Soft Copy dan Online	120 hari dari tanggal diterbitkan (sampai desember 2024)
2.	Data Rombongan Belajar Prov. Nusa Tenggara Timur - Dapodikdasmen	√			Berisikan data Jumlah Rombongan Belajar dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB negeri maupun swasta di Provinsi NTT (update 25/09/2024)	Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	25/09/2024 Pukul : 16.09 Wita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Hard Copy, Soft Copy dan Online	120 hari dari tanggal diterbitkan (sampai desember 2024)
3.	Data Peserta Didik Prov. Nusa Tenggara Timur - Dapodikdasmen	√			Berisikan data Jumlah Peserta Didik dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB negeri maupun swasta di Provinsi NTT (update 25/09/2024)	Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	25/09/2024 Pukul : 16.09 Wita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Hard Copy, Soft Copy dan Online	120 hari dari tanggal diterbitkan (sampai desember 2024)
4.	Data Pegawai Prov. Nusa Tenggara Timur - Dapodikdasmen	√			Berisikan data Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin dari jenjang PAUD, SD,	Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	25/09/2024 Pukul : 16.09 Wita di Dinas	Hard Copy, Soft Copy dan Online	120 hari dari tanggal diterbitkan (sampai

					SMP, SMA, SMK dan SLB negeri maupun swasta di Provinsi NTT (update 25/09/2024)		Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT		desember 2024)
5.	Data Guru Prov. Nusa Tenggara Timur - Dapodikdasmen	√			Berisikan data Jumlah Guru berdasarkan jenis kelamin dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB negeri maupun swasta di Provinsi NTT (update 25/09/2024)	Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	25/09/2024 Pukul : 16.09 Wita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Hard Copy, Soft Copy dan Online	120 hari dari tanggal diterbitkan (sampai desember 2024)
6.	Evaluasi Capaian Indeks SPM	√			Berisikan Capaian Index Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Raport Pendidikan wilayah NTT (update 25/09/2024)	Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	25/09/2024 Pukul : 16.09 Wita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Hard Copy, Soft Copy dan Online	120 hari dari tanggal diterbitkan (sampai desember 2024)
7.	Evaluasi Penganggaran Tahun 2024	√			Berisikan detail analisis anggaran yang berisi tentang berapa berapa persentase sub kegiatan dan berapa persentase anggaran SPM Pendidikan di wilayah NTT (update 25/09/2024)	Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	25/09/2024 Pukul : 16.09 Wita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Hard Copy, Soft Copy dan Online	120 hari dari tanggal diterbitkan (sampai desember 2024)
8.	Evaluasi Capaian Raport Pendidikan	√			Berisikan Capaian indicator prioritas berdasarkan Raport Pendidikan (update 25/09/2024)	Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	25/09/2024 Pukul : 16.09 Wita di Dinas Pendidikan dan	Hard Copy, Soft Copy dan Online	120 hari dari tanggal diterbitkan (sampai desember 2024)

9.	Evaluasi Angka Partisipasi Sekolah (Aps) Usia 16 – 18 Tahun		√		Bersihkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun Tahun 2021-2023 (update 25/09/2024)	Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	25/09/2024 Pukul : 16.09 Wita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Hard Copy, Soft Copy dan Online	120 hari dari tanggal diterbitkan (sampai desember 2024)
10.	Laporan Tahunan PPID Pembantu Tahun 2023	√			Bersihkan aktifitas pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi pelayanan public sepanjang tahun 2023	Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	25/09/2024 Pukul : 16.09 Wita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Hard Copy, Soft Copy dan Online	120 hari dari tanggal diterbitkan (sampai desember 2024)

a.n Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sekretaris

Ir. Syaloomi Marthina Pa, M.Sc

Pembina Tk. I

NIP. 19671217 199403 2 013



PARAF HIERARKI	
ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	4

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar hukum pengecualian informasi	Kosekuensi / pertimbangan bagi publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Laporan Keuangan yang belum di audit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Mengganggu Kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi Kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai selesai proses audit

a.n Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sekretaris


 Ir. Syaloomi Marthina Pa, M.Sc
 Pembina Tk. I
 NIP. 19671217 199403 2 013

PARAF HIERARKI	
ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	f



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari No. 52 Oebobo Kupang, Telepon/Faksimile:
(0380) 942697 Pos-Sel: biropbj@ntt prov.go.id Laman:
www.birobarjasntt.net

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : PBJ.100.3.3/III/34.1/VIII/2024**

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DILINGKUNGAN LINGKUP BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
 - b. bahwa sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaannya (tidak termasuk informasi yang dikecualikan), hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya, seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik, perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga, informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum, prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan/atau laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa tentang Daftar tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

: Daftar Informasi Publik di Lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA

: Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Agustus 2024

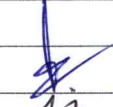


Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Serda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Adeino Da Cruz Soares, AKS, MPS, Sp
Pembina Tingkat I
NIP.19750308 199903 1 004

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
Plh. KASUBAG PEMBINAAN SDM PBJ	
PENGEMBANG SARANA DAN PRASARANA	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA BIROPENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : PBJ.100.3.3/III/34.a/VIII/2024****TANGGAL : 23 Agustus 2024****DAFTAR INFORMASI PUBLIK****Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur****A. Informasi yang wajib idumumkan dan disediakan secara berkala**

No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
		Berkala	Serta Merta	Setiap Saat					
1	Profil Badan Publik	✓			Informasi umum mengenai badan Publik Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip
2	Ringkasan Laporan Keuangan	✓			Laporan Pengelolaan Keuangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip

No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
3	Ringkasan Program dan Kegiatan	✓			Informasi Mengenai Kegiatan dan Program-program yang dilakukan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip
4	Peraturan, Kebijakan terkait Badan Publik	✓			Regulasi-regulasi terkait Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip
5	Informasi Jumlah SDM PNS dan Non PNS Badan Publik	✓			Informasi Jumlah Pegawai Biro PBJ (ASN & Non ASN)	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip
6	Informasi Peraturan Organisasi Badan Publik	✓			Dasar Hukum dalam Pelaksanaan Organisasi Badan Publik	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip

No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
7	Informasi Analisis Jabatan	✓			Berisikan informasi tentang pekerjaan, berupa: deskripsi pekerjaan, indikator pekerjaan, pendidikan dan kompetensi yang diperlukan, prosedur melaksanakan pekerjaan, hasil pekerjaan serta kompensasi dan penilaian pekerjaan. Analisis jabatan memberikan informasi penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, dan perencanaan SDM.	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip
8	LKIP 2021,2022	✓			menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam hal ini Biro Pengadaan Brang dan Jasa provinsi NTT atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD dalam satu Tahun Anggaran	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip

No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan/penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
9	Rencana Kerja Badan Publik	✓			Berisikan Informasi berkaitan perencanaan kerja Badan Publik/bagi instansi pemerintah untuk periode satu tahun anggaran	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip
10	Rencana Strategis Badan Publik	✓			Berisikan Informasi Mengenai Rencana Strategis dari Badan Publik	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip
11	Alamat Badan Publik	✓			Berisikan informasi letak suatu badan publik	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip
14	Pelayanan Informasi	✓			Berisikan Informasi mengenai Ketentuan pelayanan Informasi Publik (jam operasional)	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip
15	Maklumat Pelayanan Badan Publik	✓			Berisikan Informasi mengenai Regulasi yang menjadi dasar Pelayanan Publik	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip
16	Visi Misi Badan Publik	✓			Berisikan Informasi mengenai cita-cita badan publik dan upaya-upaya yang dilakukan untuk terwujudnya hal-hal tersebut.	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip

No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
17	Profil Singkat Pejabat Struktural	✓			Berisikan Informasi Singkat Tentang Pejabat Struktural Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip
18	Sejarah Badan Publik	✓			Berisikan Informasi Mengenai Sejarah pembentukan Badan Publik dan Perkembanganya	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip
19	Tugas dan Fungsi Badan Publik	✓			Berisikan Informasi Mengenai Tugas dan Fungsi Badan Publik	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip
20	Informasi Kepegawaian di Badan Publik	✓			Berisikan Informasi tentang Data Pegawai dalam suatu Badan Publik	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip
21	Profil PPID Pembantu Badan Publik	✓			Berisikan Informasi Singkat tentang PPID pembantu, mencakup Tugas dan Fungsi	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip
22	Bagan PPID Pembantu Badan Publik	✓			Berisikan Informasi terkait kedudukan secara struktural serta tugas dan tanggungjawab PPID Pembantu	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip

No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
23	Ringkasan RKA DPA Badan Publik	✓			Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip
24	Sakip 2021,2022	✓			Berisikan Pertanggungjawaban atas anggaran yang dipergunakan berdasarkan hasil dan Manfaat Untuk akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja dari instansi pemerintah	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip
25	LHKPN 2020,2021	✓			Berisikan Informasi Berkaitan dengan Laporan Hasil kekayaan Penyelenggara Negara sebagai salah satu bentuk pencegahan Korupsi.	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip
26	Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa	✓			Memuat Hasil dari Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan dasar untuk memulai suatu Pengadaan Barang/Jasa.	Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip

No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
27	Laporan Rutin tentang Proses Pengadaan Barang dan Jasa	✓			Berisikan Informasi mengenai dokumen-dokumen dalam pengadaan barang dan jasa, Seperti kontrak, dan sebagainya	Bagian Pengelolaan Barang/Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip
28	SOP Kepegawaian	✓			Berisikan sistem yang telah terstandarisasi berupa dokumen sebagai acuan, panduan atau pedoman yang digunakan untuk mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan dalam hal ini berkaitan dengan Kepegawaian	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip
29	SOP Administrasi	✓			Berisikan sistem yang telah terstandarisasi berupa dokumen sebagai acuan, panduan atau pedoman yang digunakan untuk mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan dalam hal ini berkaitan dengan Administrasi	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip

No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
30	SOP Pengelolaan Organisasi	✓			Brisikan sistem yang telah terstandarisasi berupa dokumen sebagai acuan, panduan atau pedoman yang digunakan untuk mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan dalam hal ini berkaitan dengan pengelolaan organisasi	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip
31	SOP Pengelolaan Keuangan	✓			Brisikan sistem yang telah terstandarisasi berupa dokumen sebagai acuan, panduan atau pedoman yang digunakan untuk mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan dalam hal ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip
32	Standar Pelayanan Publik Biro PBJ	✓			Berisikan Informasi berkaitan dengan Standar dalam pelayanan publik	Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip

No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
33	Kebijakan Operasional Layanan LPSE NTT 2022	✓			Berisikan informasi mengenai waktu pelayanan LPSE serta informasi berkaitan dengan kelengkapan yang diperlukan berkaitan dengan kebutuhan layanan operasional LPSE	Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip
34	Tata Cara Permohonan Informasi	✓			Berisikan Petunjuk Permohonan Informasi	Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip
35	Formulir Tanda Terima Permohonan Informasi	✓			Berisikan Formulir Yang harus di isi pemohon Informasi apabila telah melakukan Permohonan Informasi.	Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip
36	Formulir Permohonan Informasi	✓			Berisikan Formulir yang harus di isi dan dilengkapi oleh pemohon Informasi Publik pada satu badan publik atau Instansi Pemerintah	Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip

No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
37	Laporan PPID 2022	✓			Berisikan Informasi berkaitan dengan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik sebagai tugas dari PPID selama tahun 2022	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip
38	SK Tim PPID	✓			Berisikan Informasi Mengenai Nama Pegawai Biro PBJ yang menjadi TIM PPID beserta jabatan,tugas dan tanggungjawab	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip

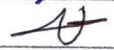
No	Jenis Informasi	Kategori informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
39	Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023	✓			Berisikan Informasi berkaitan dengan Kebijakan Layanan Informasi, Pelaksanaan Pelayanan Informasi, Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik, Permohonan Informasi dan Dokumentasi sebagai tugas dari PPID selama tahun 2023	Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Kantor Biro Pengadaan Barang dan jasa	hard copy, soft copy, online	sesuai retensi arsip

Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Adelino Da Cruz Soares, AKS, MPS, Sp
Pembina Tingkat I

NIP.19750308 199903 1 004

PARAF HIERARKI	
Plh. KASUBAG PEMBINAAN SDM PBJ	
PENGEMBANG SARANA DAN PRASARANA	

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Jenis Informasi	Kategori Informasi			Ringkasan Isi informasi	Penanggungjawab pembuatan/penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
		Berkala	Serta Merta	Setiap Saat					
1.	Data Sekolah Prov. Nusa Tenggara Timur - Dapodikdasmen	√			Berisikan data Jumlah sekolah dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB negeri maupun swasta di Provinsi NTT (update 25/09/2024)	Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	25/09/2024 Pukul : 16.09 Wita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Hard Copy, Soft Copy dan Online	120 hari dari tanggal diterbitkan (sampai desember 2024)
2.	Data Rombongan Belajar Prov. Nusa Tenggara Timur - Dapodikdasmen	√			Berisikan data Jumlah Rombongan Belajar dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB negeri maupun swasta di Provinsi NTT (update 25/09/2024)	Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	25/09/2024 Pukul : 16.09 Wita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Hard Copy, Soft Copy dan Online	120 hari dari tanggal diterbitkan (sampai desember 2024)
3.	Data Peserta Didik Prov. Nusa Tenggara Timur - Dapodikdasmen	√			Berisikan data Jumlah Peserta Didik dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB negeri maupun swasta di Provinsi NTT (update 25/09/2024)	Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	25/09/2024 Pukul : 16.09 Wita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Hard Copy, Soft Copy dan Online	120 hari dari tanggal diterbitkan (sampai desember 2024)
4.	Data Pegawai Prov. Nusa Tenggara Timur - Dapodikdasmen	√			Berisikan data Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin dari jenjang PAUD, SD,	Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	25/09/2024 Pukul : 16.09 Wita di Dinas	Hard Copy, Soft Copy dan Online	120 hari dari tanggal diterbitkan (sampai

					SMP, SMA, SMK dan SLB negeri maupun swasta di Provinsi NTT (update 25/09/2024)		Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT		desember 2024)
5.	Data Guru Prov. Nusa Tenggara Timur - Dapodikdasmen	√			Berisikan data Jumlah Guru berdasarkan jenis kelamin dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB negeri maupun swasta di Provinsi NTT (update 25/09/2024)		25/09/2024 Pukul : 16.09 Wita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Hard Copy, Soft Copy dan Online	120 hari dari tanggal diterbitkan (sampai desember 2024)
6.	Evaluasi Capaian Indeks SPM	√			Berisikan Capaian Index Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Raport Pendidikan wilayah NTT (update 25/09/2024)		25/09/2024 Pukul : 16.09 Wita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Hard Copy, Soft Copy dan Online	120 hari dari tanggal diterbitkan (sampai desember 2024)
7.	Evaluasi Penganggaran Tahun 2024	√			Berisikan detail analisis anggaran yang berisi tentang berapa berapa persentase sub kegiatan dan berapa persentase anggaran SPM Pendidikan di wilayah NTT (update 25/09/2024)	Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	25/09/2024 Pukul : 16.09 Wita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Hard Copy, Soft Copy dan Online	120 hari dari tanggal diterbitkan (sampai desember 2024)
8.	Evaluasi Capaian Raport Pendidikan	√			Berisikan Capaian indicator prioritas berdasarkan Raport Pendidikan (update 25/09/2024)	Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	25/09/2024 Pukul : 16.09 Wita di Dinas Pendidikan dan	Hard Copy, Soft Copy dan Online	120 hari dari tanggal diterbitkan (sampai desember 2024)

9.	Evaluasi Angka Partisipasi Sekolah (Aps) Usia 16 – 18 Tahun		√		Bersihkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun Tahun 2021-2023 (update 25/09/2024)	Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	25/09/2024 Pukul : 16.09 Wita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Hard Copy, Soft Copy dan Online	120 hari dari tanggal diterbitkan (sampai desember 2024)
10.	Laporan Tahunan PPID Pembantu Tahun 2023	√			Bersihkan aktifitas pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi pelayanan public sepanjang tahun 2023	Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	25/09/2024 Pukul : 16.09 Wita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Hard Copy, Soft Copy dan Online	120 hari dari tanggal diterbitkan (sampai desember 2024)

a.n Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sekretaris

Ir. Syaloomi Marthina Pa, M.Sc

Pembina Tk. I

NIP. 19671217 199403 2 013



PARAF HIERARKI	
ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	4

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar hukum pengecualian informasi	Kosekuensi / pertimbangan bagi publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Laporan Keuangan yang belum di audit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Mengganggu Kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi Kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai selesai proses audit

a.n Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sekretaris


Ir. Syaloomi Marthina Pa, M.Sc
Pembina TK. I
NIP. 19671217 199403 2 013

PARAF HIERARKI	
ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENGHUBUNG

Jl. Tebet Timur Dalam Raya Jakarta No. 42 Telp. 8314589 Fax. 8294292 Kode Pos 12820
Email : kantor.penghubung.ntt@gmail.com

Jakarta, 30 September 2024

Kepada
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur
di –
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR: 000.1.1.547/BPDI/2024

No.	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Daftar Informasi Publik Tahun 2024	1 (satu)	Dikirm untuk diproses
2.	Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2024	jepitan	

Jakarta, 30 September 2024

Kepala Badan Penghubung Provinsi NTT,



Henry D. L. Khas, S.Sos., M.Si
Pemrogram Tingkat 1
NIP. 197210011999031011

PARAF HIRARKI

Kepala Subbagian Tata Usaha



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN PENGHUBUNG

Jl. Tebet Timur Dalam Raya Jakarta No. 42 Telp. 8314589 Fax. 8294292 Kode Pos 12820
Email : kantor.penghubung.ntt@gmail.com

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NO	RINGKASAN INFORMASI PUBLIK	PEJABAT/UNIT SETKER YANG MENGUASAI INFORMASI	WAKTU & TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP	KLASIFIKASI INFORMASI
				DIGITAL	CETAK		
1	Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi NTT	Sekretariat	Jakarta, Tahun 2023	V	V	Permanen	Berkala
2	Kedudukan / domisili beserta Alamat lengkap	Sekretariat	Jakarta, Tahun 2023	V	V	Permanen	Berkala
3	Visi dan Misi	Sekretariat	Jakarta, Tahun 2023	V	V	Permanen	Berkala
4	Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi NTT	Sekretariat	Jakarta, Tahun 2023	V	V	Permanen	Berkala
5	Sejarah singkat	Sekretariat	Jakarta, Tahun 2024	V	V	Permanen	Berkala
6	Program Kerja : Rencana Kerja dan Rencana Strategis	Sekretariat	Jakarta, Tahun 2024	V	V	Permanen	Berkala
6	Informasi/Berita tentang kegiatan tugas dan pokok bidang pada Badan Penghubung Provinsi NTT	Bidang	Jakarta, Tahun 2023	V	V	Permanen	Setiap saat

Jakarta, 30 September 2024



Kepala Badan Penghubung Provinsi NTT, &

Hendry D. Zaac, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 197210011999031011



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN PENGHUBUNG

Jl. Tebet Timur Dalam Raya Jakarta No. 42 Telp. 8314589 Fax. 8294292 Kode Pos 12820
Email : kantor.penghubung.ntt@gmail.com

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Berita acara pemeriksaan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN di lingkungan kerja, masyarakat dan keluarga	Tidak terbatas
2	Laporan keuangan yang belum diaudit	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan belum terjaminnya kebenaran informasi	Mencegah penggunaan untuk pihak tertentu	Setelah diaudit oleh Inspektorat dan BPK RI
3	Data pribadi ASN	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan ASN atau instansi	Tidak terbatas atau dengan izin ASN yang bersangkutan
4	Dokumen penawaran kontrak	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menyebabkan persaingan yang tidak sehat	Persaingan usaha setara dan adil	Tidak terbatas

Jakarta, 30 September 2024



Kepala Badan Penghubung Provinsi NTT, *[Signature]*

Hendry G. Laac, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 197210011999031011



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

Jl. Bundaran PU Nomor 4, TDM, Oebobo, Kota Kupang
Website: www.bppd.nttprov.go.id, e-mail: bppdprovinsintt@gmail.com

Kupang, 11 September 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur (PPID Utama)
di
Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor: BPPD.029/2024/JUM/IX/2024

No.	Naskah Dinas	Banyaknya	Keterangan
1.	Daftar Informasi Publik BPPD Provinsi NTT Tahun 2024	1 (Satu) Berkas	

a.n. Kepala Badan Pengelola Perbatasan
Nusa Tenggara Timur
Sekretaris,



M. Christinova M. Silalahi, S.E., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 197304051998032004

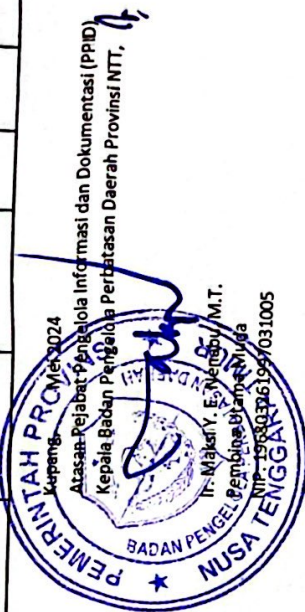
PARAF HIRARKI	
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	
Pranata Komputer Ahli Pertama	

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2024

NO	JUDUL	RINGKASAN INFORMASI PUBLIK	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	RESENSI ARSIP	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI		KLARIFIKASI INFORMASI
							CETAK	DIGITAL	
1	Profil BPPD Provinsi NTT	Berisikan: Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Alamat Kantor, dan Profil Pimpinan	Sekretariat/Sub Bagian Kepegawayaan dan Umum	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Berkala
2	Laporan Kepegawayaan BPPD NTT Tahun 2023	Berisikan Laporan Kepegawayaan BPPD NTT Tahun 2023	Sekretariat/Sub Bagian Kepegawayaan dan Umum	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Berkala
3	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik BPPD NTT Tahun 2023	Berisikan Indeks Kepuasan Masyarakat selama tahun 2023	Sekretariat/Sub Bagian Kepegawayaan dan Umum	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Berkala
4	DIP BPPD NTT Tahun 2023	Berisikan Daftar Pelayanan Informasi Publik (DIP)	Sekretariat/Sub Bagian Kepegawayaan dan Umum	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Berkala
5	Laporan PPID BPPD NTT Tahun 2023	Berisikan seluruh kegiatan PPID yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023	Sekretariat/Sub Bagian Kepegawayaan dan Umum	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Berkala
6	Perubahan RENSTRA BPPD NTT 2018-2023	Berisikan Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023	Sekretariat/Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Berkala
7	RENA BPPD 2023	Berisikan Rencana Kerja (Renja) 2023	Sekretariat/Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Berkala
8	RKT BPPD NTT 2023	Berisikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2023	Sekretariat/Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Berkala
9	Perjanjian Kinerja (PK) BPPD NTT Tahun 2023	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	Sekretariat/Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Berkala
10	LAKIP BPPD NTT Tahun 2023	Berisikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan BPPD Tahun 2023	Sekretariat/Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Berkala
11	Laporan Keuangan BPPD NTT Tahun 2023	Dokumen Laporan Keuangan Tahun 2023 (Audited)	Sekretariat/Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Berkala
12	Data Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Perbatasan Antar Negara Tahun 2025	Berisikan Data Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Perbatasan Antar Negara Tahun 2024 untuk Tahun Pengeluan 2022	Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Setiap Saat

NO	JUDUL	RINGKASAN INFORMASI PUBLIK	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/PENERBITAN INFORMASI	RETENSI ARSIP	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI		KLARIFIKASI INFORMASI
							CETAK	DIGITAL	
13	Data Kawasan Perbatasan	Daftar Kabupaten, Kecamatan, dan Desa Perbatasan	Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Setiap Saat
14	Dokumen Perjanjian Kerja Sama BPPD Provinsi NTT	Daftar PKS BPPD Provinsi NTT	Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Setiap Saat
15	Data Inventarisasi Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan	Berisikan data Inventarisasi Potensi Sumber Daya di Kawasan Perbatasan	Bidang Koordinasi Pelaksanaan	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Setiap Saat
16	Data Pilar Batas di Kawasan Perbatasan	Berisikan data pilar batas di kawasan perbatasan	Bidang Koordinasi Pelaksanaan	PPID Utama (Diskominfo Provinsi NTT)	Selama Berlaku	2023, Kupang	✓	✓	Setiap Saat





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Tom Pello No.1 Tlp. (0380) 830629 Fax. (0380) 833323
website :arpus.nttprov.go.id email :ntt.dinasarpusprov@gmail.com

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Berita Acara Pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga marartabat dan kehormatan ASN di ngkungan kerla. masyarakat mauPun keluarga	Tidak terbatas
2	Laporan keuangan yang belum diaudit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan dala oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. belum terjaminnya kebenaran informasi	Mencegah Penggunaan uniuk Kepent ngan pihak pihak tertentu	Setelah diaudit oleh Inspektorat dan BPK RI
3	Data pribadi ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan ASN atau Instansi	Tidak terbatas atau dengan Izin ASN bersangkutan
4	Data Pribadi Anggota Perpustakaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan Anggota Perpustakaan	Tidak terbatas atau dengan Izin yang bersangkutan
5	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	• UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j & Keppres No. 54 Tahun 2010	Jika dibuka akan menimbulkan penilaian yang tidak obyektif	Proses Penilaian dalam PBJ Lebih Obyektif	Tidak Terbatas
6	Dokumen penawaran kontrak	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan j & Keppres No.54 tahun 2010	Jika dibuka muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Persaingan usaha setara dan adil	Tidak Terbatas
7	Data Arsip G30S PKI	Pergub NTT Tahun 2020 No.76	Jika dipublikasi akan mengganggu keamanan Negara	Keselamatan Keluarga yang terlibat dalam G30 PKI	Tidak Terbatas

Kupang, 27 September 2024

a.n. Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Provinsi NTT,
Kepala Bidang Pengembangan dan
Pelestarian Bahan Pustaka

Ir. Yohanes Bereb

Pembina

NIP. 19671210199503 1 003

PARAF HIERARKI

Kasubag. Kepegawaian dan Umum

Pranata Komputer



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Tom Pello No.1 Tlp. (0380) 830629 Fax. (0380) 833323
website :arpus.nttprov.go.id email :ntt.dinasarpusprov@gmail.com

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No	Ringkasan Informasi Publik	Pejabat/Unit Satker yang menguasai Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk informasi		Retensi Arsip	Klasifikasi Informasi
				Digital	Cetak		
1	Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Sekretariat	Tahun 2024	v	v	Permanen	BK
2	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Sekretariat	Tahun 2022	v	v		BK
3	Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan	Sekretariat	Tahun 2023	v	v		SS
4	Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan	Sekretariat	Tahun 2023	v	v		SS
5	SOP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Sekretariat	Tahun 2023	v	v		SS
6	Data Pengunjung Perpustakaan	Bidang Layanan dan Pembinaan Perpustakaan	Tahun 2023	v	v		SS
7	Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov.NTT	Sekretariat	Tahun 2024	v	v		SS
8	Data Jumlah Perpustakaan di Provinsi NTT	Bidang Layanan dan Pembinaan Perpustakaan	Tahun 2024	v	v		SS
9	Data Koleksi Buku	Bidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka	Tahun 2023	v	v		SS
10	Data Evaluasi Penggunaan SRIKANDI Lingkup OPD Pemprov. NTT	Bidang Pengelolaan Arsip	Tahun 2023	v	v		BK
11	Daftar Arsip Statis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Bidang Pengelolaan Arsip	Tahun 2023	v	v		SS
12	Rencana Kerja (Renja) Tahun	Sekretariat	Tahun 2024	v	v		SS
13	Data Inventaris Aset	Sekretariat	Tahun 2023	v	v		SS

14	Data Evaluasi Absensi Asn Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Ntt Tahun	Sekretariat	Tahun 2023	v	v		BK
15	Laporan PPID Tahun	Sekretariat	Tahun 2023	v	v		BK
16	SK PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT	Sekretariat	Tahun 2024	v	v		BK
17	Alamat Kantor	Sekretariat	Tahun 2024	v	v		SS
18	Akun Sosial Media Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Sekretariat	Tahun 2024	v	v		SS

Keterangan :

BK : Berkala , SS : Setiap Saat

Kupang, 27 September 2024

a.n. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT,
Kepala Bidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka


Ir. Johannes Berek

Pembina

NIP. 19671210 199503 1 003

PARAF HIERARKI	
Kasubag. Kepegawaian dan Umum	
Pranata Komputer	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Polisi Militer Nomor 7 Oebobo - Kupang
Pos-el : distankp@nttprov.go.id laman : www.distankp.nttprov.go.id

Kupang, 11 September 2024

Yth. Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di -
Kupang

SURAT PENGANTAR
NO. 000.4.8.1/1801 /DPKP1.1

No.	Naskah Dinas/ Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2024	1 (satu) Jepitan	Dikirim dengan hormat, untuk diproses lebih lanjut. Terima kasih.
2	Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Tahun 2024		

Diterima tanggal :
Penerima
Nama Jabatan :

Nama :
Pangkat/ Golongan :
NIP :

Nomor telepon

Pengirim
Plt. Kepala Dinas,


Joaz Bily Oemboe Wanda, SP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197005301998031005

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/ PENERBIT INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JENIS INFORMASI				RETENSI ARSIP
					BERKALA	SETIAP SAAT	SERTA MERTA	DIKECUALIKAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	INFORMASI TENTANG PROFIL BADAN PUBLIK								
1	Nama Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Soft Copy		√			Selama Berlaku
2	Kedudukan/ domisili beserta alamat lengkap	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT terletak di Jln. Polisi Militer No. 7 kota Kupang Provinsi NTT		Soft Copy		√			Selama Berlaku
3	Profil dan Sejarah Dinas	Profil dan sejarah singkat pembentukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Sekretariat	Soft Copy	√				Selama Berlaku
4	Pejabat Struktural yang pernah menjabat	Nama-nama Kepala Dinas yang pernah menjabat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		Soft Copy	√				Selama Berlaku
5	Struktur Organisasi	Struktur Kepemimpinan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		Soft Copy	√				Selama Berlaku
6	Visi, Misi serta Tugas dan Fungsi	Visi, Misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		Soft Copy		√			Selama Berlaku

2	INFORMASI TENTANG PERATURAN, KEPUTUSAN, DAN/ ATAU KEBIJAKAN								
1	SOTK Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Peraturan Gubernur No. 79 Tahun 2023 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Sekretariat	Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku
2	SOTK Cabang Dinas dan UPTD	Peraturan Gubernur No. 103 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan,Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja Cabang Dinas dan Unit PelaksanaTeknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT		Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku
3	INFORMASI TENTANG PROGRAM/ KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN								
1	Data Produksi Tanaman Pangan Provinsi NTT Tahun 2018	Angka tetap (ATAP) Tahun 2018, keadaan luas panen, produktivitas dan produksi komoditi Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, ubi Kayu, Ubi Jalar menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT	Bidang	Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku
2	Data Produksi Tanaman Pangan Provinsi NTT Tahun 2019	Angka tetap (ATAP) Tahun 2019, keadaan luas panen, produktivitas dan produksi komoditi Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, ubi Kayu, Ubi Jalar menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT		Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku

3	Data Produksi Tanaman Pangan Provinsi NTT Tahun 2020	Angka tetap (ATAP) Tahun 2020, keadaan luas panen, produktivitas dan produksi komoditi Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, ubi Kayu, Ubi Jalar menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT	Bidang	Soft Copy dan Hard Copy	√					Selama Berlaku
4	Data Produksi Tanaman Pangan Provinsi NTT Tahun 2021	Angka tetap (ATAP) Tahun 2021, keadaan luas panen, produktivitas dan produksi komoditi Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, ubi Kayu, Ubi Jalar menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT		Soft Copy dan Hard Copy	√					Selama Berlaku
5	Data Produksi Tanaman Pangan Provinsi NTT Tahun 2022	Angka tetap (ATAP) Tahun 2022, keadaan luas panen, produktivitas dan produksi komoditi Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, ubi Kayu, Ubi Jalar menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT		Soft Copy dan Hard Copy	√					Selama Berlaku
4	PPID									
1	SK PPID Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT tahun 2024	Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID)	Sekretariat	Soft Copy dan Hard Copy	√					Selama Berlaku
2	Pedoman Umum PPID Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Pedoman Umum Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)		Soft Copy dan Hard Copy		√				Selama Berlaku
3	Laporan PPID Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2023		Soft Copy dan Hard Copy	√					Selama Berlaku
4	DIK	Daftar Informasi yang dikecualikan berupa kode akses aplikasi elektronik, SPJ, SPM, SP2D, dan data kepegawaian		Soft Copy dan Hard Copy	√					Selama Berlaku

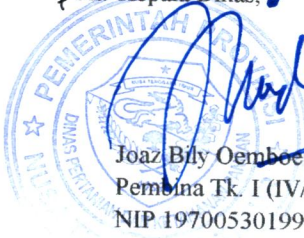
5	SOP									
1	SOP	1. SOP Publikasi data dan Informasi	Sekretariat	Soft Copy dan Hard Copy			√		Selama Berlaku	
		2. SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP yang dikecualikan		Soft Copy dan Hard Copy			√		Selama Berlaku	
		3. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan		Soft Copy dan Hard Copy			√		Selama Berlaku	
		4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik		Soft Copy dan Hard Copy			√		Selama Berlaku	
		5. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik		Soft Copy dan Hard Copy			√		Selama Berlaku	
		6. SOP Pengelolaan kebertan atas Informasi		Soft Copy dan Hard Copy			√		Selama Berlaku	
		7. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik		Soft Copy dan Hard Copy			√		Selama Berlaku	
		8. SOP Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		Soft Copy dan Hard Copy			√		Selama Berlaku	
6	KINERJA YANG TELAH MAUPUN SEDANG DILAKSANAKAN									
1	Penilaian Kinerja	1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2023	Sekretariat	Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku	
2	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024		Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku	
3	Renstra	1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023		Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku	
		2.Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026		Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku	
4	Memory Akhir Jabatan (MAJ) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Laporan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Periode Agustus 2020 s/d Februari 2024		Soft Copy dan Hard Copy			√		Selama Berlaku	
5	Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku	

6	DPPA - Belanja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2023	Dokumen Realiasi Anggaran Belanja berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2023
7	TJPS	Program Tanam Jagung Panen Sapi Di NTT
8	Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II, III, dan IV Tahun 2024	Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dengan Gubernur NTT, Eselon III dengan eselon II, dan Eselon IV dengan eselon III Tahun 2023 dan Tahun 2024
9	IKU Dinas Tahun 2024	Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2024
10	RPJMD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023 bidang Pertanian

Sekretariat

Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku
Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku
Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku
Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku
Soft Copy dan Hard Copy	√				Selama Berlaku

Plt. Kepala Dinas, ✓


Joaz Bily Oemboc Wanda, SP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197005301998031005

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	URAIAN INFORMASI	URAIAN HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1	Dokumen penawaran kontrak pengadaan barang dan jasa	Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Selama proses pengadaan barang dan jasa	1. Menimbulkan persaingan tidak sehat antar penyedia	1. Menjaga keakuratan dan obyektifitas penilaian
		Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa			2. Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif	2. Penetapan nilai pengadaan yang akurat
2	Kode akses aplikasi elektronik	UU. No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Selama berlaku	Penyalahgunaan penilaian yang tidak bertanggung jawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
3	SPJ,SPM, SPP, SP2D	UU. No. 8/1974 tentang Keuangan Negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Masa berlaku pekerjaan	Mengungkapkan data keuangan	Menjaga kerahasiaan data keuangan dan pembelanjaan
4	Rincian kegiatan anggaran (RKA)	Permendagri No. 52 Tahun 2015 pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah anggaran 2017	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Selama 1 Tahun Anggaran	Menimbulkan penilaian tidak obyektif	Penetapan nilai anggaran yang akurat

5	Penetapan kinerja pegawai	Peraturan Menteri dalam Negeri No. 23 Tahun 2017 pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Selama Periode	Mengungkap data pribadi pegawai	Menjaga kerahasiaan data pegawai
6	Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)/ Data Nominatif	Pasal 17 H Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Selama Undang - Undang berlaku	Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan	Melindungi data pribadi pegawai
7	Nota Dinas : tentang pelaksanaan program/ informasi yang berkaitan dengan kegiatan intern Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I dan Pasal6 ayat 3. d	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/ kebijakan
8	Dokumen dan korespondensi terkait hukuman disiplin pegawai	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Tidak Terbatas	Akan mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data diri pegawai
9	Dokumen hasil penilaian kompetensi ASN lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 pasal 17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/ kebijakan

Plt. Kepala Dinas,


 Joaz Bily Oemboe Wanda, SP
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP 197005301998031005



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PETERNAKAN
Jalan Veteran – Fatululi, Telp/Faks. 0380-825250,
Email: web@idedanak@pro.go.id
KUPANG



Kupang, 23 September 2024
Kepada
Yth Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di -
Kupang -

SURAT PENGANTAR
Nomor : Disnak.524.05045 / PDE/IX/2024

No.	Jenis surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	1 (satu) Jepitan	Untuk urusan selanjutnya


Kepala Dinas Peternakan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Sekretaris,
Agustinus Saleah
Pembina
NIP. 196708231995031003

PARAF HIERARKI	
Fungsional Umum	

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

BADAN PUBLIK DINAS PETERNAKAN PROVINSI NTT TAHUN 2024

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Klasifikasi Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	Grand Design Pengembangan Peternakan Provinsi NTT Tahun 2021 – 2028	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Setiap Saat	2021	Hard copy dan soft copy	20 tahun
2	Rencana Kerja Badan Publik Dinas Peternakan Tahun 2024	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan
3	Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan
4	Sistem Informasi REncana Umum Pengadaan 2024	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan
5	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan
6	SK PPID DINAS PETERNAKAN PROVINSI NTT	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Setiap saat	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan
7	DAFTAR BARANG MILIK DAERAH DINAS PETERNAKAN PROVINSI NTT	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2024	Hard copy dan soft copy	20 Tahun
8	LAPORAN LHKPN DAN LHKASN BADAN PUBLIK	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan
9.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Dinas, UPTD 1 dan UPTD 2	Berkala	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan
10.	PERJANJIAN KINERJA BADAN PUBLIK	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2024	Hard copy dan soft copy	5 Tahun
11.	MOU TENTANG EKOSISTEM PENGEMBANGAN SEKTOR PETERNAKAN DI PROVINSI NTT	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Bidang Agribisnia dan Kelembagaan Peternakan	Setiap saat	2023	Hard copy dan soft copy	10 Tahun

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Klasifikasi Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
12.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Setiap saat	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan
13.	DATA PEGAWAI BADAN PUBLIK	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Setiap saat	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan
14.	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 294 / Kep /HK/ 2024	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Setiap saat	2024	Hard copy dan soft copy	5 Tahun
15.	LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PUBLIK	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan
16.	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penaggulangan Rabies	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Setiap saat	2024	Hard copy dan soft copy	5 Tahun
17.	Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 01 / Disnak / 2024	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Setiap saat	2024	Hard copy dan soft copy	5 Tahun
18.	Standar Operasional Prosedur Badan Publik	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Setiap saat	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan
19.	Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi NTT	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat	Setiap saat	2024	Hard copy dan soft copy	5 Tahun
20.	LAPORAN KEUANGAN	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan
21.	LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan
22.	Laporan Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasal Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi		Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
23.	STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PUBLIK	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat, Bidang dan UPT	Berkala	2024	Hard copy dan soft copy	Permanen
24.	PROFIL BADAN PUBLIK	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat	Setiap saat	2024	Hard copy dan soft copy	20 Tahun
25.	Aplikasi Media Sosial Badan Publik (facebook, youtube, twitter, Instagram, tiktok)	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Setiap saat	2024	Hard copy dan soft copy	Permanen
26.	Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Setiap saat	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan
27.	Laporan Kejadian Penyakit	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Serta merta	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan


 Kepala Dinas Peternakan
 Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Agustinus Saloon
 Pembina
 NIP.196708231995031003

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PETERNAKAN PROVINSI NTT TAHUN 2024

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:				
	A. Riwayat dan kondisi anggota keluarga.				
	a. Data pribadi pelamar umum pegawai.	a. Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	a. Selama proses rekrutmen pegawai.	a. Mengungkap data pribadi pelamar yang bersifat rahasia.	a.1 Menjaga privasi. a.2 Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.
	b. Biodata pegawai.	b. Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	b.1 Selama yang bersangkutan menjadi PNS. b.2 Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.	b. Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	b.1 Menjaga privasi. b.2 Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.
	c. Dokumen/berkas kepegawaian PNS.	c. Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	c.1 Selama yang bersangkutan menjadi PNS. c.2 Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.	c. Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	c.1 Menjaga privasi. c.2 Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.
	d. Identitas PNS yang melanggar	d. Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008	d.1 Selama yang bersangkutan menjadi	d. Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat	d.1 Menjaga privasi.

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	disiplin/dijatuhi hukuman disiplin	tentang KIP.	PNS. d.2 Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.	rahasia.	d.2 Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.
	e. Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian	e. Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	e.1 Selama yang bersangkutan menjadi PNS. e.2 Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.	e. Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	e.1 Menjaga privasi. e.2 Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.
	f. Data pribadi pegawai kontrak/Non-PNS	f. Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	f.1 Selama yang bersangkutan menjadi pegawai kontrak/Non-PNS. f.2 Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.	f. Mengungkap data pribadi pegawai kontrak/Non-PNS yang bersifat rahasia.	f.1 Menjaga privasi. f.2 Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.
	B. Riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan dan hasil pengukuran kompetensi pegawai				
	a. Data rekam medis	a.1 Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. a.2 UU Kesehatan 23/1992 pasal 57 ayat 1.	a. Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.	a. Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia.	a. Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia.
	b. Data pegawai yang terpapar HIV dan AIDS	b.1 Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	b. Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.	b. Mengungkap data pribadi ODHA yang bersifat rahasia.	b. Melindungi data pribadi ODHA yang bersifat rahasia.

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
		b.2 Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf b Perda Provinsi NTT Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.			
	c. Hasil ujian kompetensi pegawai kontrak/Non PNS.	c. Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	c. Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.	Mengungkap data pribadi pegawai kontrak/Non PNS yang bersifat rahasia.	c. Menjaga privasi. Melindungi data pribadi pegawai kontrak/Non PNS yang bersifat rahasia.
	C. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang/pribadi.				
	a. Laporan keuangan yang belum diaudit.	a. Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	a. Sampai dengan proses audit selesai.	a. Informasi belum terjamin kebenarannya.	a. Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter- ekspose ke masyarakat.
	b. Rekening Bank pribadi PNS dan Pegawai Kontrak/Non PNS.	b.1 Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	b. Selama rekening masih digunakan.	b. Penyalahgunaan oleh pihak lain.	b. Menjaga keamanan rekening bank pribadi PNS dan Pegawai Kontrak/Non PNS.
		b.2 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 1 dan 6. b.3 UU No. 10 tahun 1998 pasal 40 ayat 1: "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai menyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam pasal 41-44 dan UU No.14/2008 pasal 17 huruf h			

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	D. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual dan rekomendasi kemampuan seseorang.				
	a. Daftar nilai DP3/SKP Pegawai.	a. Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	a. Selama 3 periode penilaian.	a. Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	a. Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
	b. Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum.	b. Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	b. Sampai diterbitkannya SK.	b. Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum.	b. Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja.
	E. Data usulan pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural.	- Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	- Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah.	- Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural.	- Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja.
2	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X, Sangat Rahasia (SR), dan Rahasia [R].	- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	- Hingga surat tersebut selesai diproses.	- Menghambat Kebijakan Pimpinan.	- Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja.
3	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa.	- Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pasal 66.	- Selama proses pengadaan barang dan jasa	- Menimbulkan penilaian yang tidak objektif.	- Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar.
		- Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.			

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
4	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa.	- Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pasal 66. - Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.	- Selama proses pengadaan barang dan jasa.	- Muncul persaingan usaha tidak sehat.	- Dapat menjaga objektifitas penilaian.
5	Kode akses (<i>username</i> dan <i>password</i>) Aplikasi, Internet/Wifi, termasuk <i>username</i> dan <i>password</i> website Dinas Peternakan Provinsi NTT dan Agricenter serta <i>username</i> dan <i>password</i> email yang dikelola Dinas Peternakan Provinsi NTT (http://www.disnak.nttprov.go.id)	- UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.	- Selama kode masih digunakan.	- Penyalahgunaan oleh pihak lain.	- Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia.
6	Kronologi dan proses mediasi.	- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 pasal 1 ayat 12.	- Apabila mendapat persetujuan dari para pihak.	- Mengungkap masalah pribadi para pihak yang bersifat rahasia.	- Menjaga privasi. - Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.
7	Dokumen persidangan adjudikasi yang terkait dengan informasi yang dikecualikan.	- Pasal 26 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.	- Apabila mendapat persetujuan dari para pihak dan Majelis Komisioner.	- Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.	- Menjaga privasi. - Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
8	Rekaman elektronik persidangan ajudikasi yang memuat informasi yang dikecualikan.	- Pasal 33 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.	- Apabila mendapatkan persetujuan dari para pihak dan Majelis Komisioner. - Dapat diberikan dalam bentuk cetak dengan penghitaman/pengaburan pada bagian informasi yang dikecualikan.	- Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.	- Menjaga privasi. - Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.
9	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j.	- Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	- Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	- Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j.	- Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	- Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.	- Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.


 Kepala Dinas Peternakan
 Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Alvin Sinus Salean
 Pembina
 NIP. 19670823 199503 1 003

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	BERITA TERKAIT DINAS	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2023/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
2	DAFTAR PNS & NON PNS	Dinas PUPR Prov. NTT	Sub Kepegawaian dan Umum (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
3	DOKUMEN LENGKAP PEKERJAAN JASA SURVEY GEOLISTRIK PEMBANGUNAN SUMUR BOR DAN SARANA PENDUKUNGNYA	Dinas PUPR Prov. NTT	Bidang Pembangunan SDA	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
4	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) DINAS PUPR PROVINSI NTT	Dinas PUPR Prov. NTT	Sub Keuangan (Sekretariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
5	e-SPM BANGDA KEMENDAGRI TRIWULANAN	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2023/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
6	LAPORAN APBD BULANAN DINAS PUPR PROVINSI NTT	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
7	LAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BULANAN	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
8	LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGARA NEGARA DINAS PUPR	Dinas PUPR Prov. NTT	Sub Kepegawaian dan Umum (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
9	LAPORAN KERUSAKAN INFRASTRUKTUR	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2023/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
10	LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku

11	LAPORAN KEUANGAN	Dinas PUPR Prov. NTT	Sub Keuangan (Sekretariat)	2023/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
12	LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
13	LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
14	LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) DINAS PUPR	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
15	LAPORAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2023/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
16	LAPORAN STANDAR PELAYANAN UMUM (SPM)	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
17	LAPORAN TUGAS PEMBANTUAN (APBN) BULANANAN	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
18	MEDIA SOSIAL DINAS	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2023/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
19	PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2023/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
20	PERJANJIAN KINERJA DINAS	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2023/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
21	PROFIL DINAS	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2023/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
22	REKAP RENCANA UMUM PENGADAAN	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2023/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
23	REKAPITULASI DATA KONDISI JALAN PROVINSI NTT	Dinas PUPR Prov. NTT	Bidang Bina Marga	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
24	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
25	RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2023/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
26	SEBARAN PAKET KONSTRUKSI SESUAI DPPA	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
27	STRUKTUR ORGANISASI	Dinas PUPR Prov. NTT	Sub Kepegawaian dan Umum (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
28	SURAT KEPUTUSAN (SK) KEPALA DINAS PUPR PROVINSI NTT TENTANG PPID	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku

29	SURAT KEPUTUSAN JALAN PROVINSI NTT	Dinas PUPR Prov. NTT	Bidang Bina Marga	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
30	SURAT KEPUTUSAN PPID PEMBANTU DINAS PUPR	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2024/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
31	TANGGAPAN PERMOHONAN DATA	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2023/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku
32	WEBSITE RESMI DINAS	Dinas PUPR Prov. NTT	PDE (Sekertariat)	2023/Kupang	Softcopy	Selama Berlaku

Menyetujui
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur

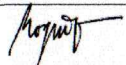

Ir. BENYAMIN NAHAK, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19710428 199903 1 008

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pada hari ini Jumat tanggal 27 bulan September tahun 2024, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Barang dan Jasa	- Pasal 17 huruf b, huruf i dan huruf j pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Berdampak pada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat	Mengamankan dan melindungi kerahasiaan data intern dalam proses PBJ	Sampai dengan selesainya penetapan pemenang pada proses PBJ
Daftar Harga Penawaran dari Penyedia Jasa atau Calon Penyedia Jasa	- Pasal 17 huruf b, huruf i dan huruf j pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Berdampak pada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat	Mengamankan dan melindungi kerahasiaan data intern dalam proses PBJ	Sampai dengan selesainya penetapan pemenang pada proses PBJ
Dokumen Perencanaan Pembangunan Infrastruktur pada Bidang2 Teknis Dinas	- Pasal 17 huruf i dan huruf j pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berdampak pada : - Terjadinya penyalahgunaan dokumen untuk kepentingan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan - Kerugian atas kepemilikan data	- Melindungi kerahasiaan Data Perencanaan	Sampai selesainya pembangunan infrastruktur yg termuat dalam desain Perencanaan.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada tabel diatas telah dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Ir. Benyamin Nahak, MT	Kepala Dinas	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	
2	Rosye M. Hedwine, ST. M.Si	Sekretaris Dinas	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Ir. Benyamin Nahak, MT

Pembina Tk. 1

NIP. 19710428 199903 1 008



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan. Polisi Militer No. 01 Kupang
Email : provnttsatpolpp@gmail.com
Website : polppprovntt.id
K U P A N G

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	Pelaksanaan Kegiatan Turjawali	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Bidang Trantibum	Awal Januari/Kupang	Dokumentasi	Berkala
2	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Perda dan Perkada	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Bidang Penegakan	Awal Januari/Kupang	Dokumentasi	Berkala

3	Pelaksanaan Kegiatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Bidang Penegakan	Awal Januari/Kupang	Dokumentasi	Berkala
4	Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan dan Penertiban Aset Penting Milik Pemerintah Provinsi NTT	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Bidang Trantibum	Awal Januari/Kupang	Dokumentasi	Berkala
5	Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Aksi (Demonstran) dan Reaksi Cepat	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Bidang Trantibum	Awal Januari/Kupang	Dokumentasi	Berkala
6	Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Bidang Sumber Daya Aparatur	Awal Januari/Kupang	Dokumentasi	Berkala
7	Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran Pada Provinsi/Kabupaten dan Kota	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Bidang Linmas	Awal Januari/Kupang	Laporan	Berkala

8	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	PDE/Sekretariat	Awal Januari/Kupang	Laporan	Berkala
9	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	PDE/Sekretariat	Awal Januari/Kupang	Laporan	Berkala
10	Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	PDE/Sekretariat	Awal Januari/Kupang	Laporan	Berkala
11	Laporan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (AKIP)	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	PDE/Sekretariat	Awal Januari/Kupang	Laporan	Berkala
12	Rencana Strategis (Renstra)	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	PDE/Sekretariat	Awal Januari/Kupang	Laporan	Berkala

13	Rencana Kerja Tahunan	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	PDE/Sekretariat	Awal Januari/Kupang	Laporan	Berkala
14	Laporan Kinerja Bulanan	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	PDE/Sekretariat	Awal Januari/Kupang	Laporan	Bulanan
15	Laporan Kinerja Triwulan	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	PDE/Sekretariat	Awal Januari/Kupang	Laporan	Triwulan
16	Laporan Kinerja Semester	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	PDE/Sekretariat	Awal Januari/Kupang	Laporan	Semester
17	Laporan Kinerja Tahunan	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	PDE/Sekretariat	Awal Januari/Kupang	Laporan	Berkala

18	Laporan E-Monev	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	PDE/Sekretariat	Awal Januari/Kupang	Laporan	Bulanan
19	Laporan Capaian SPM	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	PDE/Sekretariat	Awal Januari/Kupang	Laporan	Triwulan
20	Data dan Informasi Kepegawaian	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Umum dan Kepegawaian (Sekretariat)	Awal Januari/Kupang	Laporan	Berkala
21	Struktur Organisasi	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Umum dan Kepegawaian (Sekretariat)	Awal Januari/Kupang	Bagan Struktur	Berkala
22	Profil Pimpinan	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Umum dan Kepegawaian (Sekretariat)	Awal Januari/Kupang	Profil	Berkala

23	Data Aset	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Umum dan Kepegawaian (Sekertariat)	Awal Januari/Kupang	Laporan	Berkala
24	Laporan Keuangan (Auditet)	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Keuangan (Sekertariat)	Awal Januari/Kupang	Laporan	Berkala

Menyetujui

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


Drs. Petrus Seran Tahuk
Pembina Utama Muda
NIP. 197012311991011005

Keterangan :

1. Ringkasan Isi Informasi berupa judul informasi public;
2. Perangkat daerah yang menguasai informasi : keterangan perangkat daerah yang menguasai informasi

3. Penanggungjawab pembuatan/penerbitan informasi : pejabat yang menerbitkan informasi;
4. Waktu dan tempat pembuatan informasi keterangan waktu dan tempat diterbitkan informasi;
5. Bentuk informasi yang tersedia : keterangan informasi tersedia dalam bentuk hard copy atau soft copy atau keduanya;
6. Retensi arsip : jangka waktu penyimpanan arsip.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NTT
TAHUN 2024

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Retensi Arsip
1	Struktur Organisasi	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2024	Cetak dan Digital	Permanen
2	Tugas Pokok dan Fungsi	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2023 – 2024	Cetak dan Digital	Permanen
3	Profil Kantor	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2022 – 2024	Cetak dan Digital	Permanen
4	Profil Pimpinan PD	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2023 – 2024	Cetak dan Digital	Permanen
5	Rencana Strategis (Renstra)	Bagian Keuangan	Kupang, 2024	Cetak dan Digital	5 Tahun
6	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024	Bagian Keuangan	Kupang, 2023 – 2024	Cetak dan Digital	Tahunan
7	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2023 – 2024	Cetak dan Digital	Tahunan
8	LAKIP 2023	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2023 – 2024	Cetak dan Digital	Tahunan
9	Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2023	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2023 – 2024	Cetak dan Digital	Tahunan
10	Daftar Informasi Publik (DIP)	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2024	Cetak dan Digital	Tahunan

11	SK PPID Pembantu	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2024	Cetak dan Digital	Permanen
12	Rekapan Daftar PNS dan Non PNS	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2024	Cetak dan Digital	Permanen
13	Rekapan Anggota DPRD Provinsi NTT	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2024 – 2029	Cetak dan Digital	5 Tahun
14	Regulasi Pelaksanaan Tugas	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2023 – 2024	Cetak dan Digital	Permanen
15	Dokumen Laporan Tahunan	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2023 – 2024	Cetak dan Digital	Tahunan
16	Dokumen Kinerja Tahun Berjalan	Subbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan	Kupang, 2023 – 2024	Cetak dan Digital	Tahunan
17	Jumlah Perda yang dihasilkan DPRD Provinsi NTT	Bagian Persidangan	Kupang, 2023 – 2024	Cetak dan Digital	Tahunan

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
SEKETARIAT DPRD PROVINSI NTT TAHUN 2024**

N O	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
			PENGECUALIAN	AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Data pribadi penduduk (No KK, NIK) DPRD dan PNS	• UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Pasal 17 huruf i • UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)	• Sampai terbitnya keputusan Mendagri /Gubernur/ Bupati /Walikota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk	• Diketuinya rahasia pribadi seseorang	• Terlindunginya rahasia pribadi seseorang
2.	Daftar Nilai SKP PNS	• UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Pasal 17 huruf i	• Selama masih berlaku	• Diketuinya rahasia pribadi seorang PNS	• Terlindunginya data pribadi seorang PNS yang bersifat rahasia
3.	Dokumen penyelesaian sengketa	• UU no.14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Pasal 17 huruf a	• Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)	• Terhambatnya proses penegakan hukum	• Terbantunya proses penengakan hukum
4.	Laporan Keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)	• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat (1)	• Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	• Terhambatnya kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	• Terbantunya keberhasilan pelaksana pembangunan

5.	Hasil Rapat dari jenis-jenis rapat DPRD Provinsi NTT yang dinyatakan tertutup dalam tata tertib DPRD Provinsi NTT	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, h dan i • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i • UU No. 14 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah • Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	• 20 Tahun atau sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum	• Berpotensi menyebabkan kebocoran informasi yang bersifat rahasia	• Menjaga dan menjamin keharasiaan informasi yang bersifat rahasia sehingga menciptakan situasi yang kondusif
----	--	---	---	--	---

Kupang, 01 Mei 2024.

PLT. Sekretaris DPRD

Provinsi Nusa Tenggara Timur



Alfonso Watu Raka, SE,MM

Pembina Tingkat I (VI/b)

NIP. 19710114 199903 1 006